

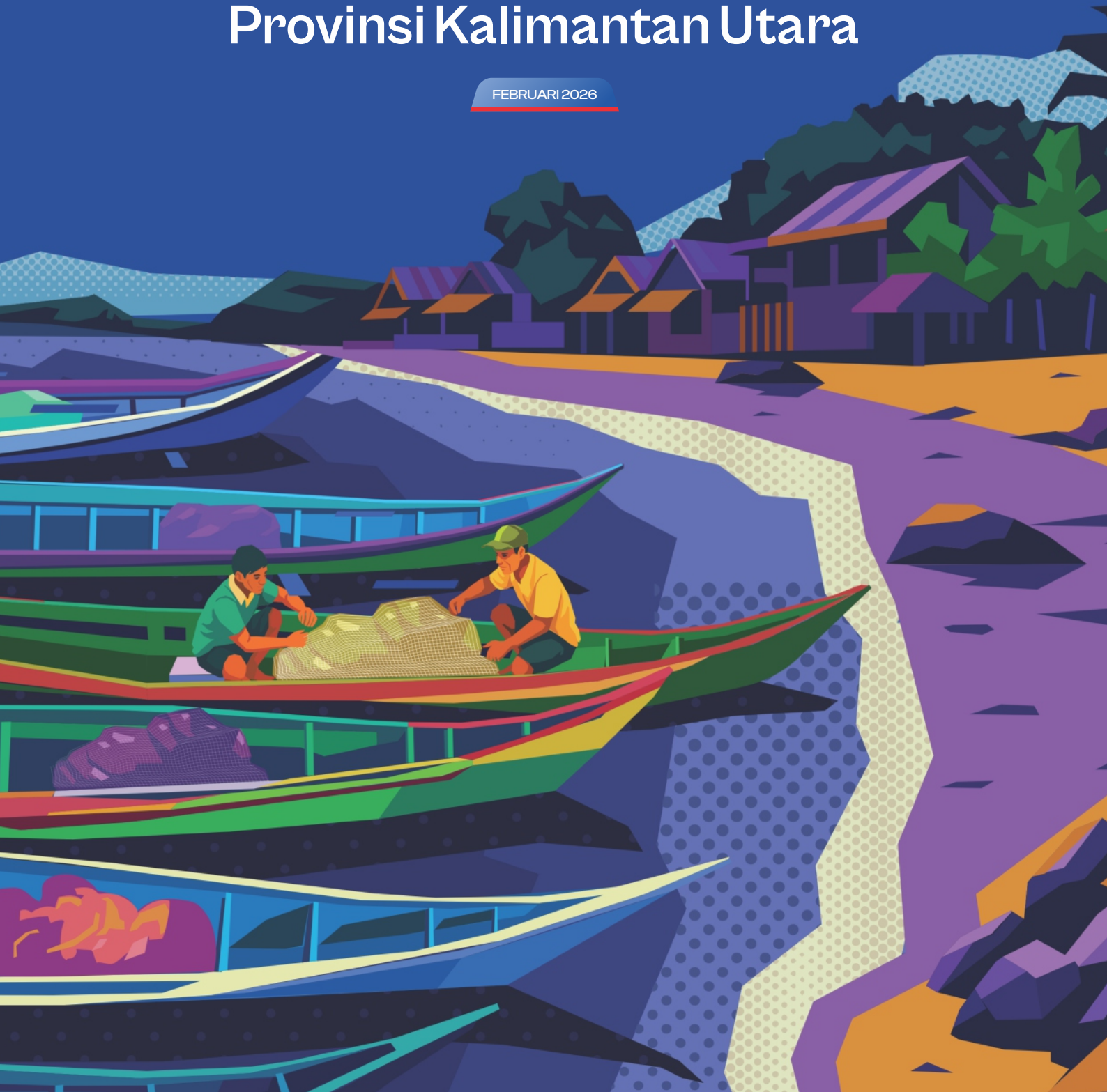


BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

FEBRUARI 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Utara

FEBRUARI
2026

Visi

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging market* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara. Kajian ini mengulas asesmen terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, pembiayaan daerah dan akses keuangan UMKM, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan diharapkan menjadi bahan referensi bagi stakeholders di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan penyusunan kebijakan baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas LU yang mengalami peningkatan seperti LU Konstruksi yang tumbuh lebih tinggi didorong oleh berlanjutnya pembangunan Kawasan Industri di Tanah Kuning, LU Perdagangan sejalan dengan meningkatnya produksi lapangan usaha dan aktivitas perdagangan pada HBKN Nataru, serta LU Industri Pengolahan didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 juga tumbuh positif yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan *net* ekspor.

Analisis pada laporan perekonomian menggunakan data primer, data sekunder, serta informasi dari berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah daerah/pusat maupun swasta. Melalui kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan. Besar harapan kami bahwa hubungan kemitraan strategis yang terjalin selama ini dapat terus terjaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal di masa yang akan datang bagi semua kalangan, khususnya dalam pengambilan kebijakan terkait perekonomian Provinsi Kaltara.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Utara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Tarakan, 3 Maret 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Utara

Hasiando G. Manik
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Tabel Indikator	xii

01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1	Gambaran Umum	2
1.2	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	2
1.3	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	8
Boks 1		13
	<i>Benuanta Investment and Economic Summit (BIES) 2025</i>	
	“Kalimantan Utara sebagai Episentrum Pertumbuhan Baru: Menakar Peran Hilirisasi, Industrialisasi, dan Konektivitas Global terhadap Perekonomian Daerah”	

02

Keuangan Pemerintah Daerah

2.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	18
2.2	APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara	21
2.3	Dana Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat	22

03

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1.	Gambaran Umum	26
3.2.	Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	26
3.3.	Inflasi Tahunan (yoy)	28
3.4.	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	29
3.5.	Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	31
3.6.	<i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2026	31
3.7.	Prakiraan Inflasi Triwulan I 2026	33
Boks 2		34
	<i>Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026</i>	

04

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.1.	Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan	38
4.2.	Pembiayaan Daerah	40
4.3.	Pembiayaan Sektor Korporasi	41
4.4.	Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	41
4.5.	Pengembangan Akses Keuangan UMKM	42
Boks 3		45
	Sinergi Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2025: Memperkuat Kapabilitas UMKM, Pelestarian Budaya, dan Ketangguhan Ekonomi Daerah	

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai	50
5.2	Pengelolaan Uang Rupiah	50
5.3	Perkembangan QRIS	53
5.4	Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara	54
5.5	Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	55
Boks 4		55
	Kaltara Digital QRIS (KATALIS) Bendindang Tahun 2025	

06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1.	Ketenagakerjaan	61
6.2.	Kesejahteraan	62
6.2.1.	Kemiskinan	62
6.2.2.	Nilai Tukar Petani	63
6.2.3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64
6.2.4.	<i>GINI Ratio</i>	65

07

Prospek Perekonomian Daerah

7.1.	Prospek Perekonomian Global	70
7.2.	Prospek Perekonomian Indonesia	70
7.3.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara	71
7.4.	Prospek Inflasi Kalimantan Utara	73

Daftar Grafik

01

Grafik I.1	Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan IV 2025	2
Grafik I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional	2
Grafik I.3	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan IV 2025	2
Grafik I.4	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan	3
Grafik I.5	Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India	4
Grafik I.6	Volume Impor Batu Bara Tiongkok	4
Grafik I.7	Harga Batubara Acuan	4
Grafik I.8	Kredit Pertambangan Kaltara	4
Grafik I.9	Ekspor Batu Bara	5
Grafik I.10	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian	5
Grafik I.11	Volume Ekspor Udang	5
Grafik I.12	Volume Ekspor Rumput Laut	5
Grafik I.13	Volume Ekspor Ikan	5
Grafik I.14	Harga TBS	6
Grafik I.15	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan	6
Grafik I.16	IKK, IKE, dan IEK Kaltara	6
Grafik I.17	Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua	6
Grafik I.18	Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat	6
Grafik I.19	Kredit Perdagangan Kaltara	6
Grafik I.20	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi	7
Grafik I.21	Penjualan Semen Kaltara	7
Grafik I.22	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan	7
Grafik I.23	Volume Ekspor <i>Plywood</i>	7
Grafik I.24	Kredit Industri Kaltara	8
Grafik I.25	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga	8
Grafik I.26	Indeks Survei Konsumen	9
Grafik I.27	Kredit Konsumsi	9
Grafik I.28	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB	9
Grafik I.29	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	9
Grafik I.30	Penanaman Modal Asing (PMA)	9
Grafik I.31	Impor Barang Modal	10
Grafik I.32	Kredit Investasi Kaltara	10
Grafik I.33	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah	10
Grafik I.34	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri	10
Grafik I.35	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara	11
Grafik I.36	Ekspor Batu bara	11
Grafik I.37	Ekspor <i>Plywood</i>	11
Grafik I.38	Ekspor Udang	11
Grafik I.39	Ekspor Ikan	11

Grafik I.40	Komoditas Utama Ekspor Triwulan IV 2025	11
Grafik I.41	Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan IV 2025	12
Grafik I.42	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri	12
Grafik I.43	Komoditas Utama Impor Triwulan IV 2025	12
Grafik I.44	Negara Utama Asal Impor Triwulan IV 2025	12

02

Grafik II.1	Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	19
Grafik II.2	Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	20
Grafik II.3	Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025 (Miliar Rupiah)	22
Grafik II.4	Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan IV 2025	22

03

Grafik III.1	Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional	26
Grafik III.2	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan IV 2025	26
Grafik III.3	Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara	33
Grafik III.4	Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara	33

04

Grafik IV.1	Perkembangan Intermediasi Perbankan	38
Grafik IV.2	Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	38
Grafik IV.3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	38
Grafik IV.4	Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara	38
Grafik IV.5	Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara	38
Grafik IV.6	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	39
Grafik IV.7	Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional	39
Grafik IV.8	Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	40
Grafik IV.9	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara	40
Grafik IV.10	Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha	40
Grafik IV.11	Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara	41
Grafik IV.12	Pangsa Kredit Korporasi	41
Grafik IV.13	LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)	41
Grafik IV.14	LS Harga Jual dan Harga Batu bara	41
Grafik IV.15	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara	42
Grafik IV.16	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya	42

Grafik IV.17	Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara	42
Grafik IV.18	Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara	43
Grafik IV.19	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara	43
Grafik IV.20	Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya	43
Grafik IV.21	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara	43
Grafik IV.22	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	44
Grafik IV.23	KUR Kaltara	44
Grafik IV.24	Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara	44
Grafik IV.25	Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara	44

05

Grafik V.1	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara	50
Grafik V.2	Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara	50
Grafik V.3	Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara	50
Grafik V.4	Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara	50
Grafik V.5	Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk	51
Grafik V.6	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik V.7	Denominasi <i>Outflow</i> Uang Logam Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik V.8	Denominasi <i>Inflow</i> Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025	51
Grafik V.9	Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)	52
Grafik V.10	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara	53
Grafik V.11	Kontribusi <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara	53
Grafik V.12	Perkembangan APMK	54

06

Grafik VI.1	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	60
Grafik VI.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara	60
Grafik VI.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025	62
Grafik VI.4	Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025	63
Grafik VI.5	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2025	63
Grafik VI.6	NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	64
Grafik VI.7	NTNP, NTN, dan NTPI	64
Grafik VI.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara	64

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	3
Tabel I.2	Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	8
Tabel I.3	Nilai Perdagangan Internasional Kaltara	10
Tabel II.1	Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	18
Tabel II.2	Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	19
Tabel II.3	Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	20
Tabel II.4	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	21
Tabel II.5	Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	21
Tabel II.6	Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025	22
Tabel III.1	Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan III 2025 dan Triwulan IV 2025 (mtm)	26
Tabel III.2	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)	27
Tabel III.3	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)	28
Tabel III.4	Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2024-2025 (yoy)	28
Tabel III.5	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan IV 2025 (yoy)	29
Tabel III.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)	29
Tabel III.7	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)	30
Tabel III.8	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan IV 2025 (yoy)	30
Tabel III.9	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT Triwulan IV 2025 (yoy)	31
Tabel III.10	Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan IV 2025	32
Tabel IV.1	Perkembangan DPK secara spasial	39
Tabel IV.2	Perkembangan Kredit Secara Spasial	39
Tabel IV.3	Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai	40
Tabel IV.4	Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara	43

Tabel V.1	Perkembangan NMR Provinsi Kaltara	53
Tabel V.2	Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara	54
Tabel VI.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara	60
Tabel VI.2	Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara	61
Tabel VI.3	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	62
Tabel VI.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	62
Tabel VI.5	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara	63
Tabel VI.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya	65
Tabel VI.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan	65
Tabel VI.8	<i>GINI Ratio</i> Penduduk di Kaltara Menurut Daerah	65
Tabel VI.9	Perbandingan <i>GINI Ratio</i> Se-Kalimantan	66
Tabel VIII.1	Perbandingan Ekonomi Negara Lain	70

Ringkasan Eksekutif

Februari 2026



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh kinerja Lapangan Usaha sektor Konstruksi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) yang mengalami pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi juga masih ditopang oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi dan aktivitas perdagangan pada masa HBKN Nataru. Kinerja Industri Pengolahan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kaltara didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 juga tumbuh positif lebih tinggi yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, net ekspor, dan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI.

Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Triwulan IV 2025, realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV 2024 dengan pendapatan sebesar 31,07% (yoy) dan belanja sebesar 37,12% (yoy). Penurunan belanja ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja operasional. Adapun dari sisi pendapatan, penurunan bersumber dari berkurangnya transfer Pemerintah Pusat akibat kebijakan efisiensi serta menurunnya PAD akibat penyesuaian tarif pajak daerah. Pola ini juga terjadi pada 5 (lima) kabupaten/kota di Kalimantan Utara yang juga secara agregat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi pajak dan retribusi melalui TP2DD perlu terus ditingkatkan untuk mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan pencapaian inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy). Peningkatan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika kebijakan suku bunga internasional. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, terutama akibat kenaikan harga ikan bandeng, beras, daging ayam ras, dan bawang merah yang dipengaruhi dinamika pasokan serta peningkatan permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh rendahnya inflasi pada kelompok Transportasi secara tahunan, didukung oleh peningkatan kompetisi antar maskapai serta kebijakan diskon tarif angkutan laut pada periode tertentu.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,89% (yoy) dan 25,87% (yoy). Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp22 Triliun atau 58,36% dari target investasi 2025 yang ditetapkan sebesar Rp37,7 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Transaksi SKNBI meningkat secara triwulanan meskipun secara tahunan masih mengalami kontraksi, sementara transaksi BI-RTGS tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan tetap kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar di Kalimantan Utara. Aliran uang kartal mencatatkan *net outflow* sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat pada periode akhir tahun, sementara distribusi Uang Layak Edar (ULE) terus dilakukan sebagai implementasi *Clean Money Policy* (CMP) yang disertai edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah. Dari sisi digitalisasi, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah, serta kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid dengan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara berada pada tahap Digital.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan. *Gini Ratio* Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan semakin membaik.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIH dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

Inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG.



Tabel Indikator

A. Pertumbuhan Ekonomi

%YOY	2024					2025				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB Total	4,82	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56
Berdasarkan Lapangan Usaha										
Pertanian	4,94	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60
Pertambangan	0,48	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09
Industri Pengolahan	2,43	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99
Listrik dan Gas	12,72	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07
Air	7,29	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39
Konstruksi	11,17	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17
Perdagangan	10,17	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94
Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56
Jasa Keuangan	9,06	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52
Adm. Pemerintahan	-0,29	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65
Jasa Kesehatan dan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32
Jasa lainnya	7,78	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89
Berdasarkan Pengeluaran										
Konsumsi Rumah Tangga	5,67	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74
Konsumsi LNPRT	19,79	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66
Konsumsi Pemerintah	8,34	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79
PMTB	10,80	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47
Perubahan Inventori	1,48	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84
Ekspor	-0,83	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98
Impor	-1,81	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84

Sumber: BPS, diolah

B. Inflasi

Inflasi SBH 2018	2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IHK Umum	4,61	5,17	6,64	4,74	4,17	2,91	2,16	2,44
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,12	6,52	5,52	3,25	3,16	1,39	2,66	3,70
Pakaian dan Alas Kaki	0,22	0,56	0,59	0,64	0,70	0,37	0,14	-0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	0,41	1,19	1,23	0,88	0,97	1,39	0,96
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,95	6,05	6,39	7,31	4,15	1,98	0,92	-0,17
Kesehatan	1,91	1,42	1,46	1,55	0,58	0,95	0,84	0,85
Transportasi	15,65	14,20	27,88	15,74	16,11	12,33	4,69	5,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,23	0,27	0,39	0,41	0,13	0,04	0,09	0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,60	0,29	0,44	0,44	0,32	0,29	0,29	0,24
Pendidikan	0,44	0,44	0,63	0,63	0,63	0,63	0,36	0,36
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	3,19	3,76	3,75	2,57	2,23	1,71	1,06	1,07
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,46	6,44	7,20	8,19	6,16	4,91	3,88	4,50

Sumber: BPS, diolah

Inflasi SBH 2022	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IHK Umum	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,28	4,78	2,87	1,56	3,01	1,36	3,50	2,32
Pakaian dan Alas Kaki	3,08	2,84	2,86	4,54	0,80	0,16	-0,10	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,00	0,09	-0,33	-0,44	-3,38	0,63	2,73	3,12
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,20	-0,24	-0,30	-0,20	0,05	-0,11	-0,50	-0,64
Kesehatan	0,49	0,59	0,63	0,77	1,55	1,41	8,31	8,40
Transportasi	0,92	1,90	0,79	0,05	-0,17	-0,60	-2,04	0,03
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,19	-0,23	-0,27	-0,15	-0,06	-0,20	-0,11	-0,22
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,74	0,81	-0,29	-0,07	0,14	-0,83	1,11	1,39
Pendidikan	0,24	0,24	0,30	0,30	0,72	0,74	0,88	0,92
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,92	2,07	3,02	2,81	2,86	3,56	2,08	1,92
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,82	4,24	5,66	5,38	7,01	8,10	8,47	12,95

Sumber: BPS, diolah

*) Inflasi Kaltara dihitung menggunakan inflasi Kota Tarakan & Tanjung Selor hingga akhir 2023 (dengan SBH 2018), namun terhitung bulan Januari tahun 2024 telah ditambah Inflasi Kabupaten Nunukan (dengan SBH 2022).

C. Perbankan

%YOY	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
DPK dan Aset								
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	7,70	5,18	8,89	2,28	-3,10	-6,22	-4,49	-3,78
Giro	46,12	24,95	30,67	8,89	-5,07	-5,83	-6,17	-8,90
Tabungan	7,03	6,80	5,32	4,33	6,18	4,37	3,79	6,48
Deposito	-17,84	-11,16	-0,80	-10,19	-19,66	-25,79	-22,49	-23,35
Aset	14,63	8,89	9,00	7,47	-2,14	-3,71	-1,31	16,76
Kredit								
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	22,66	23,57	9,51	20,14	27,51	41,53	55,67	68,24
Non Performing Loans (Lokasi Proyek)	0,98	1,12	0,94	0,92	1,04	0,98	0,95	2,14
Berdasarkan Jenis Penggunaan								
Modal Kerja	39,47	37,64	15,70	17,52	17,79	17,79	32,81	25,87
Investasi	20,30	23,27	-0,18	28,98	55,07	104,58	131,75	162,05
Konsumsi	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89
Berdasarkan Sektor Ekonomi								
Pertanian dan Kehutanan	-9,69	-9,21	-12,10	-12,11	-9,43	-12,84	-9,26	-8,72
Perikanan	31,77	12,98	2,54	-7,60	-10,71	-12,76	-16,59	-16,60
Pertambangan	0,76	58,36	-6,59	-4,76	96,59	248,69	484,69	345,77
Industri Pengolahan	404,72	473,25	100,21	155,66	199,24	209,27	153,85	223,17
Listrik, Gas dan Air	1.469,73	1.767,47	-2,62	204,42	204,03	502,75	829,44	199,74
Konstruksi	32,73	3,69	-39,55	-48,81	-54,96	-54,62	-35,54	-18,47
Perdagangan Besar dan Eceran	13,33	10,04	-7,71	-10,28	-12,40	-8,83	6,96	1,79
Akomodasi dan Makan Minum	34,23	33,12	32,86	23,66	25,88	19,79	14,28	12,40
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	187,64	205,33	50,33	59,44	13,64	8,89	-4,44	22,07
Jasa Keuangan	-47,13	-63,98	-34,50	-0,10	55,96	114,57	139,08	69,49
Real Estate dan Jasa Perusahaan	31,52	26,91	9,46	-12,05	-17,98	-23,35	-1,56	7,24
Administrasi Pemerintahan	-48,86	-40,85	39,15	117,60	244,42	275,81	90,38	29,85
Jasa Pendidikan	66,67	62,26	86,24	46,07	14,71	1,89	-15,15	-15,84
Jasa Kesehatan dan Sosial	-40,58	-22,21	-5,49	124,54	71,26	69,77	60,93	8,39
Jasa Kemasyarakatan	23,07	13,57	7,94	2,18	11,02	30,12	22,41	19,62
Jasa Perorangan	1,28	4,17	-5,62	-19,61	-3,05	-2,73	3,95	10,00
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Tangga	9,84	10,96	13,23	14,01	13,09	11,60	9,95	7,89



PORT OF TARAKAN



Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) Konstruksi, Perdagangan, dan Industri Pengolahan. Pertumbuhan ini tercermin dari kinerja mayoritas LU yang mengalami pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi juga masih ditopang oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi dan aktivitas perdagangan pada masa HBKN Nataru. Kinerja Industri Pengolahan juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kaltara didukung oleh meningkatnya hasil produksi pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 juga tumbuh positif lebih tinggi yang didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, net ekspor, dan investasi seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI.

1.1 Gambaran Umum

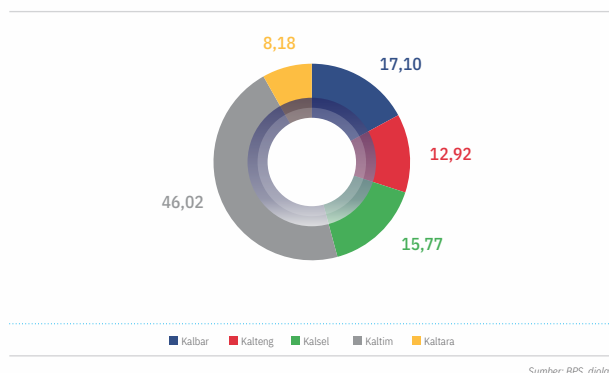
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan triwulan IV 2025 tercatat tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kalimantan tercatat sebesar 5,19% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,68%. Meningkatnya kinerja ekonomi Kalimantan didorong oleh peningkatan kinerja LU Perdagangan pada masa HBKN Nataru dan Konstruksi di Kalimantan.

Pangsa ekonomi Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan III 2025¹. Pangsa Kalimantan Utara tercatat sebesar 8,18%, meningkat terbatas dibandingkan dengan Triwulan III 2025 dengan pangsa 8,17%. Meskipun demikian, Pangsa ekonomi Kalimantan Utara menjadi yang paling kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan. Selanjutnya, Pangsa perekonomian terbesar wilayah Kalimantan masing-masing terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur (46,02%), diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat (17,10%), Provinsi Kalimantan Selatan (15,77%), dan Provinsi Kalimantan Tengah (12,92%). (Grafik I.1)

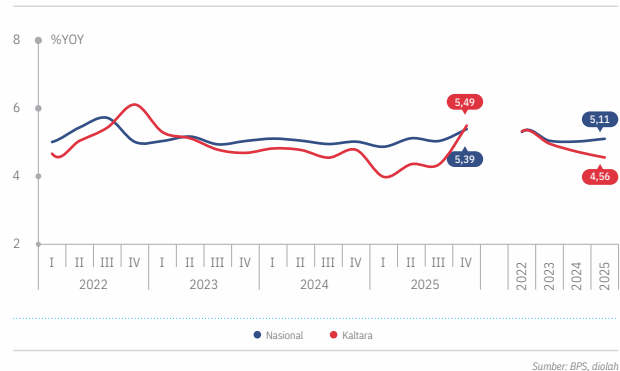
PDRB Kalimantan Utara triwulan IV 2025 tercatat tumbuh positif dan meningkat. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tercatat Rp41,01 Triliun (ADHB) atau Rp20,00 Triliun (ADHK). Secara tahunan, PDRB tersebut tumbuh 5,49% (yoy), positif lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy). Kinerja ekonomi Kaltara masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy) (Grafik I.2).

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 Kalimantan Utara didorong sebagian besar komponen Lapangan Usaha. LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar, dan LU Industri Pengolahan yang merupakan LU utama menunjukkan kinerja yang positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025. Positif dan tingginya kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas finalisasi

Grafik I.1. Pangsa Ekonomi Kalimantan Triwulan IV 2025



Grafik I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara dan Nasional



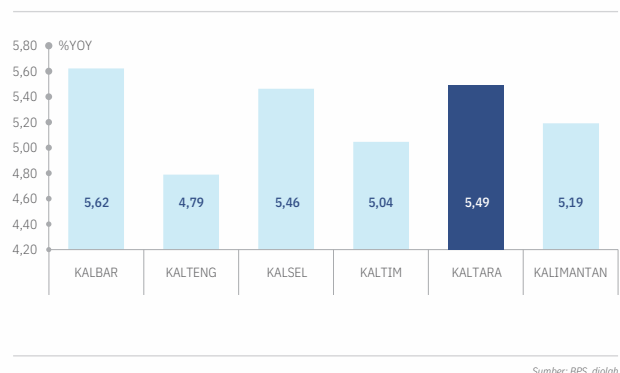
pembangunan salah satu *tenant* (smelter aluminium) di KIH. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar -1,17 % (yoy), seiring dengan penurunan produksi batu bara akibat penurunan ekspor ke negara mitra utama seperti Tiongkok.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2025 diakibatkan oleh kinerja net ekspor dan investasi yang tumbuh lebih tinggi di Kaltara. Kinerja net ekspor menjadi kontributor utama dalam perhitungan PDRB dengan andil sebesar 43,93% (yoy). Ekspor yang meningkat didorong oleh meningkatnya nilai dan volume ekspor hasil industri pengolahan yakni kayu dan barang dari kayu. Namun demikian, Kinerja Belanja Pemerintah menjadi penahan pertumbuhan ekonomi Kaltara akibat menurunnya realisasi belanja modal dan barang maupun belanja operasional yang bersumber dari APBN ataupun APBD.

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar, serta LU Industri Pengolahan menunjukkan kinerja yang positif lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan menopang pertumbuhan pada triwulan IV 2025. LU Konstruksi mengalami peningkatan seiring dengan percepatan dan finalisasi pembangunan PT KAI di KIH.

Grafik I.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Triwulan IV 2025



Tabel I.1. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

Berdasarkan Lapangan Usaha	2024					2025				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,94	1,73	2,80	-2,27	1,75	1,29	3,42	3,84	1,79	2,60
Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,10	-0,33	0,88	0,28	0,31	-0,78	-2,71	-1,17	-1,09
Industri Pengolahan	2,43	5,47	6,35	6,69	5,26	9,68	8,34	8,02	9,89	8,99
Pengadaan Listrik, Gas	12,72	-5,32	3,97	-8,23	0,01	6,80	3,29	0,55	6,01	4,07
Pengadaan Air	7,29	8,82	6,20	7,17	7,36	6,33	2,44	0,35	0,63	2,39
Konstruksi	11,17	11,97	8,20	16,22	11,95	3,69	11,86	13,83	14,38	11,17
Perdagangan Besar & Eceran	10,17	10,67	9,59	9,12	9,87	9,08	10,35	9,35	10,55	9,84
Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,44	7,12	2,54	5,51	7,34	4,50	6,57	5,46	5,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,16	10,53	12,94	12,44	11,30	9,34	9,17	10,04	11,27	9,99
Informasi dan Komunikasi	6,92	4,89	4,69	4,08	5,12	2,38	4,12	6,21	5,48	4,56
Jasa Keuangan	9,06	6,82	6,23	3,72	6,41	4,19	0,03	-0,44	11,58	3,85
Real Estate	3,68	3,98	4,41	5,64	4,44	3,38	5,45	5,04	10,64	6,17
Jasa Perusahaan	1,41	3,49	3,38	4,14	3,12	3,01	-0,78	0,26	7,45	2,52
Administrasi Pemerintahan	-0,29	5,02	4,69	7,25	4,37	8,75	-5,52	-2,61	0,57	-0,03
Jasa Pendidikan	3,59	3,42	7,42	7,31	5,46	1,36	-0,28	-1,38	6,71	1,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,55	2,97	3,43	4,15	3,03	2,24	5,96	3,70	5,36	4,32
Jasa lainnya	7,78	7,06	6,86	5,60	6,81	2,87	5,65	5,22	9,65	5,89
Produk Domestik Regional Bruto	4,82	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56

Sumber: BPS, diolah

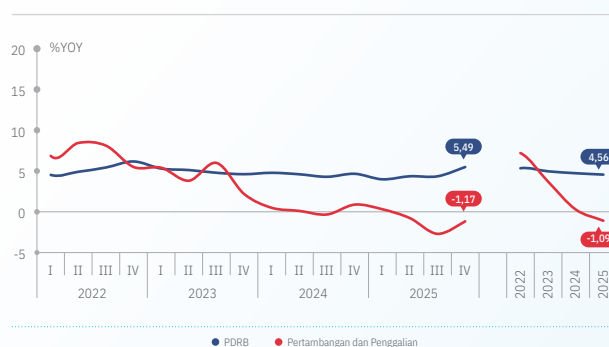
LU Perdagangan tumbuh positif didorong oleh aktivitas belanja masyarakat yang terjaga pada momentum HBKN Nataru disertai dengan peningkatan *output* produksi dari LU pertanian dan industri pengolahan. Sejalan dengan itu, aktivitas LU Industri Pengolahan juga ditopang oleh peningkatan produksi olahan kayu menjadi bubur kertas dan CPO yang ada di Kaltara.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan. Kinerja LU Pertambangan berkontraksi sebesar -1,17% (yoy), disebabkan hasil produksi batu bara yang menurun disertai dengan penurunan permintaan negara mitra seperti Tiongkok. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi realokasi anggaran dan keterlambatan pembukaan beberapa akun anggaran pemerintah juga memberikan dampak bagi proses pembangunan daerah sehingga terjadinya penundaan belanja barang dan modal dari Pemda akibat mundurnya proses pengadaan maupun perencanaan. Meski demikian, struktur perekonomian Kaltara masih didominasi oleh sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 23,44%, diikuti LU Pertanian (15,60%), dan LU Konstruksi (14,98%), dan LU Perdagangan Besar dan Eceran (13,29%). Secara akumulatif, keempat LU tersebut memiliki pangsa sebesar 67,31% terhadap perekonomian Kaltara.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

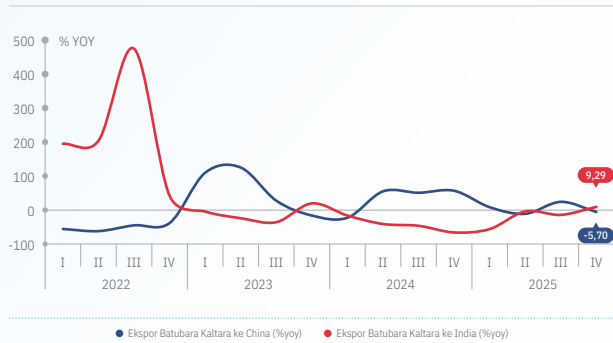
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan laporan berkontraksi sebesar -1,17% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat -2,71% (yoy) dengan andil tahunan sebesar -0,29% terhadap PDRB Kaltara. Meskipun berkontraksi, LU Pertambangan dan Penggalian masih menjadi penyumbang terbesar struktur ekonomi Kaltara dengan pangsa 23,44% (Grafik I.4).

Kondisi perlambatan ini tercermin dari aktivitas produksi yang menurun, didorong oleh penurunan permintaan dari negara mitra yang terdampak akibat melemahnya produktivitas industri

Grafik I.4. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Lapangan Usaha Pertambangan

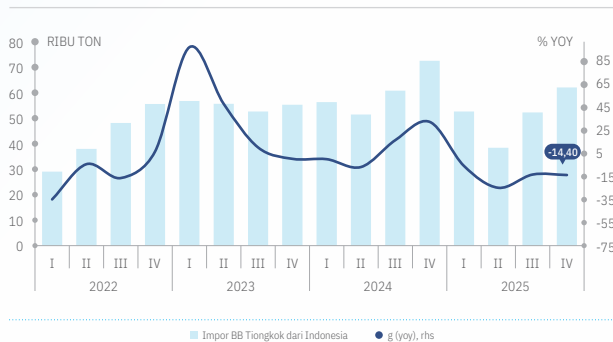
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.5. Volume Ekspor Batu Bara Tiongkok dan India



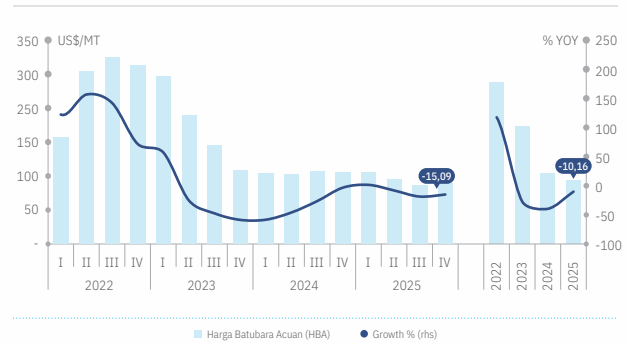
Sumber: Kubus, diolah

Grafik I.6. Volume Impor Batu Bara Tiongkok



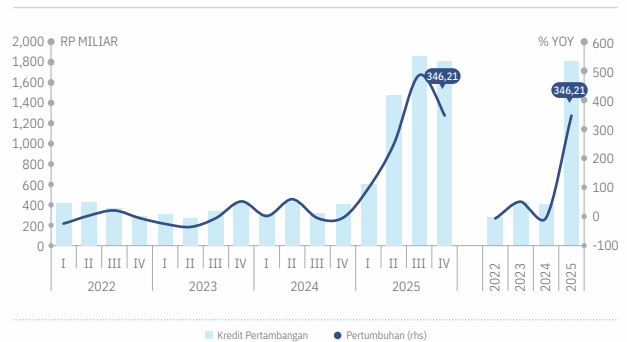
Sumber: McCloskey, diolah

Grafik I.7. Harga Batubara Acuan



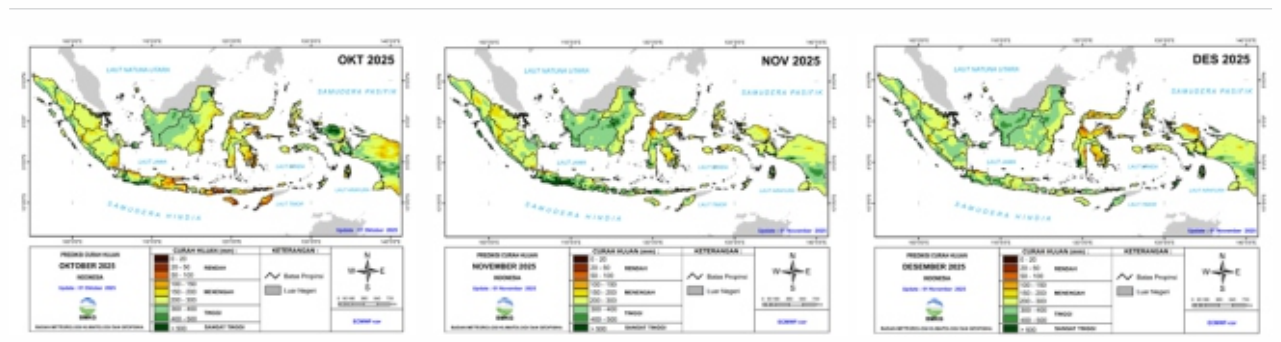
Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.8. Kredit Pertambangan Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar I.1. Prediksi Curah Hujan per Provinsi

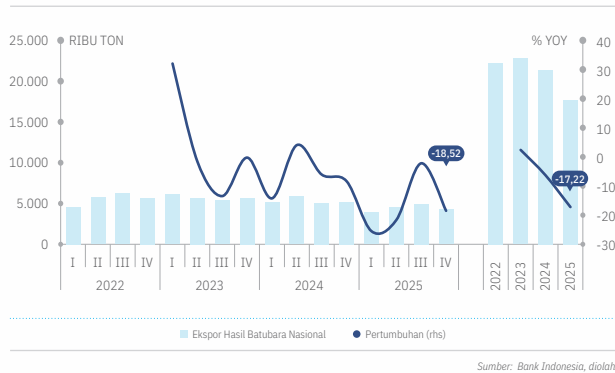


Sumber: BMKG

di negara tujuan ekspor. Selain itu, peningkatan intensitas curah hujan di Kaltara juga mempengaruhi penurunan hasil produksi lokal. Gambar I.1 menunjukkan bahwa Kaltara berada pada kondisi curah hujan menengah-tinggi pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, kondisi hujan yang terjadi secara tidak terduga di wilayah Kaltara selama triwulan IV 2025 menghambat proses penambangan dan pengangkutan batu bara. Selain itu, permintaan global khususnya dari negara mitra utama seperti Tiongkok pada triwulan IV 2025 mengalami penurunan sebesar -5,70% (yoy) (Grafik I. 5). Berdasarkan data dari McCloskey, total impor batu bara Tiongkok dari Indonesia pada triwulan IV 2025 menurun menjadi 62,07 juta ton dari sebelumnya 72,51 juta ton (Grafik I. 6).

Dari sisi Harga Batu bara Acuan (HBA), pada triwulan IV 2025 masih berada pada nilai yang rendah sebesar USD104,2/MT (Grafik I. 7) atau turun sebesar -15,09% (yoy). Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menghadapi tantangan transisi ke ekonomi hijau serta peningkatan hasil produksi batu bara secara mandiri dari negara mitra yang mengakibatkan permintaan batu bara Kaltara menurun. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara Nasional pada triwulan IV 2025 tercatat menurun sebesar -18,52% (yoy) (9). Meskipun demikian, permintaan domestik masih terjaga terutama digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, industri semen serta smelter nikel di Sulawesi.

Grafik I.9. Ekspor Batu Bara

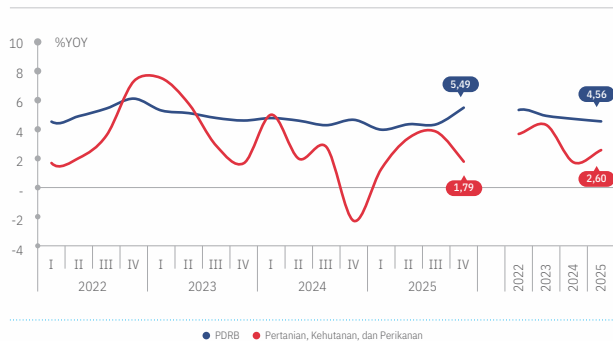


Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit ke LU Pertambangan mengalami pertumbuhan 346,21% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 485,35% (yoy). Kinerja LU Pertambangan yang melambat pada triwulan IV 2025 diperkirakan masih akan mengalami perlambatan pada awal tahun 2026. Hal ini terindikasi dari kredit korporasi pertambangan yang termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 8). Pembiayaan pada sektor pertambangan terjadi seiring dengan tren pengadaan barang/investasi baru dan *maintenance* operasional dalam bisnis pertambangan.

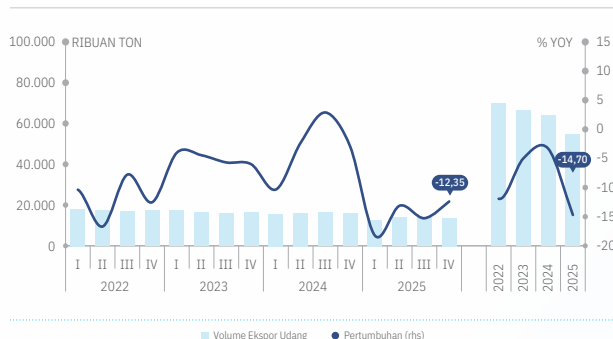
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,79% (yoy), termoderasi dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 3,84% (yoy) (Grafik I. 10). LU Pertanian,

Grafik I.10. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara - Pertanian



Grafik I.11. Volume Ekspor Udang

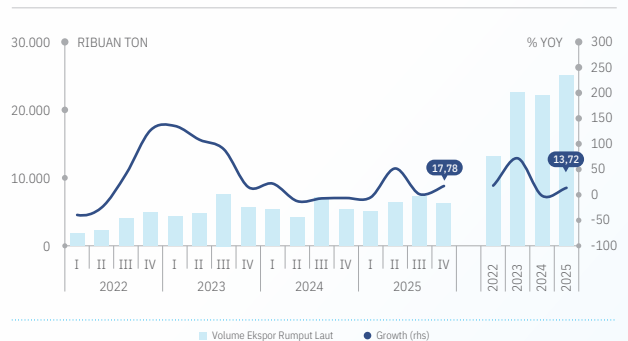


Kehutanan dan Perikanan memiliki pangsa mencapai 15,60% dari total PDRB Kaltara. Sektor Pertanian juga memberikan andil pertumbuhan tahunan terhadap perekonomian Kaltara triwulan IV 2025 sebesar 0,29.

Termoderasinya kinerja LU Pertanian diakibatkan oleh menurunnya produksi padi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan berakhirnya masa panen. Pada triwulan laporan, produksi padi tercatat mencapai 6,45 ribu ton atau tumbuh sebesar 19,16% (yoy) yang didorong oleh program Optimalisasi Lahan (OPLAH) pemerintah seluas 2.119 ha. Pada triwulan IV 2025, harga TBS termoderasi menjadi Rp3.164 per kg, atau naik sebesar 16,06% (yoy) (Grafik I. 14). Produk TBS secara umum digunakan memenuhi pasar domestik dan diolah menjadi CPO untuk diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk oleochemical maupun turunannya.

Sementara itu, Kinerja LU Pertanian tertahan oleh kontraksi di subsektor perikanan (ikan, udang dan rumput laut). Pada triwulan laporan, komoditas perikanan tercatat terkontraksi akibat menurunnya permintaan ekspor sejalan dengan pengenaan tarif impor dan tarif anti *dumping* dari Amerika Serikat. Volume ekspor udang terkontraksi sebesar -12,35% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -15,22% (yoy) (Grafik I. 11). Sejalan dengan itu, Volume ekspor ikan juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -1,82% (yoy) (Grafik I. 13) yang diakibatkan oleh menurunnya produksi perikanan utamanya ikan budidaya (antara lain ikan bandeng dan ikan

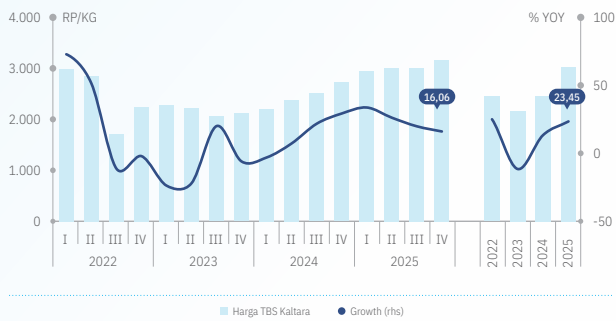
Grafik I.12. Volume Ekspor Rumput Laut



Grafik I.13. Volume Ekspor Ikan



Grafik I.14. Harga TBS



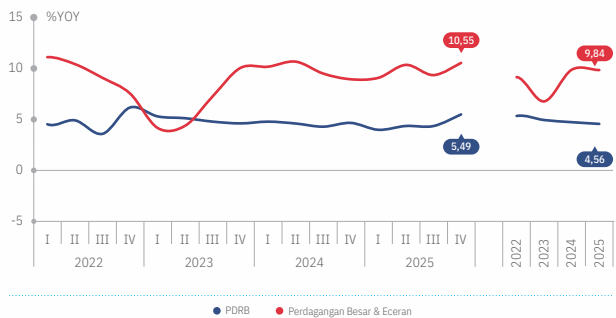
Sumber: Dinas Perkebunan, diolah

mujair). Namun demikian, komoditas perikanan lain (rumpun laut) mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2025, ekspor rumput laut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 17,78% (yoy), disebabkan oleh harga rumput laut yang mulai membaik selaras dengan produksi yang meningkat. (Grafik I.12).

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran

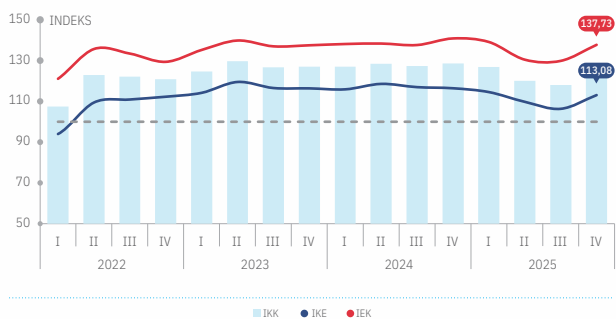
LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) tumbuh positif mencapai 10,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,23% (yoy) (Grafik I.15). LU PBE memberikan kontribusi sebesar 13,29% terhadap struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan mencapai 1,47%.

Grafik I.15. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Perdagangan



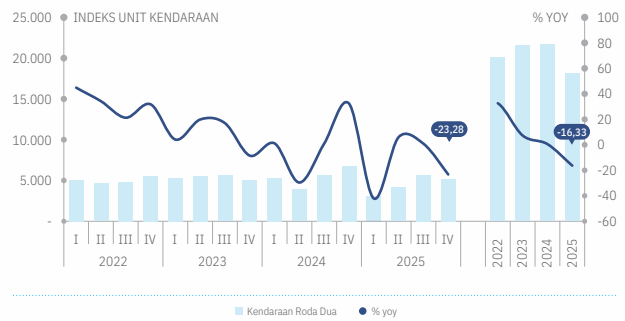
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.16. IKK, IKE, dan IEK Kaltara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

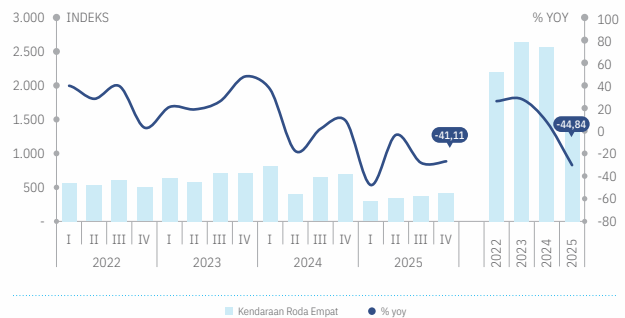
Grafik I.17. Volume Penjualan Kendaraan Roda Dua



Sumber: BPPRD, diolah

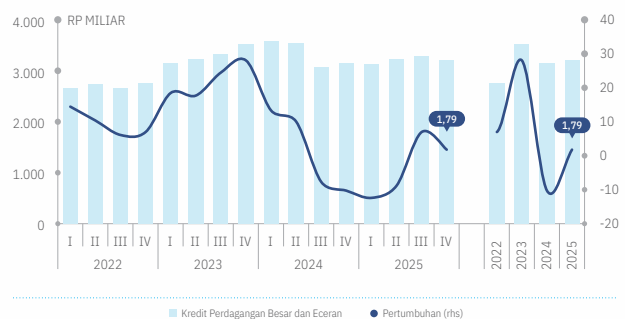
LU Perdagangan tetap tumbuh positif pada triwulan laporan didorong meningkatnya hasil output produksi pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan yang mendorong meningkatnya aktivitas belanja masyarakat di tengah periode HBKN Nataru. Meningkatnya kinerja LU Perdagangan salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) yang optimis pada level 125,40 (Grafik I. 16). Namun demikian, tertahannya pertumbuhan LU PBE yang lebih tinggi diakibatkan oleh melambatnya volume penjualan kendaraan roda dua yang menurun sebesar -23,28% (yoy) diikuti penjualan kendaraan roda empat yang masih berkontraksi sebesar -42,11% (yoy) (Grafik I.17 dan Grafik I.18).

Grafik I.18. Volume Penjualan Kendaraan Roda Empat



Sumber: BPPRD

Grafik I.19. Kredit Perdagangan Kaltara



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

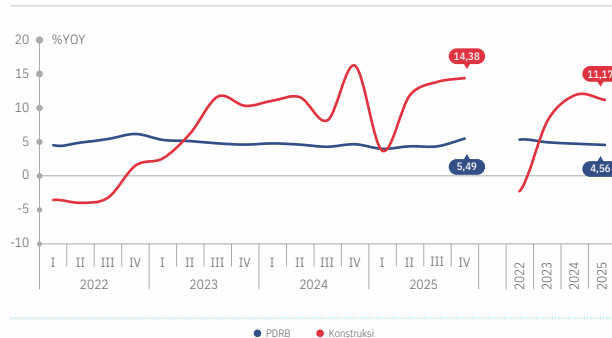
Meskipun demikian, penyaluran kredit ke LU Perdagangan tumbuh sebesar 1,79% (yoy) atau sebesar Rp3,23 Triliun, dibandingkan triwulan III 2025 sebesar Rp3,27 Triliun (Grafik I. 19). Termoderasinya kinerja kredit perdagangan diakibatkan oleh beberapa pengusaha besar yang masih wait and see dalam perencanaan investasi maupun peningkatan produktivitas bisnis di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi tumbuh sebesar 14,38% (yoy) (Grafik I. 20). Kinerja LU Konstruksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,83% (yoy). LU Konstruksi menguasai 14,98% pangsa perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 0,96%.

Peningkatan kinerja LU Konstruksi didorong oleh aktivitas pembangunan di KIHI Tanahkuning yang memasuki tahap finalisasi. Pembangunan infrastruktur kawasan industri seperti *jetty* kapal untuk bongkar muat pembangunan, *Water Treatment Plant* (WTP), *Dormitory* untuk pekerja serta *smelter* aluminium telah selesai di akhir tahun 2025 sehingga ditargetkan operasional *smelter* aluminium tahap I akan dimulai pada awal tahun 2026. Pertumbuhan sektor konstruksi yang positif juga diperkirakan akan memberikan efek *multiplier* terhadap beberapa sektor seperti perdagangan dan *real estate*. Terdapat beberapa proyek infrastruktur bernilai besar di Kaltara yang masih berlanjut serta menopang sustainabilitas pertumbuhan

Grafik I.20. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konstruksi



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.21. Penjualan Semen Kaltara



Sumber: Asosiasi Semen, diolah

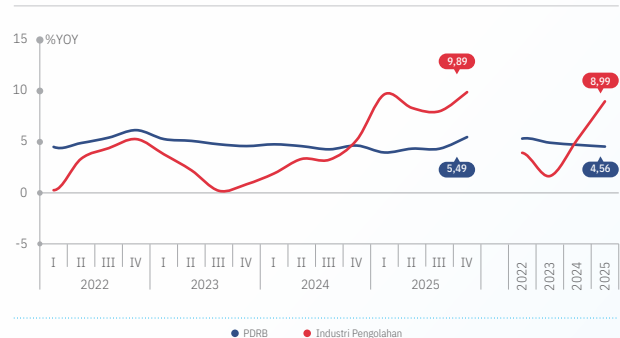
ekonomi dalam jangka panjang. Proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan Sei Mentarang dengan potensi kapasitas energi mencapai 1.375 MW akan menjadi pemasok listrik di daerah KIHI serta menjadi salah satu pemasok kebutuhan listrik di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Namun demikian, penjualan semen masih berkontraksi sebesar -27,94% (yoy) (Grafik I. 21). Hal ini didorong oleh kondisi tahapan finalisasi pembangunan di KIHI telah menggunakan bahan-bahan impor yang utamanya terbuat dari besi, baja, maupun bahan konstruksi lainnya.

Perkembangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan tumbuh positif sebesar 9,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 8,02% (yoy) (Grafik I. 22). LU Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 8,86% dalam struktur perekonomian Kaltara dengan andil pertumbuhan tahunan sebesar 1,00%.

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama didorong oleh peningkatan produksi hasil olahan kayu dan meningkatnya permintaan CPO. Produksi bubur kertas terus mengalami peningkatan sejalan dengan penyelesaian target produksi pabrik kertas di Tarakan. Sejalan dengan itu, Produksi CPO Kaltara pada triwulan IV 2025 mencapai 163.198 ton atau 38,93%(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 133.462 ton. Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan meningkatnya

Grafik I.22. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Industri Pengolahan



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.23. Volume Ekspor Plywood



Sumber: Worldbank, diolah

Grafik I.24. Kredit Industri Kaltara



permintaan produk CPO secara nasional. Aktivitas operasional pabrik ini tidak hanya mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah tinggi, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di Kaltara. Namun demikian, kinerja ekspor *plywood* sedikit termoderasi namun masih tumbuh positif sebesar 14,80% (yoy) pada triwulan IV 2025 sejalan dengan meningkatnya permintaan ekspor.

Akselerasi pertumbuhan LU Industri pengolahan terkonfirmasi dari kredit dan hasil liaison Bank Indonesia. Penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan mencapai Rp 14,74 Triliun atau tumbuh sebesar 223,17% (yoy) (Grafik I. 24). Tumbuh positifnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan didorong oleh kegiatan operasional industri pengolahan yang meningkatkan produksi dan adanya perencanaan pembangunan Tahap II pabrik bubur kertas di Tarakan. Sejalan dengan itu, sejumlah kontak liaison menyatakan bahwa permintaan sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap positif seiring dengan optimisme permintaan masyarakat yang meningkat.

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Utara triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor dan Investasi. Kinerja *Net* Ekspor menjadi kontributor utama

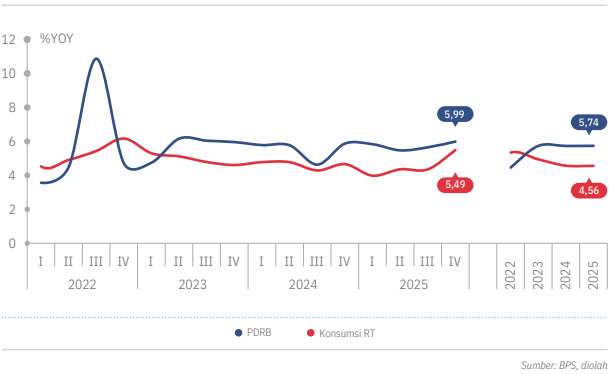
dalam perhitungan PDRB dengan andil sebesar 3,13%. Kinerja Net Ekspor tumbuh positif sejalan dengan peningkatan hasil pabrik pengolahan kertas di Tarakan. Selain itu, kinerja investasi yang positif juga didorong oleh meningkatnya realisasi investasi utamanya pada bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan Kawasan KIH di Tanah Kuning. Namun demikian, penahan tingginya kinerja PDRB Kaltara disebabkan oleh kinerja Belanja Pemerintah yang mengalami kontraksi pada triwulan laporan (Tabel I.2).

Berdasarkan pangsanya, Net ekspor dan PMTB masih mendominasi perekonomian Kaltara, dengan total sebesar 74,59%. Net ekspor menjadi penyumbang tertinggi pangsa PDRB triwulan IV 2025 mencapai 43,93%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 45,36%. Sementara itu, pangsa PMTB terhadap perekonomian Kaltara terpantau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi 30,66% dari 30,40%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRM masing-masing memiliki pangsa sebesar 15,89%, 8,42%, dan 0,79%.

Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi. Konsumsi RT Kalimantan Utara tumbuh sebesar 5,99% (yoy), meningkat dari triwulan III 2025 sebesar 5,65% (Grafik I. 25). Adapun andil konsumsi rumah tangga

Grafik I.25. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Rumah Tangga

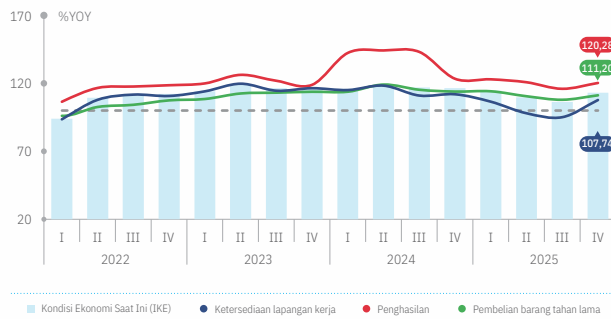


Tabel I.2. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

Berdasarkan Pengeluaran	2024					2025				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%	YOY%
Konsumsi RT	5,78	5,77	5,61	5,87	5,73	5,83	5,47	5,65	5,99	5,74
Konsumsi LNPRM	20,24	12,87	7,78	6,94	11,60	2,88	6,43	4,73	4,64	4,66
Konsumsi Pemerintah	4,63	4,65	9,03	12,65	8,89	9,06	-10,07	-2,59	-6,53	-3,79
PMTB	10,86	7,41	4,31	5,18	6,84	0,39	4,92	5,95	6,49	4,47
Perubahan Inventori	1,48	2,62	-2,36	-8,87	-1,82	0,46	-0,24	-4,63	8,58	0,84
Ekspor LN	-0,72	2,46	3,09	3,34	2,01	2,53	2,74	2,88	3,74	2,98
Impor LN	-1,83	2,34	2,63	3,91	1,78	0,31	0,08	1,92	1,03	0,84
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	4,78	4,55	4,78	4,73	3,98	4,36	4,35	5,49	4,56

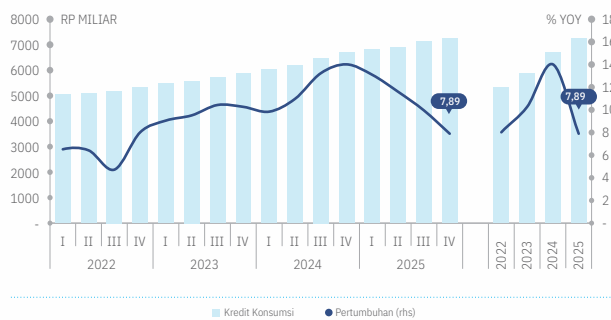
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.26. Indeks Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.27. Kredit Konsumsi



Sumber: BPS, diolah

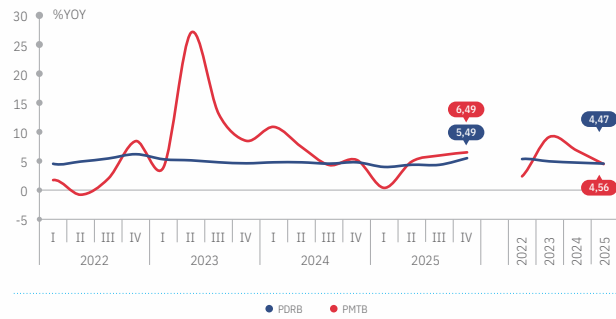
terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara sebesar 0,98%. Pertumbuhan Konsumsi RT yang positif didorong oleh terjaganya konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Nataru. Kinerja konsumsi RT ini juga sejalan dengan perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan IV 2025 yang mencapai pada level 113,08 (Grafik I. 26) atau masih berada di level optimis dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, Kinerja konsumsi RT yang tumbuh lebih tinggi sejalan dengan pertumbuhan kredit konsumsi yang masih positif sebesar 7,89% (yoy) (Grafik I. 27) Masih tumbuhnya Kredit Konsumsi sejalan dengan masih optimisnya indikator keyakinan konsumen khususnya terhadap ekspektasi penghasilan masyarakat kedepan.

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Kinerja PMTB pada triwulan IV 2025 meningkat sejalan dengan finalisasi pembangunan proyek strategis di Kaltara. Kinerja investasi tumbuh sebesar 6,49% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,95% (yoy) (Grafik I. 28). Kinerja PMTB tersebut memberikan andil sebesar 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025.

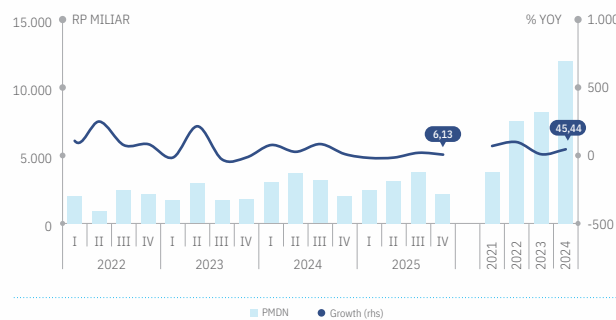
secara nominal pada Penanaman Modal Asing (PMA) sedangkan menurun pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan triwulan III 2025. Berdasarkan data

Grafik I.28. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – PMTB



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.29. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: BKPM, diolah

BKPM, nilai realisasi PMDN sebesar Rp3,15 Triliun, tumbuh sebesar 6,13% (yoy) meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 29). Berbanding terbalik dengan PMDN, nilai realisasi PMA sebesar USD298,44 juta, atau tumbuh lebih tinggi sebesar 24,82% (yoy) (Grafik I. 30). Namun demikian, Pertumbuhan impor barang modal pada triwulan IV 2025 masih berkontraksi sebesar -38,69% (yoy). Realisasi investasi tersebut masih senilai 74,13% dari total target investasi Kaltara sebesar Rp37 triliun, yang lebih tinggi dari target pada 2024 sebesar Rp35,33 triliun.

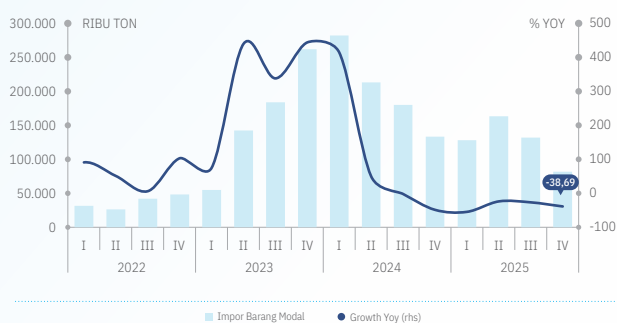
Kredit Investasi menjadi salah satu indikator kinerja adanya investasi yang baru sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit

Grafik I.30. Penanaman Modal Asing (PMA)

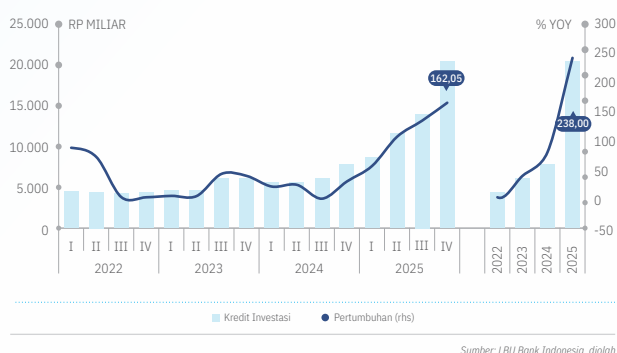


Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.31. Impor Barang Modal



Grafik I.32. Kredit Investasi Kaltara

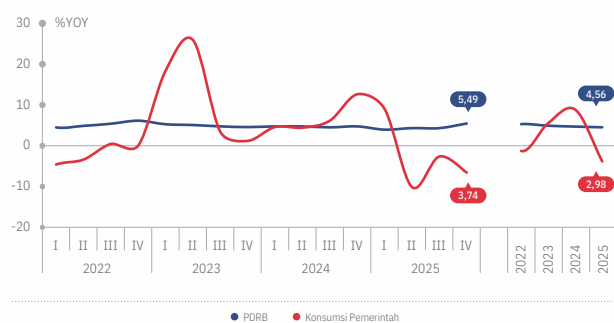


investasi triwulan IV 2025 tumbuh positif lebih tinggi. Realisasi kredit investasi triwulan laporan tercatat sebesar Rp20,13 Triliun atau tumbuh sebesar 162,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik I. 3232). Kondisi tersebut sejalan dengan informasi sejumlah kontak *liaison* KPwBI Kaltara yang optimis terhadap berlanjutnya pertumbuhan ekonomi ke depan dan adanya ekspansi pembangunan tahap selanjutnya pada proyek strategis di Kaltara.

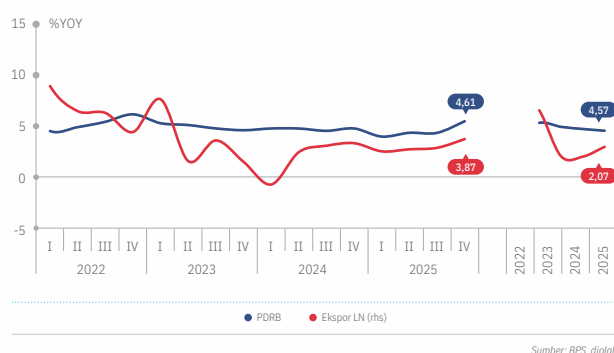
Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah triwulan IV 2025 berkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah di Kalimantan Utara berkontraksi sebesar -6,53 (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar -2,59% (Grafik I. 33). Realisasi konsumsi pemerintah tersebut memberikan andil sebesar -0,62% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV 2025. Kontraksinya pertumbuhan konsumsi pemerintah

Grafik I.33. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Konsumsi Pemerintah



Grafik I.34. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Ekspor Luar Negeri



Kalimantan Utara didorong oleh masih tertahannya belanja beberapa pemerintah daerah akibat kebijakan realokasi anggaran maupun terlambatnya pembukaan mata anggaran yang sebelumnya terblokir sehingga realisasinya juga masih tertahan.

Perkembangan Ekspor

Kinerja ekspor triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekspor Kalimantan Utara pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,61% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 3,49% (yoy) (Grafik I. 34). Realisasi ekspor tersebut memberikan andil sebesar 3,60% terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025. Meningkatnya kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh tetap tingginya ekspor komoditas kayu olahan utamanya *plywood* dan bubur kertas.

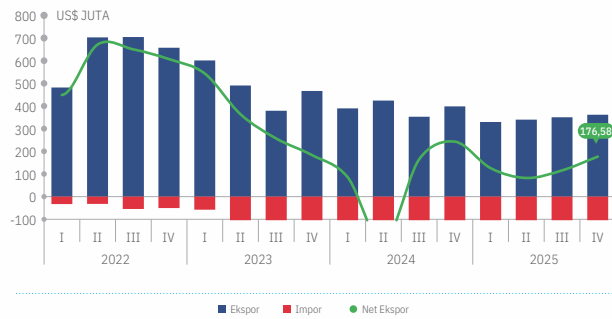
Secara nilai, kinerja ekspor juga tercatat meningkat. Total ekspor tercatat sebesar USD361,45 juta, meningkat dari triwulan

Tabel I.3. Nilai Perdagangan Internasional Kaltara

Wilayah	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kaltara (US\$ Juta)								
Ekspor	389,19	424,05	352,61	398,23	329,20	339,38	350,28	361,45
Impor	303,68	626,57	188,31	155,63	203,47	257,11	234,65	184,87
Net Ekspor	85,51	-202,52	164,30	242,59	125,72	82,27	115,63	176,58

Sumber: BPS, diolah

Grafik I.35. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kaltara

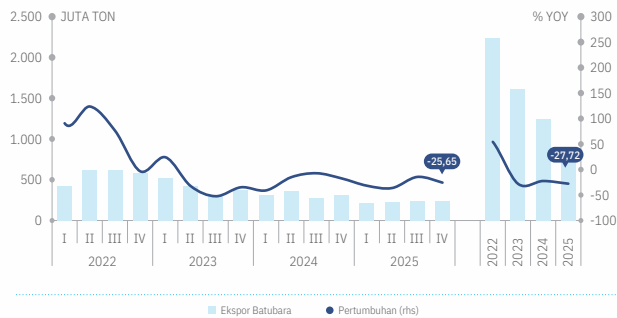


Sumber: BPS, diolah

sebelumnya sebesar USD350,28 juta (Tabel I.3). Namun demikian, nominal impor tercatat mengalami perlambatan dari sebelumnya USD184,87 juta menjadi USD234,65 juta.

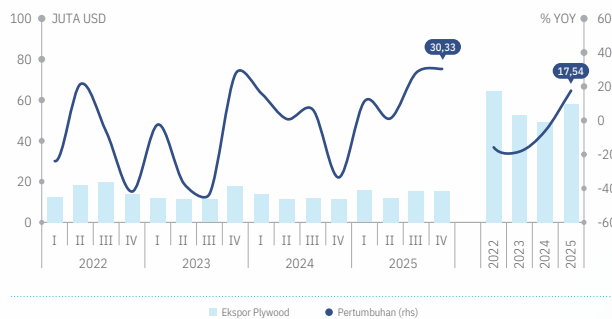
Kinerja ekspor Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja ini terutama ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan ekspor bubur kayu dari pabrik pengolahan di Tarakan ke Tiongkok yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, penahan tingginya kinerja ekspor terjadi akibat penurunan ekspor batu bara nasional yang tercatat sebesar -25,65% (yoy), yang mencerminkan turunnya volume produksi secara nasional (Grafik I. 36).

Grafik I.36. Ekspor Batu bara



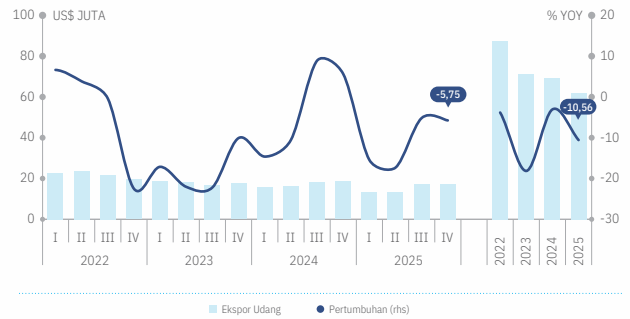
Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.37. Ekspor Plywood



Sumber: Kubus Eksim, diolah

Grafik I.38. Ekspor Udang

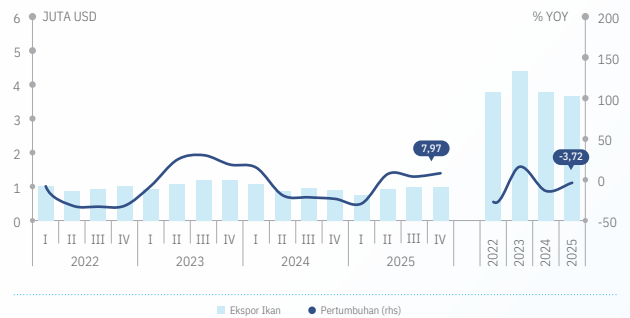


Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Selain itu, penahan lebih tingginya kinerja ekspor triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh terkontraksinya kinerja ekspor komoditas udang. Ekspor udang terkontraksi sebesar -5,75% (yoy) dari triwulan sebelumnya -5,17% (yoy) (Grafik I. 38). Berbanding terbalik, ekspor ikan tumbuh sebesar 7,97% (yoy) sejalan dengan meningkatnya permintaan ikan bandeng (Grafik I. 39). Menurunnya ekspor udang diakibatkan oleh kebijakan tarif dari AS dan tarif antidumping.

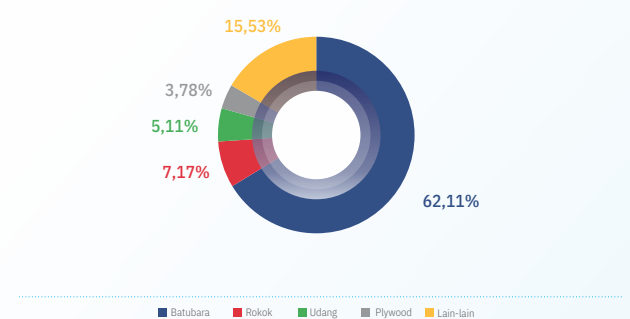
Ekspor Provinsi Kalimantan Utara didominasi komoditas mineral nonmigas dengan tujuan negara ekspor utama adalah Tiongkok, India, dan Jepang. Berdasarkan kelompoknya, ekspor Kaltara pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh komoditas mineral

Grafik I.39. Ekspor Ikan



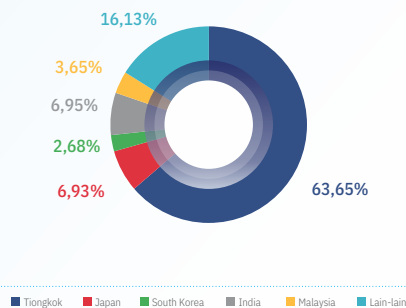
Sumber: Ditjen Bea Cukai, diolah

Grafik I.40. Komoditas Utama Ekspor Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.41. Negara Utama Tujuan Ekspor Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

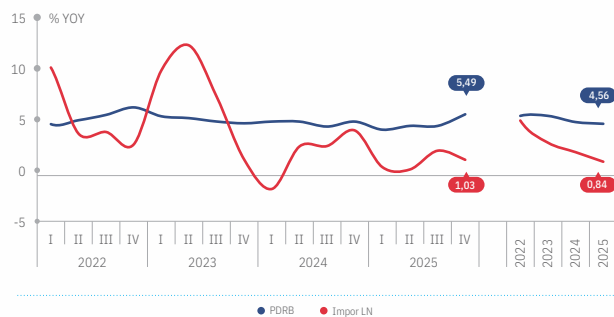
nonmigas, terutama batu bara yang memiliki pangsa sebesar 62,11% dari total nominal ekspor. Sementara itu, ekspor rokok, udang, dan , kayu lapis (*plywood*) memiliki pangsa masing-masing sebesar 7,11%, 5,11%, dan 3,75% (Grafik I. 40). Berdasarkan negara tujuan ekspor, Tiongkok, India, dan Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor utama Kaltara, masing-masing dengan pangsa 63,65%, 6,95%, dan 6,93% (Grafik I. 41).

Perkembangan Impor

Impor Kaltara triwulan IV 2025 tercatat melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja impor tumbuh sebesar 1,03% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,92% (yoy).

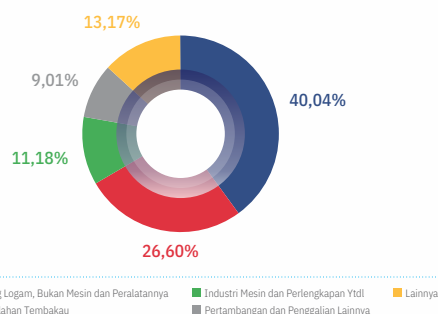
Berdasarkan komoditas, impor Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 didominasi oleh industri pengolahan tembakau sebesar 40,04%, diikuti oleh industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 26,60%, dan industri mesin dan perlengkapan yang termasuk dalam lainnya sebesar 11,18% (Grafik 1. 43). Peningkatan impor diperkirakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konstruksi sejalan dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara. Terjaganya kinerja impor yang masih tumbuh positif sejalan dengan finalisasi pembangunan salah satu *tenant* di KIH I serta sejumlah proyek lainnya. Hal ini mendorong terjaganya nilai dan volume impor komoditas benda-benda dari besi dan baja, mesin/peralatan listrik, dan lainnya. Berdasarkan negara asalnya, mayoritas impor berasal dari Tiongkok dengan pangsa 79,53% diikuti dengan Hongkong sebesar 8,25%, dan Vietnam sebesar 5,88%.

Grafik I.42. Pertumbuhan Ekonomi Kaltara – Impor Luar Negeri



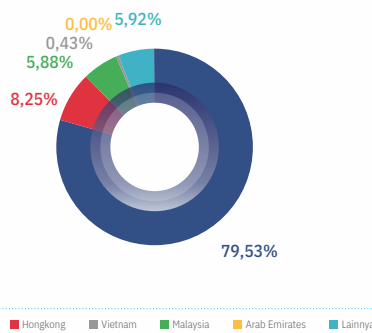
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.43. Komoditas Utama Impor Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.44. Negara Utama Asal Impor Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

BOKS 1

Benuanta Investment and Economic Summit (BIES) 2025
**“Kalimantan Utara sebagai Episentrum Pertumbuhan Baru:
Menakar Peran Hilirisasi, Industrialisasi, dan Konektivitas Global
terhadap Perekonomian Daerah”**

Benuanta Investment and Economic Summit (BIES) merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang pertama kali dilaksanakan pada 2025. Tema yang diangkat pada pelaksanaan BIES 2025 adalah “Kalimantan Utara sebagai Episentrum Pertumbuhan Baru: Menakar Peran Hilirisasi, Industrialisasi, dan Konektivitas Global terhadap Perekonomian Daerah”. Kegiatan ini melibatkan mitra strategis dalam peningkatan kapasitas proposal *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), perluasan strategi investasi ke negara lain, serta peningkatan kualitas pemasaran proyek yang *clean and clear* serta uji kelayakan suatu proyek di Kaltara, antara lain Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bpk. Ingkong Ala, S.E., M.Si., Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Daerah Kab/Kota se-Kaltara, Narasumber Nasional, dan mitra strategis lainnya.

BIES 2025 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara Bpk. Ingkong Ala, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kaltara menyampaikan bahwa hilirisasi dan peningkatan konektivitas adalah landasan penting untuk membawa perekonomian Kaltara menuju pusat pertumbuhan baru. Pemerintah Provinsi juga menyampaikan apresiasi atas langkah Bank Indonesia dalam memperkuat kapasitas OPD, DPMPSTP, serta *project owner* dalam menyiapkan dokumen IPRO yang berkualitas dan kompetitif.

BIES 2025 memiliki fokus utama penyelenggaraan yaitu memperkuat kesiapan proyek investasi daerah melalui pelatihan seminar/diskusi konstruktif dengan para *stakeholder*. Adapun hal ini sebagai salah satu bentuk strategi percepatan transformasi ekonomi di Kaltara dan mendorong masuknya investor LN/DN ke Kaltara yang

dituangkan pada pelatihan penulisan proposal IPRO. Adapun pelaksanaan BIES 2025 dikelompokkan dalam 3 rangkaian utama agenda, yakni *Investment Clinic*, *Investment Forum*, dan *Economic Outlook*.

Sesi *investment clinic* dilakukan secara *one-on-one* dengan pendampingan teknis kepada OPD dan *project owner* terkait penyusunan IPRO, analisis indikator biaya dan *return* investasi, asesmen uji kelayakan proyek, hingga strategi *pitching*. Dari kegiatan ini, sebanyak 5 proyek berhasil mencapai tahap IPRO *Draft* dan siap ditindaklanjuti sebagai proyek penawaran resmi bagi investor. Beberapa proyek strategis juga memperoleh *technical notes* percepatan dari *Expertise IPRO Reviewer* (Ibu Dr. Raden Roro Karlina A.K., S.E, M.Sc. Ak. , dan Charly Raya, S.H. LL.M.) untuk penguatan kualitas IPRO yang terukur dan berdaya jual.

Pada sesi *investment forum*, para narasumber yaitu Bapak Moris Nuaimi BKPM, Himpunan Kawasan Industri (HKI), dan pelaku industri berbagi wawasan terkait peluang hilirisasi, kesiapan infrastruktur kawasan industri, strategi menarik *anchor investors*, serta arah kebijakan investasi jangka pendek dan menengah. Forum ini mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta karena memberikan gambaran kebutuhan, tantangan, dan peluang percepatan pembangunan ekonomi berbasis energi hijau di Kalimantan Utara.

Sesi *economic forum* menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Bapak Hasiando G. Manik (Kepala Perwakilan BI Prov. Kaltara) yang memaparkan arah perekonomian dan peluang investasi daerah, Bapak Rubino Sugana (Principal Adviser Revenue Policy & Administration – PROSPERA) yang membahas reformasi perpajakan dan implikasinya terhadap daya saing investasi, serta Bapak Yon Aarsal (Staf Ahli Menteri



Gambar Boks V.2.1 Pelaksanaan BIES 2025

Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak) yang menyampaikan kebijakan fiskal nasional dan strategi peningkatan kepatuhan pajak untuk memperkuat ruang fiskal.

Sepanjang penyelenggaraan, BIES 2025 melibatkan lebih dari 380 peserta yang terdiri dari pemerintah daerah, akademisi, investor, lembaga keuangan, asosiasi industri, *project owner*, dan pelaku usaha. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum promosi investasi, tetapi juga ruang integrasi

antara kebijakan pusat dan daerah dalam mempercepat perencanaan proyek prioritas serta memperluas pemahaman publik mengenai arah transformasi ekonomi Kalimantan Utara. Ke depan, melalui BIES 2025 diharapkan proyek investasi Prov. Kaltara yang *clean & clear* semakin meningkat sehingga mendorong masuknya investasi ke Kaltara dan berdampak pada kemajuan ekonomi Prov. Kaltara.







Keuangan Pemerintah Daerah



Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 menunjukkan moderasi dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada komponen belanja modal dan operasional seiring penyesuaian siklus pelaksanaan anggaran. Dari sisi pendapatan, realisasi juga mengalami penurunan yang mencerminkan dinamika penerimaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kapasitas fiskal daerah pada periode berjalan.

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV-2025 kembali mengalami kontraksi seiring dengan kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah. Pagu anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kaltara tahun 2025 tercatat menurun sebesar -5,15% (yoy) menjadi Rp2,95 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,1 triliun (Tabel II.1). Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, pagu anggaran belanja juga mengalami penurunan sebesar -8,87% (yoy) menjadi Rp3,2 triliun, turun dari Rp3,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan belanja terutama bersumber dari berkurangnya alokasi pada komponen belanja modal dan belanja operasional.

Dari sisi realisasi, pendapatan APBD hingga triwulan IV-2025 tercatat sebesar Rp2,36 triliun, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,43 triliun. Secara tahunan, realisasi pendapatan mengalami kontraksi sebesar 31,07% (yoy). Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan asli daerah dan didukung dengan berkurangnya penerimaan transfer pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, realisasi belanja pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar Rp2,21 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,52 triliun. Secara tahunan, realisasi belanja juga mengalami kontraksi sebesar 37,12% (yoy) (Tabel II.1). Penurunan realisasi belanja ini terutama dipengaruhi berkurangnya penyerapan pada pos belanja operasional dan belanja modal.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih belum bisa melakukan penyerapan anggaran dengan baik pada triwulan IV-2025, yang disebabkan oleh *self blocking* dari kebijakan efisiensi pemerintah yang sejalan dengan menurunnya pagu anggaran.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp2,36 triliun atau 80,14% dari total pagu anggaran pendapatan tahun 2025. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,43 triliun, sehingga secara tahunan mengalami penurunan sebesar 31,07% (yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah yang terpaat cukup jauh dari tahun sebelumnya.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi hingga triwulan IV 2025 mencapai Rp687,25 miliar atau 66,96% dari pagu, lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1 triliun atau 94,45%. Secara tahunan, PAD kontraksi cukup signifikan sebesar 31,78% (yoy). Kontraksi PAD disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak daerah dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sangat tinggi sebesar 99% (yoy). Penurunan Pajak daerah dari Rp752,55 miliar menjadi Rp509,34 miliar atau kontraksi 32,32% (yoy) yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian tarif pajak daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,64 triliun atau 85,55% dari pagu, lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,42 triliun atau 118,5% dari pagu. Secara tahunan, Pendapatan Transfer mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 32,03% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan realisasi transfer pemerintah pusat, yang berdampak pada melambatnya penyaluran dana ke daerah.

Dalam rangka mendorong akselerasi penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara terus memperkuat digitalisasi pembayaran melalui Tim

Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		%		g.2025 (yoy)
	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	
Pendapatan	3.106.997	2.947.123	3.426.412	2.361.864	110,28	80,14	-31,07%
PAD	1.066.531	1.026.395	1.007.363	687.249	94,45	66,96	-31,78%
Pendapatan Transfer	2.040.116	1.920.379	2.417.276	1.642.936	118,49	85,55	-32,03%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	350	350	1.773	31.678	506,57	9050,92	1686,70%
Belanja	3.502.592	3.191.861	3.518.588	2.212.588	100,46	69,32	-37,12%
Belanja Operasional	2.254.725	2.118.979	2.283.808	1.676.782	101,29	79,13	-26,58%
Belanja Modal	578.240	388.574	702.953	148.120	121,57	38,12	-78,93%
Belanja Tidak Terduga	15.000	25.000	7.500	21.790	50,00	87,16	190,55%
Transfer	654.627	659.309	524.328	365.896	80,10	55,50	-30,22%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

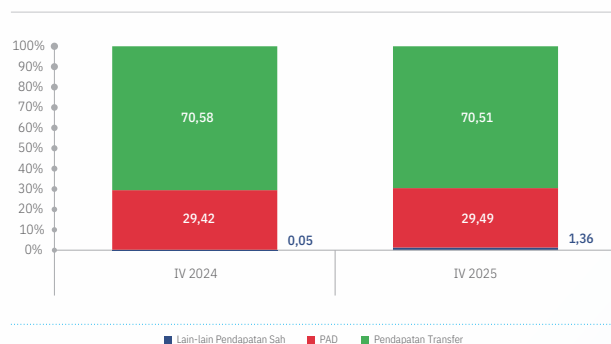
Tabel II.2. Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realisasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2025 (yoy)
	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	
Pendapatan (I+II+III)	3.106.998	2.947.122	3.426.411	2.361.862	110,28	80,14	-31,07%
I. PAD	1.066.531	1.026.394	1.007.363	687.250	94,45	66,96	-31,78%
Pajak daerah	816.201	752.547	752.612	509.342	92,21	67,68	-32,32%
Retribusi daerah	20.200	12.523	10.755	168.412	53,24	1.344,82	1465,87%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.115	11.371	11.371	9.472	112,42	83,30	-16,70%
Lain-lain PAD yang sah	220.015	249.953	232.624	24	105,73	0,01	-99,99%
II. Pendapatan Transfer	2.040.117	1.920.378	2.417.276	1.642.935	118,49	85,55	-32,03%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.040.117	1.920.378	2.417.276	1.642.935	118,49	85,55	-32,03%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	556.582	-	589.335	-	106	-
Dana Alokasi Umum	-	1.183.702	-	940.656	-	79	-
Dana Alokasi Khusus	-	180.094	-	112.944	-	63	-
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	350	350	1.772	31.677	506,29	9.050,57	1687,64%
Pendapatan Hibah	350	350	379	316	108,29	90,29	-16,62%
Pendapatan Lainnya	-	-	1.393	31.361	-	-	2151,33%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inovasi, antara lain pelayanan pajak berbasis digital, penerapan *e-ticketing*, serta pembayaran non-tunai pada sektor transportasi, khususnya kepelabuhanan. Ke depan, langkah ini diharapkan dapat memperkuat strategi peningkatan PAD sekaligus memperluas implementasi digitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Transfer masih mendominasi struktur pendapatan Pemprov Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 dengan pangsa sebesar 70,51%, relatif menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 70,58%. Sementara itu, pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat meningkat menjadi 29,49% pada triwulan IV 2025, dibandingkan dengan 29,42% pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini ditopang oleh realisasi positif pada komponen retribusi daerah yang menunjukkan adanya kemandirian fiskal daerah.

Grafik II.1. Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Adapun lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan signifikan dengan pangsa mencapai 1,36% pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,05%. Secara keseluruhan, komposisi pendapatan ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup besar, terdapat perbaikan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah yang meningkat. Oleh karena itu, penguatan upaya digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui forum TP2DD diharapkan dapat terus mendorong peningkatan PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah

Penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp2,21 triliun atau 69,32% dari total pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,52 triliun atau 100% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja mengalami kontraksi sebesar 37,12% (yoy).

Penurunan realisasi belanja daerah tersebut terutama bersumber dari kontraksi signifikan pada Belanja Operasional yang tercatat sebesar Rp1,68 triliun atau 79,13% dari pagu, mengalami pertumbuhan 26,58% (yoy) dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh menurunnya belanja barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut, Belanja Modal juga menunjukkan kontraksi yang signifikan dengan realisasi sebesar Rp148,12 miliar atau 38,12% dari pagu, jauh lebih rendah dibandingkan Rp702,95 miliar pada triwulan IV 2024, sehingga secara tahunan terkontraksi 78,93% (yoy), terutama pada belanja jalan, irigasi

Tabel II.3. Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	Anggaran (Rp Juta)		Realiasi (Rp Juta)		% Realisasi thdp pagu		g.2025 (yoy)
	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	IV 2024	IV 2025	
BELANJA (I+II+III+IV)	3.502.590	3.191.861	3.518.586	2.212.589	100,46	69,32	-37,12%
I. Belanja Operasional	2.254.724	2.118.978	2.283.806	1.676.782	101,29	79,13	-26,58%
Belanja Pegawai	906.949	987.362	860.493	797.267	94,88	80,75	-7,35%
Belanja Barang dan Jasa	1.133.264	1.069.746	1.178.048	803.110	103,95	75,07	-31,83%
Belanja Subsidi	19.152	3.951	19.787	691	103,32	17,49	-96,51%
Belanja Hibah	191.370	54.967	222.249	74.559	116,14	135,64	-66,45%
Belanja Bantuan Sosial	3.989	2.952	3.229	1.155	80,95	39,13	-
II. Belanja Modal	578.239	388.574	702.952	148.121	121,57	38,12	-78,93%
Belanja Tanah	10.741	7.364	36.362	0	338,53	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	99.342	64.920	162.473	42.759	163,55	65,86	-73,68%
Belanja Gedung dan Bangunan	203.129	166.884	208.341	77.770	102,57	46,60	-62,67%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	257.481	144.932	292.653	27.154	113,66	18,74	-90,72%
Belanja Aset Tetap Lainnya	63	3.884	744	153	1.180,95	3,94	-
Belanja Aset Lainnya	7.483	590	2.379	285	31,79	48,31	-
III. Belanja tidak terduga	15.000	25.000	7.500	21.790	50,00	87,16	190,53%
IV. Transfer	654.627	659.309	524.328	365.896	80,10	55,50	-30,22%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara

dan jaringan, belanja peralatan dan mesin, belanja tanah, serta belanja gedung dan bangunan sebagai dampak dari efisiensi dan realokasi anggaran tahun 2025.

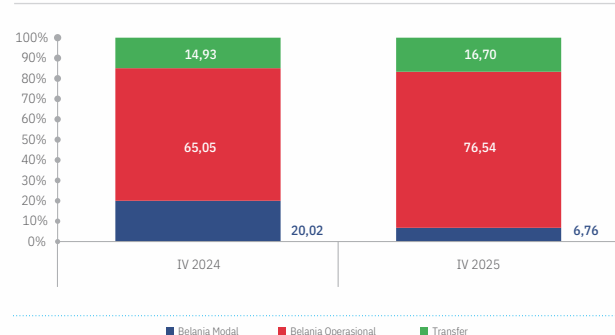
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp21,79 miliar atau 87,16% dari pagu, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp7,5 miliar atau 50% dari pagu. Adapun Belanja Transfer tercatat sebesar Rp365,9 miliar atau 55,5% dari pagu, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp524,33 miliar atau 80,10% dari pagu, sehingga secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 30,22% (yoy) (Tabel II.3).

Secara keseluruhan, kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang disebabkan oleh berkurangnya belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer.

Berdasarkan pangsa, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 mayoritas masih berasal dari Belanja Operasional yang mencapai 76,54%, meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 65,05%. Peningkatan pangsa belanja operasional ini menunjukkan dominasi belanja rutin dalam struktur APBD Provinsi Kalimantan Utara (Grafik II.2).

Sementara itu, kontribusi belanja transfer juga mengalami peningkatan menjadi 16,70% pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,93%. Peningkatan ini mencerminkan masih besarnya alokasi belanja untuk mendukung pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara.

Di sisi lain, belanja modal menunjukkan penurunan signifikan dengan pangsa sebesar 6,76%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 20,02%. Penyusutan porsi belanja modal ini sejalan dengan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya melalui kebijakan efisiensi dan realokasi belanja

Grafik II.2. Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

untuk mendukung prioritas yang lebih mendesak pada tahun berjalan. Kondisi tersebut turut membatasi ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan investasi publik, mengingat belanja modal merupakan komponen utama dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

2.2 APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Realisasi Pendapatan Spasial

Realisasi pendapatan di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 secara agregat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Secara nominal, total realisasi komponen pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar Rp8.737,44 miliar atau 99,78% dari total pagu APBD TA 2025 sebesar Rp8.757,08 miliar. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.940,05 miliar atau 105,44% dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp9.427 miliar.

Meskipun secara nominal dan persentase pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024. Namun, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan tingkat penyerapan yang mendekati pagu anggaran. Hal ini mencerminkan upaya

pemerintah daerah dalam menjaga optimalisasi penerimaan serta pengelolaan fiskal yang prudent di tengah dinamika kapasitas fiskal dan kondisi ekonomi.

Realisasi Belanja Spasial

Realisasi belanja di 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp8.957,22 Miliar atau 84,86% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota se-Kaltara sebesar Rp10.555,66 miliar. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.620,37 miliar atau 86,38% dari total pagu APBD Kabupaten/Kota se-Kaltara tahun 2024 sebesar Rp11.137,42 miliar.

Dengan demikian, secara tahunan realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara mengalami kontraksi, baik secara nominal maupun persentase serapan anggaran. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran, di mana pemerintah daerah mungkin telah mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program-program strategis, yang menyebabkan penundaan atau penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran yang tersedia secara lebih efektif, meskipun serapan belanja belum optimal.

Tabel II.4. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	2024			2025		
	Anggaran Tw IV	Realisasi Tw IV		Anggaran Tw IV	Realisasi Tw IV	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% thd Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% thd Pagu
Pendapatan						
Kota Tarakan	1.323,86	1.284,46	97,02%	1.176,10	1.093,65	92,99%
Kab. Bulungan	1.857,93	2.121,64	114,19%	1.927,33	2.063,14	107,05%
Kab. Malinau	2.978,59	3.046,32	102,27%	2.732,69	2.700,51	98,82%
Kab. Nunukan	2.000,38	2.003,73	100,17%	1.893,75	1.800,83	95,09%
Kab. Tana Tidung	1.266,24	1.483,90	117,19%	1.027,21	1.079,31	105,07%
Total Kab/Kota Kaltara	9.427,00	9.940,05	105,44%	8.757,08	8.737,44	99,78%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Tabel II.5. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	2024			2025		
	Anggaran Tw III	Realisasi Tw IV		Anggaran Tw IV	Realisasi Tw IV	
	Rp Miliar	Rp Miliar	% thd Pagu	Rp Miliar	Rp Miliar	% thd Pagu
Belanja						
Kota Tarakan	1.361,74	1.271,36	93,36%	1.215,95	1.070,51	88,04%
Kab. Bulungan	2.385,99	2.070,38	86,77%	2.506,65	2.133,63	85,12%
Kab. Malinau	3.518,02	2.871,17	81,61%	3.247,27	2.706,91	83,36%
Kab. Nunukan	2.307,07	2.051,22	88,91%	2.152,83	1.879,66	87,31%
Kab. Tana Tidung	1.564,60	1.356,24	86,68%	1.432,96	1.166,51	81,41%
Total Kab/Kota Kaltara	11.137,42	9.620,37	86,38%	10.555,66	8.957,22	84,86%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara

Penurunan ini juga dapat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian serta penyesuaian struktur belanja untuk efisiensi dan realokasi anggaran pada tahun 2025.

2.3 Dana Kementerian dan Lembaga (K/L)

Pemerintah Pusat

Belanja K/L di Kaltara

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3,41 triliun atau 92,71% dari total pagu belanja K/L tahun 2025 sebesar Rp3,68 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,02 triliun atau 96,32% dari total pagu belanja K/L tahun 2024 sebesar Rp4,18 triliun. Dengan demikian, secara tahunan realisasi belanja K/L di wilayah Kalimantan Utara mengalami kontraksi sebesar 15,29% (yoy) (Tabel II.6).

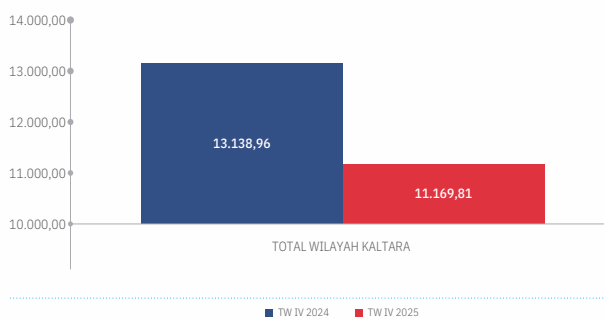
Penurunan realisasi belanja K/L terutama dipengaruhi oleh turunnya belanja modal yang hanya terealisasi sebesar Rp716,33 miliar atau 89,39% dari pagu, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,23 triliun atau 98,76% dari pagu. Secara tahunan, belanja modal mengalami kontraksi sebesar 41,7% (yoy). Kondisi ini mencerminkan adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran K/L, sehingga berdampak pada terbatasnya pelaksanaan proyek infrastruktur di Kalimantan Utara.

Di sisi lain, belanja pegawai mencatatkan peningkatan dengan realisasi sebesar Rp1,23 triliun atau 98,03% dari pagu, secara persentase lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,1 triliun atau 99,50% dari pagu, sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, belanja barang juga tercatat mengalami penurunan menjadi Rp1,45 triliun atau 90,19% dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,7 triliun, atau 92,75% dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 14,54% (yoy). Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami peningkatan 96,14% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp0,31 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp0,16 miliar.

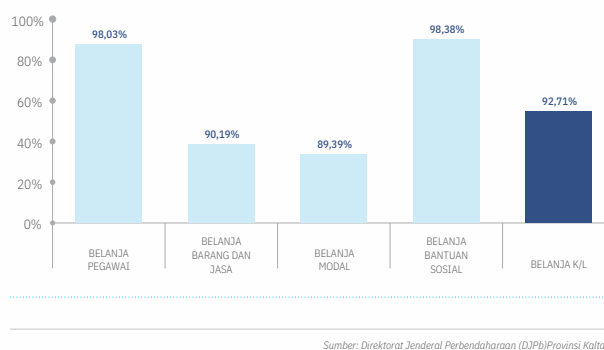
Menurut persentase terhadap pagu, serapan realisasi terbesar pada triwulan IV 2025 adalah belanja bantuan sosial dengan capaian 98,38% dari pagu, yang merupakan salah satu bentuk stimulus fiskal dalam struktur APBN untuk mendukung perekonomian di Kalimantan Utara (Grafik II.4). Selanjutnya, belanja pegawai sebesar 98,03% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa tercatat sebesar 90,19%.

Sementara itu, belanja modal menunjukkan persentase serapan yang relatif rendah, yaitu 89,39% dari pagu, sejalan dengan kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah pusat pada tahun 2025. Secara total, realisasi belanja K/L di wilayah Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan IV 2025 mencapai 92,71% dari pagu APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Grafik II.3. Realisasi Belanja K/L di Provinsi Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025 (Miliar Rupiah)



Grafik II.4. Tingkat Serapan Realisasi Belanja APBN Provinsi Kaltara Triwulan IV 2025



Tabel II.6. Realisasi Belanja K/L di Wilayah Kaltara Triwulan IV 2024 dan Triwulan IV 2025

Uraian	2024			2025			g.2025 (yoy)
	Anggaran	Realisasi Tw IV		Anggaran	Realisasi Tw IV		
	Rp Miliar	Rp Miliar	%	Rp Miliar	Rp Miliar	%	
Belanja Pegawai	1.103,08	1.097,59	99,50%	1.266,30	1.241,33	98,03%	13,10%
Belanja Barang	1.830,02	1.697,28	92,75%	1.608,28	1.450,45	90,19%	-14,54%
Belanja Modal	1.244,16	1.228,76	98,76%	801,36	716,33	89,39%	-41,70%
Belanja Bantuan Sosial	0,16	0,16	100,00%	0,32	0,31	98,38%	96,14%
Total Belanja K/L	4.177,41	4.023,78	96,32%	3.676,25	3.408,42	92,71%	-15,29%

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara





Perkembangan Infasi Daerah



Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 2,32% (yoy). Secara tahunan, capaian tersebut masih relatif terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sejalan dengan kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit akibat keterbatasan pasokan dan meningkatnya permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan akhir tahun. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global dan dinamika ekspektasi suku bunga global. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas hortikultura seperti tomat serta normalisasi harga angkutan udara dan angkutan laut pada periode tertentu.

3.1. Gambaran Umum

Inflasi triwulan IV 2025 Provinsi Kalimantan Utara tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi nasional. Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 2,32% (yoy). Peningkatan inflasi tersebut terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sejalan dengan masih tingginya preferensi masyarakat terhadap aset lindung nilai di tengah ketidakpastian global dan dinamika suku bunga internasional. Selain itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut memberikan tekanan inflasi, didorong oleh kenaikan harga ikan bandeng, beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kenaikan tersebut mencerminkan dinamika pasokan komoditas pangan serta peningkatan permintaan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan akhir tahun. Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Selor sebesar 2,93% (yoy), diikuti oleh Tarakan sebesar 2,88% (yoy), sementara inflasi terendah terjadi di Nunukan sebesar 1,87% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tersebut sejalan dengan tren peningkatan inflasi nasional pada triwulan IV 2025 sebesar 2,92% (yoy) dari sebelumnya 2,65% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik III.1). Secara regional Kalimantan, posisi inflasi Kalimantan Utara tercatat terendah kedua setelah Kalimantan Barat, mencerminkan tekanan yang relatif moderat dibandingkan provinsi lain di kawasan (Grafik III.2).

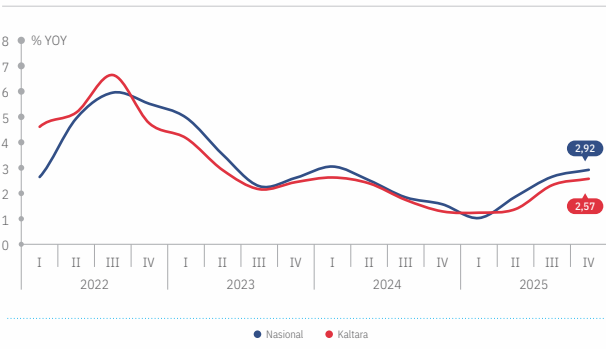
Pada triwulan I 2026, inflasi Prov. Kaltara diperkirakan meningkat dari triwulan IV 2025 dan tetap berada di dalam sasaran target nasional $2,5 \pm 1\%$. Tekanan inflasi triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi terutama disebabkan oleh tren kenaikan emas global yang masih berlanjut serta momen HBKN Ramadan & Idul Fitri yang secara historis menjadi meningkatkan permintaan komoditas pangan. Namun begitu peningkatan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tarif angkutan udara seiring beroperasinya maskapai baru di Kaltara serta insentif diskon angkutan udara dan angkutan laut di momen HBKN Nataru. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara untuk terus melakukan pengendalian inflasi berdasarkan *framework 4K*, yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif. Bank Indonesia sebagai bagian dalam TPID juga terus konsistensi dalam mengarahkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah turut mendukung terjaganya inflasi.

Tabel III.1. Perbandingan Inflasi Kaltara Triwulan III 2025 dan Triwulan IV 2025 (mtm)

Kelompok Barang	Tw III 2025				Tw IV 2025			
	Jul	Agu	Sep	Rata-rata	Okt	Nov	Des	Rata-rata
Umum / Total	0,59	0,06	-0,01	0,21	0,08	0,11	0,54	0,24

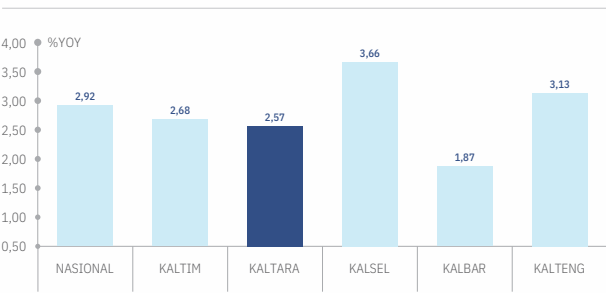
Sumber: BPS, diolah

Grafik III.1. Inflasi Gabungan Kota IHK di Kaltara & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2. Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK di Kalimantan Triwulan IV 2025



Sumber: BPS, diolah

3.2. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)

Secara rerata bulanan, inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK (Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 0,24% (mtm), meningkat dibandingkan rerata triwulan III 2025 sebesar 0,21% (mtm) (Tabel III.1). Peningkatan rerata inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan musiman pada akhir tahun, khususnya pada Desember 2025 yang mencatat inflasi sebesar 0,54% (mtm).

Perkembangan Inflasi Periode Oktober 2025

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Oktober 2025 tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm), berbalik arah dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi. Inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara bulanan, inflasi Oktober 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan (andil 0,22% mtm), ikan bandeng/ikan bolu (andil 0,11% mtm), dan angkutan laut (andil 0,04% mtm). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas

global yang didorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve di tengah pelemahan data ketenagakerjaan Amerika Serikat serta meningkatnya permintaan aset lindung nilai. Sementara itu, kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi oleh dinamika pasokan lokal yang mulai terbatas pasca periode panen sebelumnya. Adapun kenaikan harga angkutan laut merupakan dampak penyesuaian tarif pada sejumlah rute pelayaran domestik. Di sisi lain, inflasi Oktober 2025 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas hortikultura dan transportasi, antara lain bawang merah (andil -0,08% mtm), cabai rawit (andil -0,06% mtm), tomat (andil -0,03% mtm), serta angkutan udara (andil -0,05% mtm). Penurunan harga bawang merah, cabai rawit, dan tomat didukung oleh terjaganya pasokan seiring periode panen dan kondisi curah hujan yang relatif kondusif. Sementara itu, penurunan harga angkutan udara dipengaruhi oleh penyesuaian tarif oleh maskapai seiring peningkatan kompetisi setelah masuknya maskapai baru di Kalimantan Utara.

Perkembangan Inflasi Periode November 2025

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada November 2025 tercatat inflasi sebesar 0,11% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat 0,08% (mtm). Inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Transportasi. Secara bulanan, inflasi November 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan (andil 0,09% mtm), angkutan udara (andil 0,05% mtm), dan sawi hijau (andil 0,02% mtm). Peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global yang didorong ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga oleh *Federal Reserve* di tengah indikator perlambatan ekonomi Amerika Serikat.

Sementara itu, kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Adapun kenaikan harga sawi hijau dipicu oleh curah hujan yang relatif tinggi sehingga menurunkan produksi sayuran lokal. Di sisi lain, inflasi November 2025 tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas pangan, antara lain ikan bandeng (andil -0,06% mtm), tomat (andil -0,05% mtm), dan daging ayam ras (andil -0,02% mtm). Penurunan harga ikan bandeng dipengaruhi melimpahnya pasokan seiring periode panen pada tambak lokal. Sementara itu, penurunan harga tomat didukung pasokan yang relatif terjaga dari daerah pemasok luar Kalimantan Utara. Adapun penurunan harga daging ayam ras dipengaruhi penurunan biaya input produksi, khususnya harga pakan dan *Day Old Chick* (DOC).

Perkembangan Inflasi Periode Desember 2025

Indeks Harga Konsumen Gabungan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 0,54% (mtm), meningkat signifikan dibandingkan November 2025 yang tercatat 0,11% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan musiman pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Secara bulanan, inflasi Desember 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas angkutan udara (andil 0,19% mtm), bawang merah (andil 0,13% mtm), dan cabai rawit (andil 0,13% mtm). Peningkatan harga angkutan udara didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur akhir tahun. Sementara itu, kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit dipicu oleh peningkatan permintaan di tengah pasokan yang mulai berkurang pasca musim panen, sehingga mendorong tekanan pada komponen *volatile food*. Di sisi lain, inflasi Desember 2025

Tabel III.2. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)

Oktober 2025			November 2025			Desember 2025		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Emas Perhiasan	14,02	0,22	Emas Perhiasan	4,87	0,09	Angkutan Udara	17,13	0,19
Ikan Bandeng/ikan Bolu	7,62	0,08	Angkutan Udara	5,10	0,05	Bawang Merah	21,96	0,13
Angkutan Laut	3,40	0,02	Sawi Hijau	7,75	0,02	Cabai Rawit	20,27	0,13
Telur Ayam Ras	1,39	0,01	Bayam	5,26	0,02	Emas Perhiasan	2,30	0,04
Ikan Kembung/ikan Gembung/ Ikan Banyar/ikan Gembolo/ Ikan Aso-aso	4,39	0,01	Kangkung	4,70	0,02	Telur Ayam Ras	2,26	0,02
Batu Bata/batu Tela	4,37	0,01	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-ambu	6,27	0,01	Batu Bata/batu Tela	11,64	0,02
Sabun Mandi Cair	1,08	0,00	Ikan Kembung/ikan Gembung/ Ikan Banyar/ikan Gembolo/ Ikan Aso-aso	3,90	0,01	Ikan Layang/ Ikan Benggol	1,13	0,02
Sewa Rumah	0,18	0,00	Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	1,30	0,01	Bensin	0,26	0,01
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	0,34	0,00	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	6,73	0,01	Bakso Siap Santap	1,30	0,01
Asam	3,06	0,00	Jeruk Nipis/limau	18,66	0,01	Wortel	6,63	0,01

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.3. Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan Gabungan 3 Kab/Kota IHK Kaltara selama Triwulan IV 2025 (mtm)

Oktober 2025			November 2025			Desember 2025		
Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Bawang Merah	-11,05	-0,08	Ikan Bandeng/ikan Bolu	-4,83	-0,06	Angkutan Laut	-8,79	-0,05
Cabai Rawit	-8,55	-0,06	Tomat	-11,12	-0,05	Ikan Bandeng/ikan Bolu	-3,21	-0,04
Angkutan Udara	-4,61	-0,05	Daging Ayam Ras	-0,88	-0,02	Bayam	-5,53	-0,02
Tomat	-7,37	-0,03	Beras	-0,36	-0,02	Tomat	-3,54	-0,01
Bawang Putih	-6,55	-0,02	Cabai Rawit	-1,85	-0,01	Sabun Cair/cuci Piring	-1,20	0,00
Kacang Panjang	-11,79	-0,02	Bawang Merah	-1,32	-0,01	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	-2,62	0,00
Cabai Merah	-8,30	-0,01	Bawang Putih	-1,77	-0,01	Jeruk Nipis/limau	-6,27	0,00
Beras	-0,19	-0,01	Susu Bubuk Untuk Balita	-0,90	0,00	Buncis	-4,60	0,00
Bayam	-2,64	-0,01	Minyak Goreng	-0,17	0,00	Tissu	-0,67	0,00
Daging Ayam Ras	-0,36	-0,01	Ikan Bawal	-1,98	0,00	Ketimun	-3,26	0,00

Sumber: BPS, diolah

tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas, antara lain angkutan laut (andil -0,05% mtm), ikan bandeng/ikan bolu (andil -0,04% mtm), dan bayam (andil -0,02% mtm). Penurunan harga angkutan laut didukung oleh kebijakan diskon tarif kapal penumpang pada periode HBKN. Sementara itu, penurunan harga ikan bandeng dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan hasil panen tambak yang merespons permintaan akhir tahun. Adapun penurunan harga bayam didukung kondisi cuaca yang relatif kondusif bagi produksi sayuran lokal.

3.3. Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara meningkat pada triwulan IV 2025. Inflasi Kalimantan Utara tercatat sebesar 2,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 2,32% (yoy) dan juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel III.4). Inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,94% (yoy), khususnya bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil signifikan. Kenaikan harga emas tersebut sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter global yang mendorong permintaan aset lindung nilai. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan relatif tertahan oleh kelompok yang mencatatkan deflasi tahunan, terutama Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

Komoditas emas perhiasan, tarif air minum PAM, dan tarif rumah sakit menjadi kontributor utama pendorong inflasi tahunan pada triwulan IV 2025. Komoditas emas perhiasan tercatat menyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 0,79% (yoy) (Tabel III.5). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah ketidakpastian perekonomian global dan dinamika ekspektasi suku bunga internasional yang mendorong permintaan aset lindung nilai. Komoditas tarif air minum PAM menjadi kontributor terbesar kedua dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,30% (yoy), sejalan dengan implementasi penyesuaian tarif layanan air minum di sejumlah wilayah. Sementara itu, komoditas tarif rumah sakit menjadi kontributor terbesar berikutnya dengan andil sebesar 0,18% (yoy), dipengaruhi oleh penyesuaian tarif komponen-komponen layanan kesehatan.

Di sisi lain, komoditas tomat, tahu mentah, dan tempe menjadi kontributor utama penahan inflasi tahunan pada triwulan IV 2025. Penurunan harga tomat tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,08% (yoy), didukung oleh pasokan yang relatif terjaga dari daerah pemasok. Selain itu, tahu mentah dan tempe masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar -0,04% (yoy), sejalan dengan stabilisasi harga kedelai sebagai bahan baku utama. Deflasi juga terjadi pada beberapa komoditas hortikultura lainnya seperti bawang putih dan sawi hijau yang turut meredam tekanan harga secara keseluruhan. Adapun 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.4. Inflasi Umum/Total Tahunan Kaltara 2024-2025 (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi %YOY								Arah
	2024				2025				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Umum / Total	2,62	2,39	1,74	1,29	1,24	1,38	2,32	2,57	▲

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Gabungan Triwulan IV 2025 (yoy)

Andil Inflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Emas Perhiasan	66,86	0,79
Tarif Air Minum Pam	13,48	0,30
Tarif Rumah Sakit	31,84	0,18
Ikan Bandeng/ikan Bolu	16,53	0,15
Beras	3,06	0,13
Daging Ayam Ras	5,63	0,11
Bahan Bakar Rumah Tangga	5,05	0,09
Nasi Dengan Lauk	2,32	0,07
Telur Ayam Ras	6,75	0,07
Bawang Merah	9,74	0,07

Andil Deflasi		
Komoditas	YOY	%Andil
Tomat	-17,43	-0,08
Tahu Mentah	-11,39	-0,04
Tempe	-9,89	-0,04
Bawang Putih	-10,02	-0,04
Angkutan Udara	-2,43	-0,03
Angkutan Laut	-5,69	-0,03
Cabai Rawit	-2,55	-0,02
Sawi Hijau	-7,31	-0,02
Pengharum Cucian/ Pelembut	-6,20	-0,02
Kangkung	-4,49	-0,02

Sumber: BPS, diolah

3.4. Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan di triwulan III 2025 terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya namun tertahan pada Kelompok Transportasi. Inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat 3,50% (yoy, andil 1,13%), terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas ikan bandeng, bawang merah, dan tomat. Sementara itu, Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 8,47% (yoy, andil 0,61%), disumbang oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan. Namun, inflasi tertahan oleh Kelompok Transportasi yang tercatat deflasi sebesar -2,04% (yoy, andil -0,25%), disumbang oleh penurunan harga pada komoditas angkutan udara.

Tabel III.6. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)

Inflasi Kelompok		
Kelompok	YOY	Andil
Umum	2,57	2,57
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,32	0,75
Pakaian dan Alas Kaki	0,08	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rt	3,12	0,51
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rt	-0,64	-0,03
Kesehatan	8,40	0,20
Transportasi	0,03	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,22	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,39	0,02
Pendidikan	0,92	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,92	0,16
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	12,95	0,94

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2025 terutama bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sementara Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga menjadi penahan inflasi. Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 12,95% (yoy, andil 0,94%), menjadi penyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan. Tekanan pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan, sejalan dengan penguatan harga emas global di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tingginya permintaan aset lindung nilai sepanjang 2025. Sementara itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatat inflasi sebesar 2,32% (yoy, andil 0,75%), terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti ikan bandeng, beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Tekanan pada kelompok ini mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan pangan domestik sepanjang tahun, termasuk faktor musiman pada akhir tahun. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang tercatat sebesar -0,64% (yoy, andil -0,03), terutama didorong oleh turunnya harga pengharum/pelembut cucian.

Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Triwulan IV 2025 tercatat meningkat signifikan dan menjadi penyumbang andil terbesar dalam inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara (Tabel III.7). Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 12,95% (yoy) dengan andil sebesar 0,94% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, yang menjadi kontributor dominan sepanjang tahun 2025. Kenaikan harga emas

perhiasan di Kalimantan Utara sejalan dengan penguatan harga emas global yang dipicu oleh ketidakpastian perekonomian global, dinamika geopolitik, serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat yang memengaruhi pergerakan indeks Dolar AS. Permintaan emas sebagai aset lindung nilai tetap tinggi, sehingga mendorong kenaikan harga pada level domestik. Selain emas perhiasan, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga komoditas krim wajah, pasta gigi, serta beberapa produk perawatan pribadi lainnya. Kenaikan harga komoditas tersebut sejalan dengan tren kenaikan harga pada level nasional dan mencerminkan penyesuaian harga oleh produsen akibat kenaikan biaya input serta distribusi. Adapun 10 (sepuluh) komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.7.

Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,32% (yoy) dengan andil 0,75% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara.

Tekanan pada kelompok ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh dinamika pasokan dan permintaan komoditas pangan strategis sepanjang akhir tahun. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas ikan bandeng/ikan bolu, beras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi oleh fluktuasi produksi tambak serta meningkatnya permintaan domestik pada periode akhir tahun. Sementara itu, kenaikan harga beras dan daging ayam ras sejalan dengan dinamika biaya produksi dan distribusi. Adapun kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi pasca periode panen, sehingga meningkatkan tekanan harga di wilayah Kalimantan Utara. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada beberapa komoditas hortikultura dan bahan pangan olahan, antara lain tomat, tahu mentah, dan tempe. Penurunan harga tomat didukung oleh pasokan yang relatif terjaga dari daerah pemasok luar Kalimantan Utara. Sementara itu, penurunan harga tahu mentah dan tempe sejalan dengan stabilisasi harga kedelai sebagai bahan baku utama di tingkat nasional, sehingga

Tabel III.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Triwulan IV 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Emas Perhiasan	66,86	0,79	Parfum	-0,84	0,00
Krim Wajah	12,99	0,04	Tisu	-0,93	0,00
Pasta Gigi	5,39	0,03	Deodorant	-0,75	0,00
Popok Bayi Sekali Pakai/ Diapers	2,16	0,02	Tisu Basah	-0,10	0,00
Sabun Mandi Cair	3,46	0,02	Lotion Anti Nyamuk	0,00	0,00
Tarif Gunting Rambut Pria	3,47	0,01			
Hand Body Lotion	2,84	0,01			
Sabun Mandi	2,75	0,01			
Pembalut Wanita	1,86	0,01			
Tarif Gunting Rambut Anak	5,71	0,01			

Sumber: BPS, diolah

Tabel III.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Triwulan IV 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Ikan Bandeng/ikan Bolu	16,53	0,15	Tomat	-17,43	-0,08
Beras	3,06	0,13	Tahu Mentah	-11,39	-0,04
Daging Ayam Ras	5,63	0,11	Tempe	-9,89	-0,04
Telur Ayam Ras	6,75	0,07	Bawang Putih	-10,02	-0,04
Bawang Merah	9,74	0,07	Cabai Rawit	-2,55	-0,02
Minyak Goreng	4,09	0,06	Sawi Hijau	-7,31	-0,02
Ikan Layang/ Ikan Benggol	3,98	0,05	Kangkung	-4,49	-0,02
Air Kemasan	3,93	0,05	Bayam	-3,73	-0,01
Kopi Bubuk	6,99	0,04	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	-6,12	-0,01
Ikan Kembung	12,55	0,04	Labu Manis/merah/kuning	-6,23	-0,01

Sumber: BPS, diolah

menekan biaya produksi komoditas tersebut. Adapun 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.8.

Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2025, Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga tercatat mengalami deflasi sebesar -0,64% (yoy) dengan andil -0,03% (yoy) terhadap inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Utara. Deflasi pada kelompok ini turut menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan laporan. Penurunan harga terutama terjadi pada subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin, khususnya pada komoditas produk pembersih rumah tangga seperti pengharum cucian dan sejumlah produk sejenis. Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh stabilisasi harga bahan baku dan distribusi pada level nasional serta penyesuaian harga oleh produsen dan ritel modern. Sementara itu, beberapa komoditas dalam kelompok ini masih mencatatkan kenaikan harga terbatas, seperti upah asisten rumah tangga dan sebagian barang pecah belah serta peralatan makan minum. Namun demikian, kenaikan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong kelompok ini kembali ke zona inflasi secara tahunan. Adapun 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi tahunan terbesar pada kelompok ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.9.

3.5. Upaya Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID kabupaten/kota terus melakukan koordinasi secara intensif untuk menjaga stabilitas inflasi pada triwulan IV 2025. Koordinasi, sinergi, dan upaya yang intens dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara dan TPID di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten selama bulan Oktober hingga Desember 2025 (Tabel III. 9) dengan fokus memastikan keterjangkauan harga,

ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, dan kelancaran distribusi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan setiap bulan.

Pada triwulan IV 2025, TPID Se-Kaltara secara rutin melakukan operasi pasar di sejumlah lokasi strategis di kabupaten/kota untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan menjamin distribusi pasokan pangan sampai ke daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, TPID se-Provinsi Kalimantan Utara secara rutin mengadakan *High Level Meeting* (HLM) untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan selama triwulan IV 2025. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara bersinergi dengan TPID untuk mengembangkan pertanian lokal dengan meningkatkan mekanisasi dan penggunaan teknologi pertanian. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat menjaga ekspektasi inflasi masyarakat melalui ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang didukung oleh kelancaran distribusi.

3.6. Tracking Inflasi Triwulan I 2026

Inflasi tahunan gabungan 3 kabupaten/kota IHK Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 (realisasi hingga Januari 2026) tercatat meningkat dan berada di atas sasaran inflasi nasional dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada bulan Januari 2026, IHK gabungan 3 kabupaten/kota menunjukkan inflasi sebesar 0,10% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,54% (mtm) (Grafik III.3). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kalimantan Utara pada Januari 2026 mengalami inflasi sebesar 4,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,55% (yoy).

Peningkatan inflasi tahunan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor *base effect* pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya dampak diskon

Tabel III.9. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT Triwulan IV 2025 (yoy)

Komoditas	Inflasi	Andil	Komoditas	Inflasi	Andil
Upah Asisten Rumah Tangga	2,46	0,02	Pengharum Cucian/ Pelembut	-6,20	-0,02
Panci	1,70	0,00	Sabun Detergen Bubuk	-1,86	-0,01
Gelas Minum	2,17	0,00	Sabun Cair/cuci Piring	-2,48	-0,01
Pembasmi Nyamuk Bakar	3,76	0,00	Pembersih Lantai	-7,90	-0,01
Bola Lampu	0,86	0,00	Kulkas/lemari Es	-3,08	-0,01
Setrika	8,02	0,00	Air Conditioner (AC)	-2,63	0,00
Pelicin/ Pewangi Pakaian	3,46	0,00	Alat-alat Listrik	-7,01	0,00
Kipas Angin	0,56	0,00	Detergen Cair	-4,49	0,00
Karpet	0,61	0,00	Kompas	-3,22	0,00
Sofa	1,68	0,00	Spring Bed	-0,94	0,00

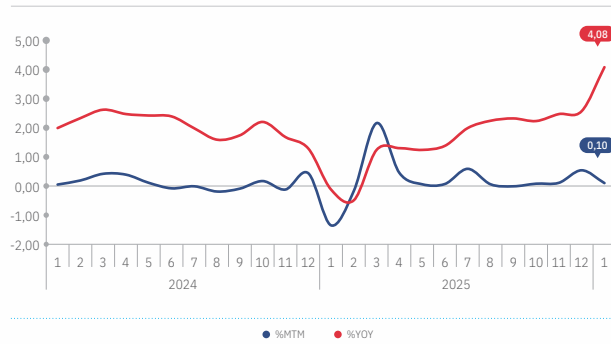
Sumber: BPS, diolah

Tabel III.10. Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah selama Triwulan IV 2025

Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan	Penyelenggara
6, 13, 20 Oktober 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
8 Oktober 2025	Gerakan Pasar Murah Kab. Tana Tidung	Menjaga keterjangkauan harga beras dan minyak goreng bagi keluarga berpenghasilan rendah	TPID Kab. Tana Tidung
8 Oktober 2025	Tanam jagung serentak di 21 titik (29,53 Ha)	Mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah	Polri & Pemda
8 Oktober 2025	Rakor teknis Mini Distribution Center (MDC)	Koordinasi penguatan instrumen stabilisasi harga berbasis MDC	BI, Pemkot Tarakan & Bulog
12–13 Oktober 2025	GPM kolaborasi BI dan Pemkab Nunukan	Stabilisasi harga Bapokting dalam rangka HUT Kab. Nunukan	TPID Kab. Nunukan & BI
22 Oktober 2025	Sidak Pasar Induk Tanjung Selor	Pengawasan harga Minyakita dan Beras SPHP serta pencegahan penumpukan komoditas	Satgas Pangan & TPID Provinsi
30 Oktober 2025	Pasar Murah KNPI dan Pemkab Tana Tidung	Menekan tekanan harga komoditas pokok menjelang akhir tahun	KNPI & TPID Kab. Tana Tidung
31 Oktober 2025	Penanaman padi & pemeriksaan kesehatan petani (150 Ha)	Perluasan lahan sawah dan penguatan produksi pangan Malinau	Satgas PESAT & Pemkab Malinau
31 Okt – 2 Nov 2025	GPM BI, Pemkot Tarakan & Bulog (Karya Kreatif Benuanta 2025)	Meningkatkan optimisme masyarakat terhadap inflasi	BI, Pemkot Tarakan & Bulog
4, 11, 17 November 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
1–2 November 2025	GPM kolaborasi BI, Pemkot Tarakan, dan Bulog (Karya Kreatif Benuanta 2025)	Meningkatkan optimisme masyarakat terhadap inflasi dan menjaga keterjangkauan harga Bapokting	BI, Pemkot Tarakan & Bulog
November 2025 (rutin)	GPM mobile setiap Car Free Day di Tarakan	Menjaga keterjangkauan harga dan akselerasi penyaluran SPHP	BI, Pemkot Tarakan & Bulog
November 2025	GPM keliling setiap kecamatan di Kab. Bulungan	Menekan harga komoditas mendekati HBKN Nataru	BI & Pemkab Bulungan
19 November 2025	GPM Kec. Sembakung, Kab. Nunukan	Perluasan akses bahan kebutuhan pokok di wilayah terpencil	TPID Kab. Nunukan
30 November 2025	Penyuluhan GAP kepada 80 petani di Malinau	Peningkatan efisiensi produksi dan kualitas hasil panen	TPID & Pemkab Malinau
2, 8, 15, 22, 29 Desember 2025	Rakor Rutin Inflasi	Evaluasi Pelaksanaan TPID setiap minggunya	Kemendagri
3–5 Desember 2025	Bimtek Brigade Pangan di Tanjung Selor	Penguatan kapasitas Brigade Pangan dalam mekanisasi, respons OPT, dan adaptasi iklim untuk mendukung swasembada pangan 2025	TPID Provinsi & Pemda
4–5 Desember 2025	GPM kolaborasi BI, Pemkab Malinau, dan Bulog	Menjaga kestabilan harga pangan menjelang HBKN Nataru	BI, Pemkab Malinau & Bulog
7 Desember 2025	Panen Raya Padi Organik OPLAH di Krayan	Penguatan ketahanan pangan wilayah perbatasan	TPID & Pemda
17 Desember 2025	Tanam Perdana Cetak Sawah Rakyat (35 Ha) Salimbatu	Perluasan lahan sawah, target 798 Ha hingga Maret 2026	TPID Kab. Bulungan
24 Desember 2025	Sidak Pasar Tenguyun Tarakan jelang Nataru	Menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan keamanan pangan	TPID Kota Tarakan
Desember 2025 (rutin)	GPM mobile Tarakan & GPM kecamatan Kab. Tana Tidung	Antisipasi kenaikan harga komoditas menjelang Nataru	BI, Pemda & Bulog

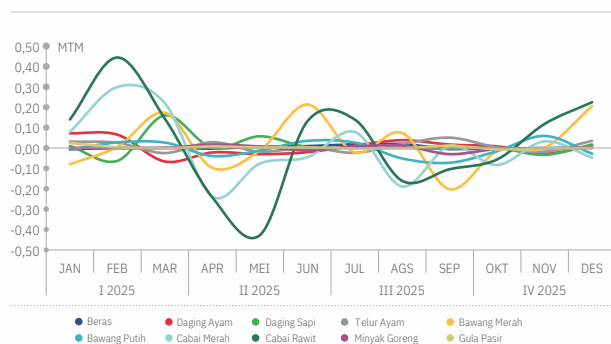
Sumber: TPID Provinsi Kaltara dan Kab/Kota di Wilayah Kaltara (diolah)

Grafik III.3. Perkembangan Inflasi Bulanan Kalimantan Utara



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.4. Perkembangan Harga Bulanan Pangan Strategis Kalimantan Utara



Sumber: PIHPS, diolah

tarif listrik pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulanan, inflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan (andil 0,18% mtm), ikan layang (andil 0,05% mtm), dan angkutan laut (andil 0,04% mtm). Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global yang didorong meningkatnya permintaan aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik serta ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve. Sementara itu, kenaikan harga ikan layang dipengaruhi oleh dinamika pasokan hasil tangkapan nelayan. Lebih lanjut, peningkatan harga angkutan laut mencerminkan penyesuaian tarif pada beberapa rute pelayaran.

Di sisi lain, inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Utara pada Januari 2026 yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas angkutan udara (andil -0,17%), ikan bandeng (andil -0,06%), dan cabai rawit (andil -0,05%). Penurunan harga angkutan udara dipengaruhi normalisasi tarif pasca puncak mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, penurunan harga ikan bandeng dan cabai rawit didukung oleh perbaikan pasokan dan kondisi cuaca yang relatif kondusif di daerah sentra produksi.

3.7. Prakiraan Inflasi Triwulan I 2026

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya namun tetap berada di kisaran sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor base effect pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya dampak diskon tarif listrik pada periode yang sama tahun sebelumnya yang menyebabkan lonjakan inflasi tahunan pada awal tahun 2026. Selain faktor *base effect*, tekanan inflasi juga diperkirakan bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sejalan dengan harga emas global yang masih tertahan tinggi di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika kebijakan suku bunga global, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga emas perhiasan lebih lanjut. Peningkatan inflasi juga berpotensi terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri serta potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca dan siklus panen hortikultura. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi diperkirakan tertahan oleh normalisasi harga pada Kelompok Transportasi, khususnya angkutan udara pasca periode puncak mobilitas akhir tahun serta meningkatnya kompetisi antar maskapai di Kalimantan Utara. Selain itu, keberlanjutan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan penguatan distribusi melalui Tol Laut turut mendukung stabilitas harga di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menghadapi berbagai risiko inflasi tersebut, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara konsisten memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan strategi 4K serta dukungan terhadap efektivitas Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) guna memastikan inflasi tetap terkendali secara fundamental sepanjang triwulan I 2026.

BOKS 2

Launching Mini Distribution Center (MDC) : Inovasi Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026

Sebagai bagian dari penguatan upaya pengendalian inflasi daerah, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Pemerintah Kota Tarakan telah melaksanakan *Launching Mini Distribution Center* (MDC) di Pasar Tengyuan Kota Tarakan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat instrumen stabilisasi harga melalui intervensi sisi pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis.

Program MDC merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Tarakan, dan Perum Bulog. Kolaborasi ini mencerminkan penguatan koordinasi dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya pada aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi (4K). Dengan adanya MDC, diharapkan respons intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah apabila terjadi lonjakan harga komoditas tertentu di tingkat pasar.

MDC dirancang sebagai simpul distribusi yang berfungsi untuk mendekatkan pasokan komoditas kepada pedagang dan konsumen secara lebih cepat dan efisien. Kehadiran MDC diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi potensi biaya tambahan di tingkat

perantara, serta menekan volatilitas harga di pasar, khususnya pada periode dengan potensi tekanan inflasi yang meningkat seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum musiman lainnya.

Selain sebagai instrumen stabilisasi, MDC juga berperan sebagai mekanisme *early response* terhadap potensi gangguan distribusi, mengingat sebagian besar pasokan pangan Kota Tarakan masih bergantung pada jalur distribusi dari luar daerah. Dengan sistem distribusi yang lebih terorganisir, MDC diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan lokal serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pasar dan program stabilisasi lainnya.

Ke depan, program MDC akan terus dievaluasi dan dioptimalkan agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga di Kota Tarakan. Inisiatif ini juga berpotensi menjadi model penguatan distribusi pangan yang dapat direplikasi pada pasar lain di wilayah Kalimantan Utara sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.



Gambar Boks V.3.1 Pelaksanaan Launching MDC di Pasar Tengyuan Kota Tarakan





Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh intermediasi perbankan. Penyaluran kredit tumbuh di atas level regional Kalimantan dan Nasional. Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,89% (yoy) dan 25,87% (yoy). Meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp22 Triliun atau 58,36% dari target investasi 2025 yang ditetapkan sebesar Rp37,7 Triliun. Meningkatnya kredit modal kerja terjadi seiring optimisme masyarakat terhadap perekonomian, terutama pada sektor bisnis.

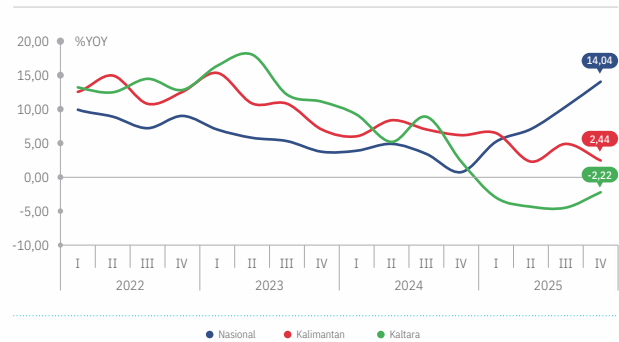
4.1. Intermediasi dan Pertumbuhan Aset Perbankan

Intermediasi perbankan Kalimantan Utara tumbuh naik. Rasio *Loan to Deposit* (LDR) berdasarkan lokasi proyek mencapai 200,24%, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 159,25%. Kondisi ini menggambarkan aktivitas penyaluran kredit perbankan melampaui dana simpanan hal ini dilakukan guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara (Grafik IV.1). Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pembiayaan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, seiring meningkatnya aktivitas usaha dan realisasi proyek di Kalimantan Utara.

Total aset perbankan pada triwulan IV 2025 sebesar Rp22,93 Triliun berkespansi 16,76% (yoy). Pertumbuhan positif pada aset perbankan di wilayah Kalimantan Utara sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit. Tren ekspansif pada aset perbankan juga dialami di wilayah Kalimantan dan Nasional masing-masing tumbuh sebesar 2,34% (yoy) dan 11,50% (yoy) (Grafik IV.2).

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terkontraksi sebesar 2,22% (yoy). Capaian tersebut terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya tumbuh sebesar -4,49% (yoy) (Grafik IV.3). DPK melambat akibat terkontraksinya DPK Korporasi, DPK Perorangan, dan DPK Pemerintah masing-masing sebesar 5,25% (yoy), 0,32% (yoy), dan 22,43% (yoy). Berbeda dengan

Grafik IV.3. Perkembangan Pertumbuhan DPK Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



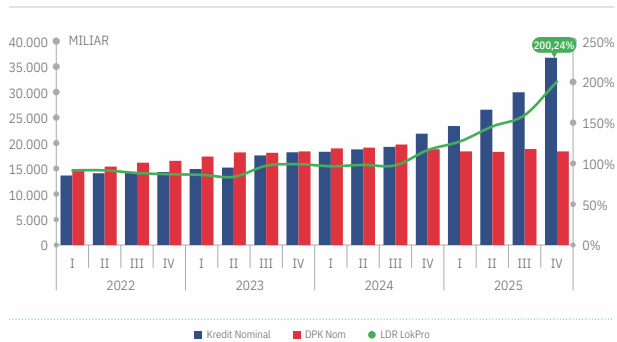
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

triwulan sebelumnya terkontraksi DPK Pemerintah sejalan dengan realisasi anggaran yang tinggi pada akhir tahun, sehingga dana pemerintah di perbankan sudah terealisasi.

Secara nominal, total DPK mencapai Rp18,06 Triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp18,82 Triliun. DPK Deposito dan DPK Giro masih terkontraksi masing-masing sebesar 23,35% (yoy) dan 8,90% (yoy). Sementara itu, hanya DPK Tabungan yang tetap tumbuh sebesar 6,48% (yoy) (Grafik IV.4).

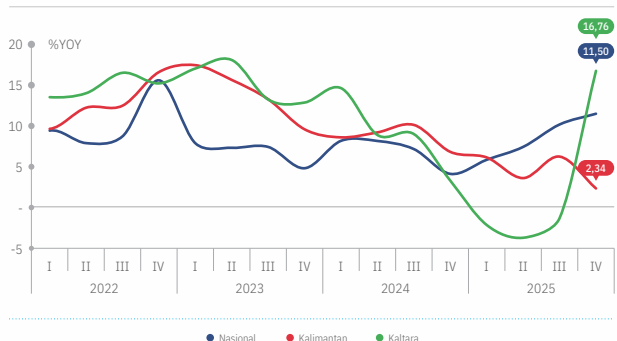
Hal ini sesuai dengan peralihan instrumen investasi masyarakat. Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menjadi pilihan utama

Grafik IV.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan



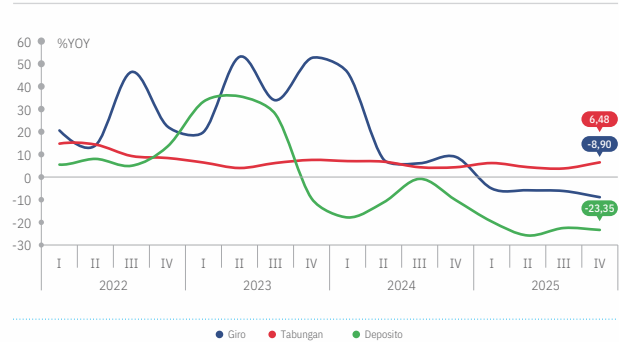
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.2. Perkembangan Pertumbuhan Aset Perbankan Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



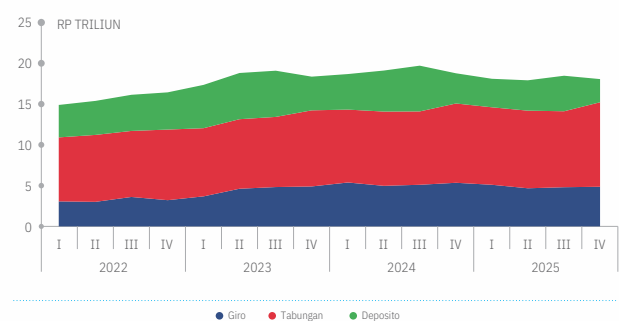
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.4. Perkembangan Pertumbuhan Komponen DPK Perbankan Kaltara



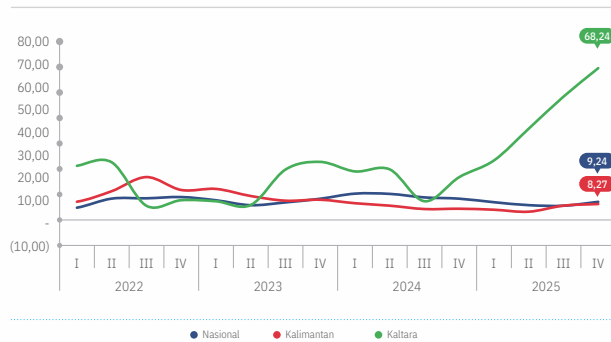
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.5. Perkembangan Komponen DPK Perbankan Kaltara



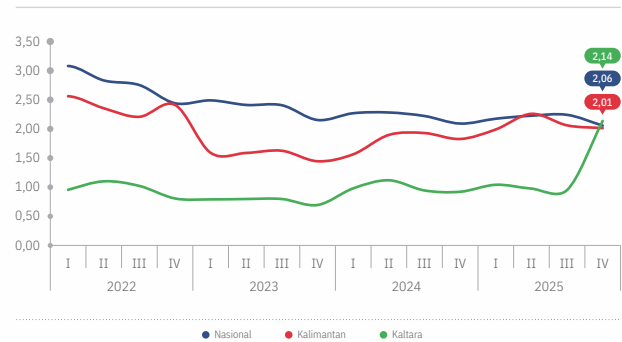
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.6. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.7. Perkembangan NPL Kredit Kaltara, Kalimantan, dan Nasional



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel IV.1. Perkembangan DPK secara spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% yoy)	
			III 2025	IV 2025
Prov. Kaltara	18.353	100,00%	-4,49	-2,22
Bulungan	3.472	18,92%	1,44	-2,92
Nunukan	3.350	18,25%	4,05	5,21
Malinau	2.107	11,48%	9,78	-8,63
Tana Tidung	713	3,88%	2,46	-13,87
Tarakan	8.710	47,46%	-14,05	-1,86

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel IV.2. Perkembangan Kredit Secara Spasial

Kabupaten/Kota	Nominal DPK (Miliar Rp)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (% yoy)	
			III 2025	IV 2025
Prov. Kaltara	36.751	100,00%	55,67	68,24
Bulungan	15.382	41,85%	129,16	88,64
Nunukan	4.568	12,43%	-3,04	-1,22
Malinau	1.573	4,28%	0,42	2,26
Tana Tidung	453	1,23%	7,47	7,86
Tarakan	14.776	40,20%	42,62	107,89

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

simpanan nasabah dengan pangsa mencapai 57,34%, diikuti oleh simpanan giro sebesar 26,92% dan deposito dengan pangsa sebesar 15,74% (Grafik IV.5).

Secara spasial, pangsa DPK terbesar berasal dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, masing-masing sebesar 47,46%, 18,92%, dan 18,25%. Pertumbuhan DPK kabupaten/kota secara keseluruhan mengalami penurunan, namun Kabupaten Nunukan mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding Kab/Kota lainnya sebesar 5,21%, yoy, sedangkan terendah di Kabupaten Tana Tidung mengalami kontraksi sebesar 13,87%, yoy (Tabel IV. 1).

Kredit perbankan tumbuh terakselerasi sebesar 68,24% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kredit terjadi hampir di seluruh sektor terutama LU Pertambangan sebesar 345,77% (yoy), diikuti LU Industri Pengolahan sebesar 223,17% (yoy) dan LU Listrik, Gas dan Air sebesar 199,74% (yoy). Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) KIHI di Kab. Bulungan mempercepat transformasi ekonomi hijau di Kalimantan Utara. Proyek ini menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk penyaluran kredit perbankan mulai dari investasi, modal kerja dan konsumsi. Pertumbuhan kredit secara nominal mencapai Rp36,75 Triliun lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp29,98 Triliun.

Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, risiko kredit tetap terjaga tercermin dari Rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,14%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 0,95%. NPL Kaltara pada periode triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan nasional masing-masing sebesar 2,01% dan 2,06% (Grafik IV.7). Peningkatan rasio NPL menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit belum dibarengi dengan kualitas aset yang sehat, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan. Lonjakan NPL pada triwulan IV ini bersifat temporer/siklikal, disebabkan oleh siklus produksi petani yang sedang melakukan replanting. Ketiadaan pendapatan operasional selama masa tanam hingga menjelang panen menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan kewajiban debitur.

Secara spasial pangsa penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan masing-masing sebesar 41,85%, 40,20%, dan 12,43%. Kredit di Kota Tarakan mengalami kenaikan sebesar 107,89% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit Kabupaten Bulungan melambat dari 129,16% (yoy) pada triwulan III menjadi 88,64% (yoy) pada triwulan. Di sisi lain, kredit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kontraksi sebesar 1,22% (yoy) (Tabel IV. 2). Peningkatan penyaluran kredit di Kota Tarakan didorong oleh ekspansi sektor industri pengolahan, khususnya pada pabrik pengolahan kayu menjadi kertas.

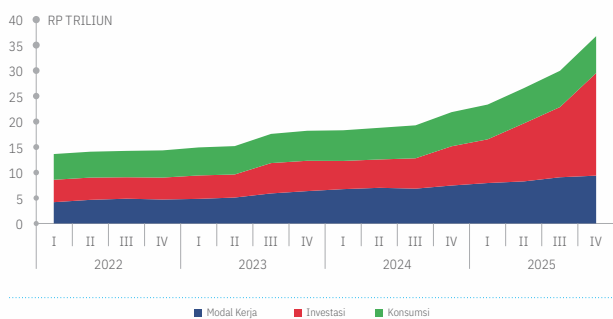
4.2. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan penyaluran kredit berasal dari kredit peningkatan investasi menjadi sebesar 162,05% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 131,75% (yoy) (Grafik IV. 9). Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas LU Listrik, Gas dan Air (LGA), LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Peningkatan LU LGA ini sejalan dengan PSN KIH1 yang ada di Kaltara sehingga memicu investasi konstruksi pembangkit listrik. Kemudian, adanya pembangunan industri pengolahan SDA di KIH1 memberi dampak pada peningkatan pembiayaan di sektor industri pengolahan utamanya manufaktur. Berdasarkan komposisinya, kredit investasi memiliki pangsa terbesar mencapai 54,78%, disusul oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 25,53% dan 19,69%. (Grafik IV. 8)

Secara nominal, penyaluran kredit didominasi oleh kredit di atas Rp5 miliar dan Rp100jt-Rp500jt. Pangsa kredit terbesar adalah kredit diatas Rp5 miliar sebesar 67,22%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 60,16%. Pangsa penyaluran kredit dengan nilai Rp100jt-Rp500jt mengalami penurunan menjadi sebesar 18,29% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,33%. Jika dilihat berdasarkan jumlah rekening, penyaluran kredit mayoritas diberikan kepada debitur dengan nominal kredit Rp100 juta ke bawah dengan pangsa sebesar 86,75% (Tabel IV. 3).

Secara sektoral, pangsa penyaluran kredit didominasi oleh LU Industri Pengolahan yang mencapai 40,12% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 26,89%. Pangsa kredit terbesar selanjutnya yaitu LU Listrik, Gas, dan Air sebesar 11,80% lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 14,47%. LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 8,74%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,93%. (Grafik IV.10). Dominasi penyaluran kredit di sektor Industri Pengolahan didukung oleh adanya pembangunan industri manufaktur PSN KIH1 di Tanah Kuning.

Grafik IV.8. Perkembangan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



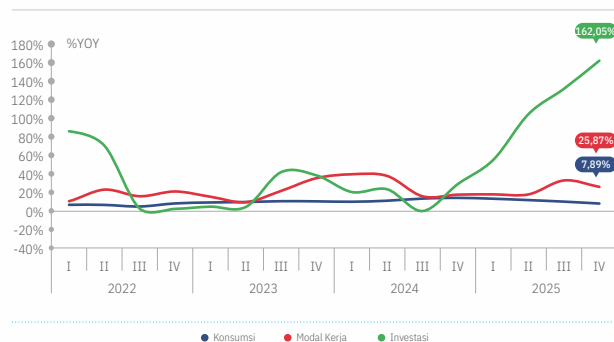
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel IV.3. Klasifikasi Penyaluran Kredit Kaltara Berdasarkan Nilai

Kredit	Nominal Kredit (Milyar)	% Nominal	Jumlah Rekening	% Rekening
<100 JT	2.429,37	6,61%	245.661	86,75%
>100JT - 500JT	6.721,53	18,29%	34.358	12,13%
>500JT - 1 M	1.060,46	2,89%	1.894	0,67%
1M-5M	1.836,05	5,00%	1.053	0,37%
>5M	24.704,03	67,22%	216	0,08%
Total	36.751,45	100,00%	283.182	100,00%

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

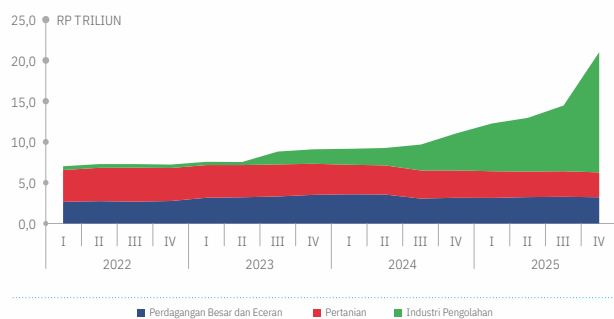
Grafik IV.9. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Jenis Penggunaan Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit pada periode berjalan turut didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit pada LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 345,77% (yoy) dan 223,17% (yoy). Peningkatan kredit ke sektor dimaksud didorong oleh terus berlanjutnya pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Utara yakni proses Pembangunan KIH1 di Tanah Kuning. Proses pembangunan ini berdampak pada pembiayaan karena pada tahap ini merupakan fase awal proyek atau fase pembiayaan. Pada fase ini, investor memulai dari proses pengadaan konstruksi, mesin, logistik, dan akses energi. Pertumbuhan penyaluran kredit pada LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan tersebut diimbangi dengan risiko kredit yang rendah dan terkendali sebagaimana tercermin dari rasio NPL yang rendah masing-masing sebesar 0,15% dan 0,03%.

Grafik IV.10. Perkembangan Kredit Kaltara Berdasarkan Lapangan Usaha



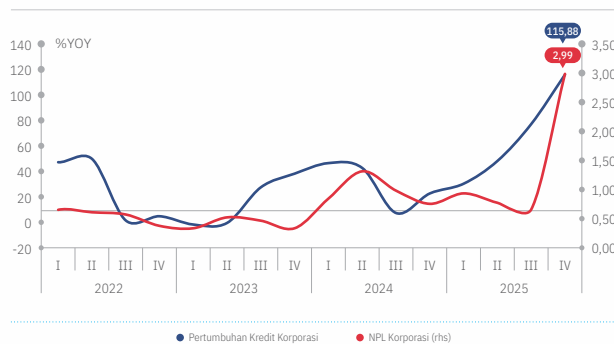
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

4.3. Pembiayaan Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi triwulan IV 2025 naik menjadi sebesar 115,88% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 77,05%. (Grafik IV.11). Akselerasi kredit korporasi terjadi seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit ke LU Industri Pengolahan serta LU Listrik, Gas, dan Air. Akselerasi kredit pada LU industri pengolahan khususnya terjadi pada subsektor kayu olahan sejalan dengan pengembangan pabrik kertas di Kaltara. Sementara itu, akselerasi penyaluran kredit pada LU listrik, gas, dan air utamanya terjadi pada subsektor listrik yakni proses Pembangunan KIH di Tanah Kuning dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta adanya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Tanjung Selor untuk memperkuat sistem kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan strukturnya, mayoritas kredit korporasi ditujukan kepada LU Industri Pengelolaan (60,85%); diikuti dengan sektor Listrik, Gas dan Air (LGA) (15,73%); dan sektor Pertanian dan Perikanan (11,73%) (Grafik IV.12).

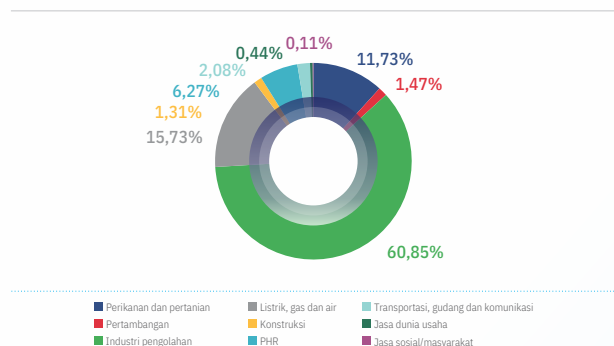
Risiko kredit korporasi Kaltara terkendali dan berada pada level yang masih aman. Hal tersebut tercermin Pada triwulan IV 2025, NPL korporasi hanya sebesar 2,99%. *Non Performing Loan* korporasi pada sejumlah sektor utama yaitu Konstruksi mulai melambat menjadi sebesar 11,10%, lebih rendah daripada periode sebelumnya sebesar 14,69%. Melambatnya kredit konstruksi sejalan dengan finalisasi proyek konstruksi bernilai besar di Kaltara, antara lain Proyek Pembangkit Listrik dan Industri Pengolahan.

Grafik IV.11. Perkembangan Kredit Korporasi Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.12. Pangsa Kredit Korporasi



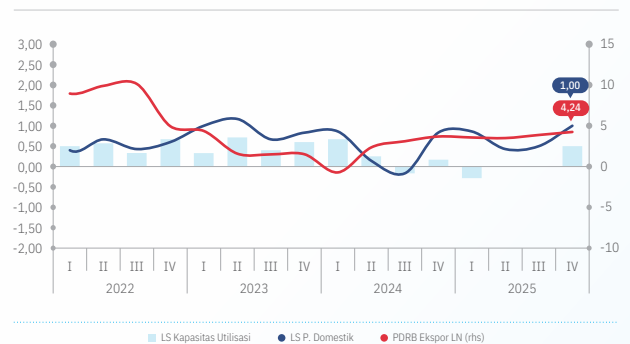
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Sejalan dengan kredit kepada korporasi yang menunjukkan peningkatan, kinerja korporasi terpantau membaik. Berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia, secara agregat *Likert Scale* (LS) kapasitas utilisasi dan permintaan domestik relatif stagnan di tengah harga batu bara yang fluktuatif (Grafik IV.13 dan IV.14).

4.4. Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

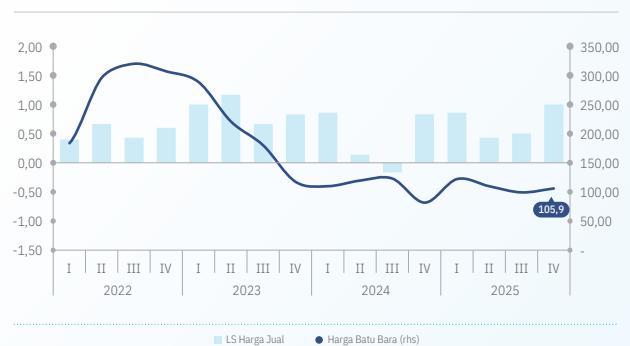
Kredit konsumsi kepada Rumah Tangga mengalami perlambatan sebesar 4,02% (yoy), hal tersebut tercermin oleh menurunnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan berkurangnya permintaan dan mobilitas masyarakat. Melemahnya pertumbuhan kredit konsumsi tersebut utamanya didorong oleh menurunnya kredit properti dari sebesar 14,31% (yoy) menjadi sebesar 13,67% (yoy). Ditambah lagi, kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB) mengalami perlambatan masing-masing sebesar 7,83% (yoy) dan -11,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 9,05% (yoy) dan -1,19% (yoy) (Grafik IV.16). Perlambatan kredit multiguna dan KKB diperkirakan sejalan dengan menurunnya konsumsi masyarakat yang berakibat pada pilihan masyarakat yang memilih konsumsi jangka pendek dan berhati-hati dalam memilih aset jangka panjang. Pada triwulan laporan, berdasarkan komposisi, kredit Rumah Tangga masih didominasi oleh kredit multiguna dengan pangsa mencapai 74,63% diikuti oleh Properti sebesar 16,46%, dan KKB sebesar 3,33%.

Grafik IV.13. LS Kap. Utilisasi, LS P. Domestik dan PDRB Ekspor LN (RHS)



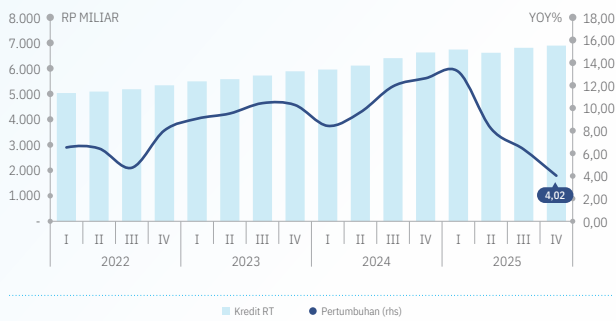
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.14. LS Harga Jual dan Harga Batu bara



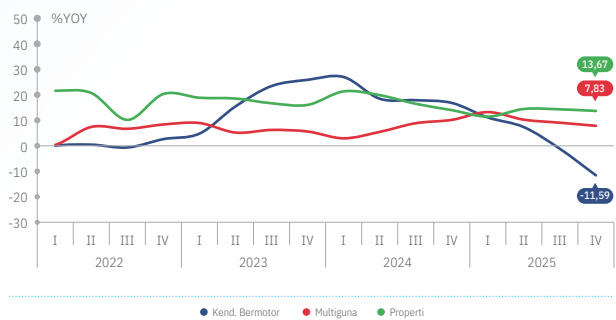
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.15. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara



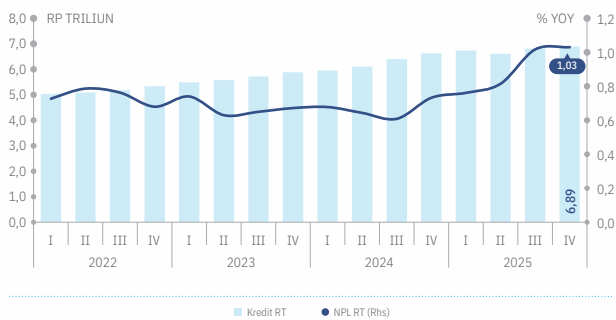
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.16. Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltara Berdasarkan Jenisnya



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.17. Perkembangan Kredit Rumah Tangga dan NPL RT Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Meskipun kredit terus tumbuh akseleratif, namun rasio NPL kredit Rumah tangga di Kaltara terjaga di level yang rendah. Rasio NPL kredit Rumah Tangga masih berada pada *level* yang rendah dan tercatat sebesar 1,03%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,02% namun masih jauh bawah ambang batas risiko (*threshold*) kredit sebesar 5%. (Grafik IV.17). Cukup stabilnya NPL rumah tangga pada level rendah didukung oleh kemampuan bayar RT Kaltara yang masih cukup baik, hal ini terindikasi dari NTP yang masih terjaga pada level tinggi, yakni sebesar 116,49 pada September 2025.

4.5. Pengembangan Akses Keuangan UMKM

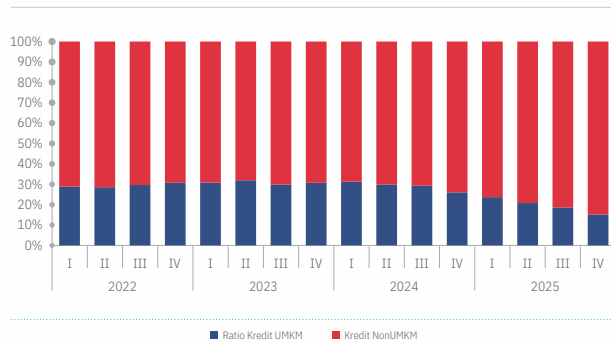
Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total pembiayaan triwulan IV 2025 mengalami perlambatan menjadi sebesar 15,20%, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 18,62% (Grafik IV.18).

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan laporan mengalami kontraksi utamanya dari jenis kredit investasi. Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terkontraksi sebesar 1,01% (yoy) (Grafik IV.19). Kredit modal kerja terkontraksi sebesar 5,25% (yoy). Kemudian, Kredit UMKM mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 7,22% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih sebesar 0,78% (yoy) (Grafik IV. 20).

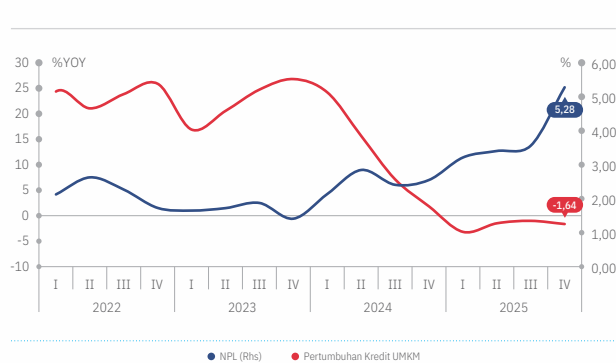
Berdasarkan pangsa jenis penggunaannya, pangsa Kredit UMKM masih didominasi modal kerja yaitu sebesar 68,44% sedangkan investasi sebesar 31,56% (Grafik IV.21). Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM masih didominasi oleh keperluan operasional. UMKM yang baru beroperasi 1-2 tahun umumnya memfokuskan pembiayaan pada kebutuhan operasional harian, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, ongkos distribusi, dan sewa tempat usaha. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk investasi umumnya masih dipenuhi melalui modal sendiri maupun pinjaman dari lembaga keuangan non-bank dan pihak non-lembaga keuangan. Jika berdasarkan Lapangan Usaha (LU), kredit UMKM paling besar disalurkan ke LU Perdagangan Hotel Restoran (PHR) mencapai 49,85% dari total kredit UMKM, diikuti oleh LU Pertanian dan Perikanan yang mencapai 26,49% dari total kredit UMKM. (Grafik IV.22)

Peningkatan penyaluran Kredit kepada UMKM sejalan dengan LU Pertanian yang tumbuh dari sebesar 4,70% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 5,71% (yoy) pada triwulan IV 2025. Meskipun kredit UMKM total mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa LU kredit UMKM yang mencatatkan penurunan dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan kredit yang signifikan terjadi pada UMKM sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 1,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,83% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM ke LU Industri pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 12,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -16,63% (yoy).

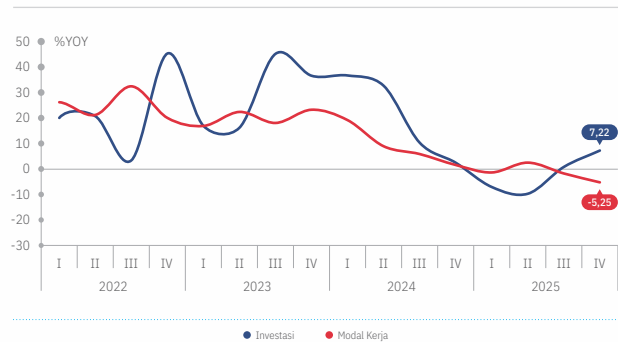
Risiko kredit UMKM meningkat berasal dari NPL kredit investasi. Pada triwulan IV 2025, rasio NPL kredit UMKM relatif tinggi sebesar 5,28%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

Grafik IV.18. Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltara

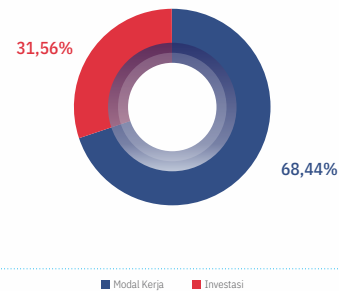
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.19. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.20. Perkembangan Kredit UMKM Kaltara Berdasarkan Jenisnya

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.21. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Kaltara

Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

sebesar 3,56%. Tekanan pada kualitas kredit ini terutama bersumber dari NPL Kredit Modal Kerja sebesar 3,65% sedangkan NPL Kredit Investasi sebesar 7,91% yang masih dalam tahap pemulihan. Sementara itu berdasarkan lapangan usaha, kenaikan juga terjadi pada LU Pertanian dan LU Jasa Keuangan yang masing-masing sebesar 20,06% dan 5,78%.

Bank Indonesia berupaya memperkuat penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Ketentuan ini mengatur pemberian Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank yang

menyalurkan kredit atau pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) serta pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro (Umi). Melalui implementasi kebijakan tersebut, Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan peran perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif, khususnya pembiayaan UMi di berbagai daerah.

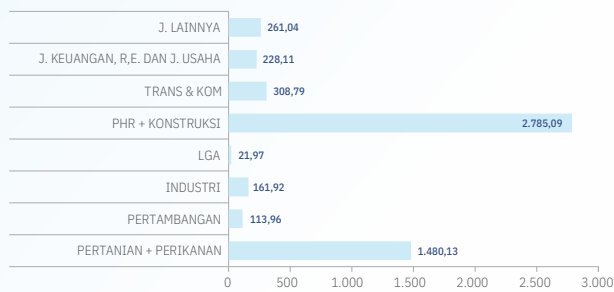
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan berkontraksi sebesar 7,98% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,19% (yoy).

Tabel IV.4. Akses Keuangan UMKM Binaan dan Mitra KPw BI Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Usaha	Wilayah	Jumlah Usaha Binaan BI		Pinjaman (Rupiah)		Keterangan
		III 2025	IV 2025	III 2025	IV 2025	
Non Pertanian	Kota Tarakan	8	6	Rp808.515.000	Rp748.415.000	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	2	2	Rp171.000.000	Rp166.500.000	Perbankan
	Kabupaten Malinau	3	3	Rp396.000.000	Rp368.000.000	Perbankan
Pertanian	Kota Tarakan	1	4	Rp-	Rp50.000.000	Perbankan
	Kabupaten Bulungan	2	3	Rp-	Rp-	
	Kabupaten Malinau	1	1	Rp28.000.000	Rp23.500.000	Perbankan
Total		17	19	Rp1.403.515.000	Rp1.356.415.000	

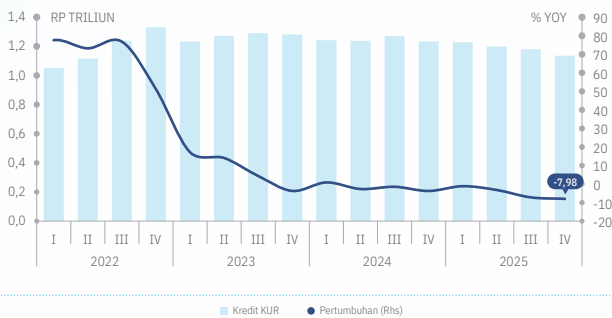
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.22. Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.23. KUR Kaltara



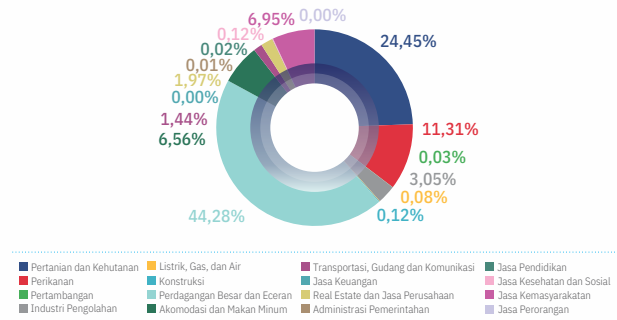
Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Nominal penyaluran KUR mencapai sebesar Rp1,135 Triliun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan II 2025 sebesar Rp1,180 Triliun. (Grafik IV.23).

Berdasarkan komposisi, sektor terbesar penerima KUR adalah perdagangan besar dan eceran dengan pangsa mencapai 44,28% diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan sebesar 24,45%, dan perikanan sebesar 10,91% (Grafik IV.24). Secara spasial, pangsa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 38,43%, diikuti oleh Kota Tarakan yang mencapai 29,71%, dan Kabupaten Bulungan mencapai 21,23%. (Grafik IV.25)

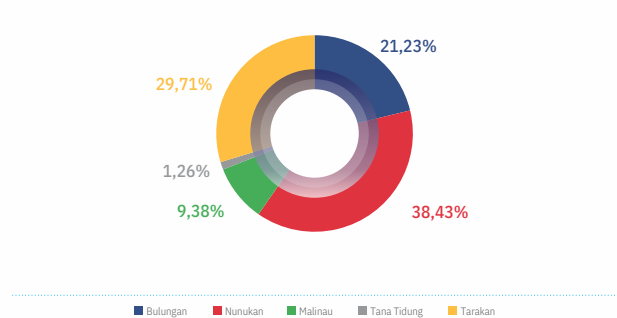
Dalam upaya mendorong UMKM berbasis ekonomi lokal agar menjadi kekuatan baru bagi perekonomian daerah, Bank Indonesia menerapkan strategi pengembangan UMKM secara *end-to-end* melalui percepatan pemanfaatan teknologi digital

Grafik IV.24. Komposisi KUR Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.25. Komposisi KUR Berdasarkan Kab/Kota di Kaltara



Sumber : LBU Bank Indonesia, diolah

serta perluasan akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan. Strategi tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada tiga pilar utama Strategi Nasional Pengembangan UMKM, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.

Terdapat 19 usaha yang terdaftar menjadi UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara yang terbagi menjadi 11 usaha non pertanian dan 8 usaha pertanian. Jumlah pembiayaan yang didapatkan oleh UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia mengalami kontraksi sebesar 3,36% (yoy) dengan nominal Rp1,36 miliar dari sebelumnya Rp1,40 miliar. Secara spasial, pembiayaan UMKM binaan Bank Indonesia terbesar di Kota Tarakan sebesar Rp748,4 juta, diikuti Kabupaten Malinau sebesar Rp368 juta, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp166,5 juta. (Tabel IV.4).

BOKS 3

Sinergi Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2025: Memperkuat Kapabilitas UMKM, Pelestarian Budaya, dan Ketangguhan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Karya Kreatif Benuanta (KKB) 2025 sebagai *flagship event* tahunan yang mengusung tema “UMKM Maju, Budaya Lestari, Ekonomi Tangguh”. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 sekaligus wujud dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Diselenggarakan pada 31 Oktober hingga 2 November 2025 di Tarakan Art Convention Center (TACC), KKB 2025 bertujuan untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM unggulan, serta memperkuat pelestarian budaya lokal sebagai *value proposition* ekonomi daerah.

Rangkaian KKB 2025 resmi dibuka melalui *Opening Ceremony* pada Jumat, 31 Oktober 2025, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Wali Kota Tarakan, dan Deputi Kepala KPwBI Provinsi Kalimantan Utara. Acara pembukaan dimeriahkan dengan penampilan Tarian Daerah Tidung Pesisir, dan Pagelaran Wastra Kaltara bertajuk “Warisan, Kreativitas dan Kebanggaan Kaltara”.

Pelaksanaan KKB 2025 terbagi ke dalam tiga agenda utama, yakni *Fair*, *Forum*, dan *Competition*. Agenda *Fair* menampilkan *showcase* UMKM melalui Pameran/Bazar UMKM Unggulan Kaltara, Gerakan Pangan Murah (GNPIP),

Festival Jajanan Benuanta, serta penyediaan layanan publik komprehensif seperti sertifikasi halal, layanan perbankan, aktivasi *Coretax*, edukasi CBP Rupiah dan QRIS, hingga kegiatan donor darah.

Guna mengakselerasi peningkatan kapasitas pelaku usaha, agenda Forum menghadirkan serangkaian kegiatan edukasi strategis. Pertama, **Sekolah Jago Ekspor** yang bertujuan meningkatkan literasi ekspor, kapasitas manajerial, serta pemenuhan standar kualitas dan sertifikasi internasional bagi UMKM lokal. Kedua, **Talkshow Gaskeun UMKM** yang difokuskan untuk memberdayakan pelaku usaha dengan pengetahuan dan akses langsung ke sumber pembiayaan perbankan. Ketiga, **Seminar Hak Kekayaan Intelektual** untuk memberikan pemahaman esensial mengenai perlindungan Merek dan Hak Cipta sebagai aset tak berwujud untuk meningkatkan daya saing UMKM. Keempat, **Bincang Digitalisasi (Kaltara Go Digital)** yang bertujuan memperluas literasi *Intelligent Transport Systems* dan mengakselerasi implementasi pembayaran digital (QRIS) pada moda transportasi publik. Rangkaian forum juga diperkaya dengan **Rembuk Kopi Kaltara** untuk membangun ekosistem dan identitas kopi lokal, serta **Demo Masak Kreasi Pangan Lokal** bersama *chef* profesional untuk mendorong inovasi komoditas pangan daerah.

Karya Kreatif Benuanta 2025
UMKM Maju, Budaya Lestari, Ekonomi Tangguh
31 Oktober - 2 November 2025
Tarakan Art Convention Center (TACC), Tarakan
GRATIS
LIVE STREAMING
Saksikan Melalui Youtube : Bank Indonesia Kaltara

Day 1	31 Oktober 2025	Day 2	1 November 2025	Day 3	2 November 2025
08.30	Opening Ceremony	08.00	Zumba Party	08.30	Rembuk Kopi Kaltara & Final Coffee Competition
13.00	Sekolah Jago Ekspor	08.30	Demo Masak Kreasi Pangan Lokal Benuanta	08.30	Final Lomba Kreasi Tirta Daerah
15.30	Bukarasi Ekonomik Kawasan Industri	10.00	Seminar Hak Cipta & Merek	10.00	Puncak KKB 2025
16.30	Pameran Bazar Lokal	10.30	Talkshow Pembiayaan Usaha UMKM	10.30	Festival KKB 2025
18.30	Benefit & Sport Competition	10.30	Bincang Digitalisasi		
		10.30	Final & Sport Competition (Mobile Legend)		

MAIN STAGE MINI STAGE / OUTDOOR

Bank_Indonesia_Kaltara Bank Indonesia Kalimantan Utara

BOKS 3

Lebih lanjut, agenda *Competition* diselenggarakan untuk menjaring talenta dan kreativitas masyarakat, yang mencakup: i) **E-Sport Competition (Mobile Legend)** sebagai wadah pencarian atlet *e-sport* terbaik Kaltara yang melibatkan partisipasi generasi muda dengan total 69 tim pendaftar; ii) **Lomba Tari Tradisional Kreasi Nusantara** yang diwajibkan menampilkan unsur budaya Kaltara, diikuti oleh 31 peserta; iii) **Cultural Video Competition** yang bertujuan mempromosikan budaya lokal, inovasi UMKM, serta edukasi CBP Rupiah dan PeKA, dengan 39 karya video; serta iv) **Coffee Bean dan Latte Art Competition** untuk memetakan kualitas biji kopi khas Kaltara dan meningkatkan kompetensi barista lokal.

Puncak acara KKB 2025 diselenggarakan pada Minggu, 2 November 2025. Dalam *Keynote Speech*-nya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyampaikan apresiasi atas sinergi solid antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi, mendorong digitalisasi sistem pembayaran, dan memperkuat sumber

pertumbuhan ekonomi baru. KKB 2025 dinilai sebagai wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM Kaltara agar berdaya tahan dan berdaya saing global, dengan dukungan kolaboratif dari 33 Kementerian/Lembaga serta partisipasi lebih dari 156 pengusaha UMKM.

Penyelenggaraan KKB 2025 mencetak capaian outcome yang sangat positif. Antusiasme masyarakat meningkat drastis dengan total pengunjung menembus angka 51.000 orang, jauh melampaui capaian 10.000 pengunjung pada tahun sebelumnya. Transaksi pameran *offline* maupun online mencatatkan *omzet* UMKM sebesar Rp3,49 miliar. Dari sisi intermediasi keuangan, penyaluran kredit perbankan kepada UMKM sepanjang periode KKB mencapai Rp10,97 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Rp2,1 miliar pada tahun sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini sukses merealisasikan *business matching* berupa penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dbaloy Corp Indonesia dengan buyer untuk produk olahan perikanan, dengan total komitmen transaksi mencapai Rp1 miliar untuk periode dua tahun ke depan.



Gambar 1 Highlight Rangkaian Kegiatan KKB 2025



Gambar 2 Highlight penutupan KKB 2025



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada Triwulan IV 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Transaksi SKNBI meningkat secara triwulanan meskipun secara tahunan masih mengalami kontraksi, sementara transaksi BI-RTGS tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan tetap kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar di Kalimantan Utara. Aliran uang kartal mencatatkan *net outflow* sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai masyarakat pada periode akhir tahun, sementara distribusi Uang Layak Edar (ULE) terus dilakukan sebagai implementasi *Clean Money Policy* (CMP) yang disertai edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah. Dari sisi digitalisasi, jumlah pengguna dan *merchant* QRIS terus meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah, serta kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid dengan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara berada pada tahap Digital.

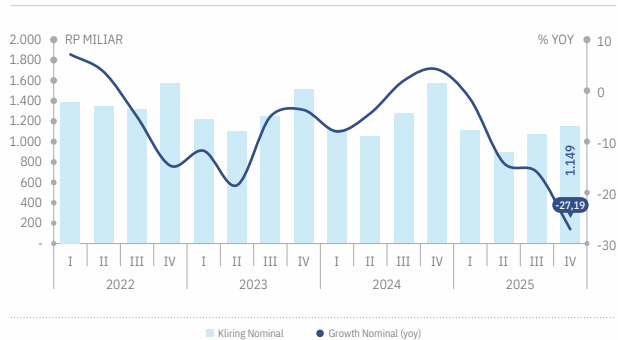
5.1 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Non Tunai

Volume transaksi SKNBI di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -29,52% (yoy), menurun dari 30.886 transaksi pada triwulan IV 2024 menjadi 21.782 transaksi. Namun demikian, secara triwulanan volume transaksi menunjukkan peningkatan sebesar 2,70%, dari 21.210 transaksi pada triwulan III 2025 menjadi 21.782 transaksi pada triwulan IV 2025 (Grafik V.2).

Sementara itu, nominal transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar -27,19% (yoy), melanjutkan perlambatan yang terjadi pada triwulan III 2025 sebesar -15,99% (yoy). Meskipun tekanan tahunan masih berlanjut, secara triwulanan nominal transaksi SKNBI meningkat, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,15 triliun pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun (Grafik V.1). Perlambatan tersebut sejalan dengan berlanjutnya pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien, seperti *mobile banking*, dompet elektronik, dan BI-FAST, sehingga penggunaan mekanisme kliring konvensional relatif menurun.

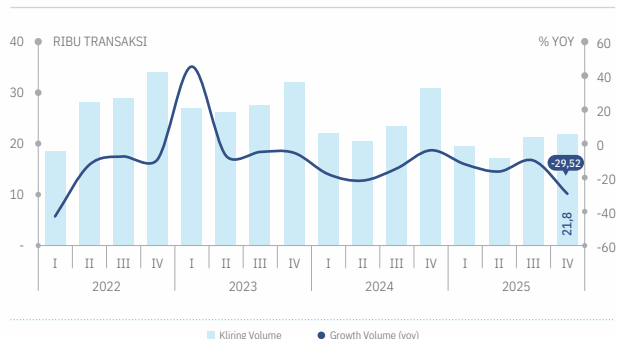
Pada triwulan IV 2025, transaksi BI-RTGS di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume. Nominal transaksi tercatat sebesar

Grafik V.1. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltara



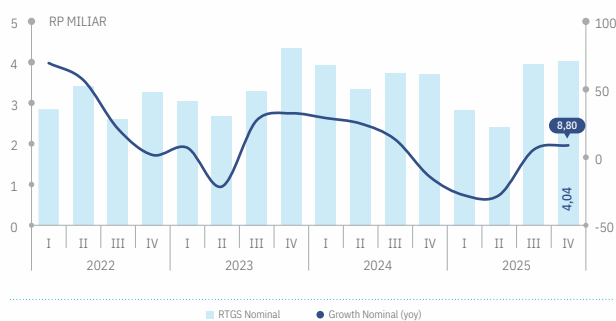
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V.2. Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltara



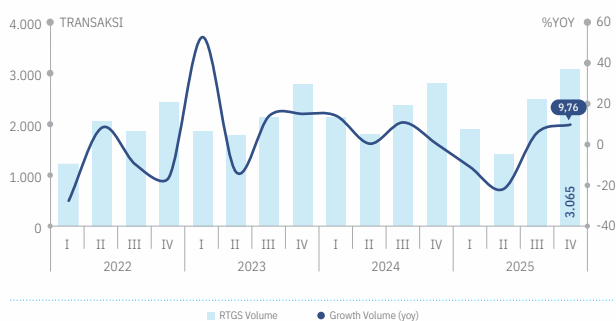
Sumber : Bank Indonesia

Grafik V.3. Perkembangan Nominal BI-RTGS Kaltara



Sumber : Bank Indonesia

Grafik V.4. Perkembangan Volume BI-RTGS Kaltara



Sumber : Bank Indonesia

Rp4,04 triliun, tumbuh 8,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, volume transaksi juga meningkat menjadi 3.065 transaksi atau tumbuh 9,76% (yoy). Peningkatan ini mengindikasikan tetap kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar melalui BI-RTGS, khususnya untuk kebutuhan pembayaran antarbank dan korporasi yang memerlukan penyelesaian secara *real time*.

5.2 Pengelolaan Uang Rupiah

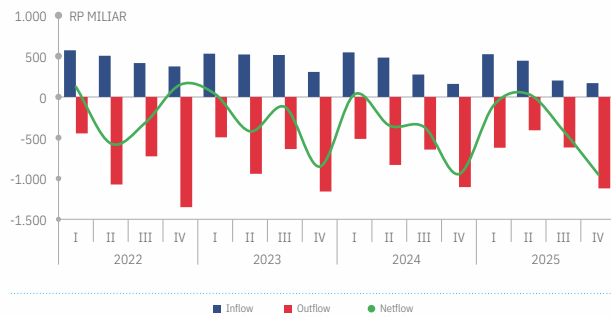
Aliran Uang Masuk/Keluar (*Outflow/Inflow*)

Transaksi perkas Bank Indonesia pada triwulan IV 2025 mencatat *net outflow* sebesar Rp-952.056 miliar. Perkembangan ini sama dengan kondisi triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow*. *Net outflow* tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan uang kartal di masyarakat.

Uang Pecahan Besar (UPB) yaitu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000, menjadi denominasi yang paling dominan dalam aliran uang kartal di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025, baik dari sisi *outflow* maupun *inflow*.

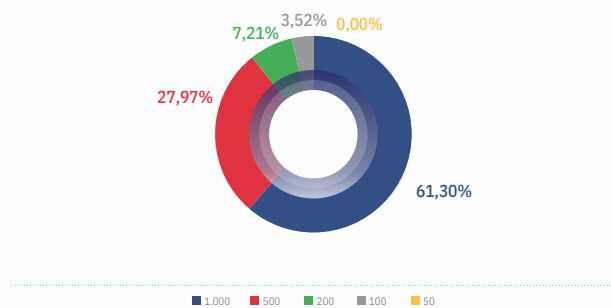
Dari sisi *outflow* uang kertas pada triwulan IV 2025, pecahan Rp100.000 kembali menjadi pecahan dengan distribusi terbesar, mencapai Rp766,87 miliar. Pecahan Rp50.000 juga mencatat kontribusi signifikan dengan nilai Rp335,54 miliar, diikuti pecahan Rp20.000 sebesar Rp10,11 miliar dan

Grafik V.5. Perkembangan Aliran Uang Keluar/Masuk



Sumber Bank Indonesia

Grafik V.7. Denominasi Outflow Uang Logam Kaltara Triwulan IV 2025



Sumber Bank Indonesia

Rp10.000 sebesar Rp5,40 miliar. Sementara itu, pecahan Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 masing-masing berkontribusi relatif kecil terhadap total *outflow* uang kertas. Dengan demikian, distribusi uang kartal masih didominasi oleh pecahan besar yang umumnya digunakan untuk kebutuhan transaksi bernilai tinggi.

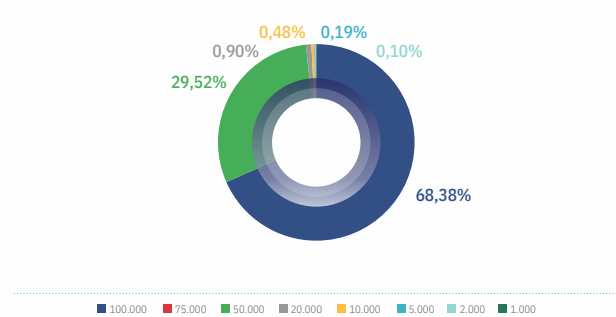
Dari sisi *inflow*, pecahan besar juga masih mendominasi. Pecahan Rp100.000 tercatat dengan nilai Rp95,78 miliar, diikuti pecahan Rp50.000 sebesar Rp70,88 miliar. Pecahan lainnya, yaitu Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, memberikan kontribusi yang jauh lebih kecil terhadap total inflow uang kertas pada triwulan IV 2025 (Grafik V.8).

Khusus untuk uang logam (UL), pecahan Rp1.000 tetap mendominasi arus outflow dengan nilai Rp160,00 juta. *Outflow* pecahan Rp500 tercatat sebesar Rp73,01 juta, diikuti pecahan Rp200 sebesar Rp18,81 juta dan Rp100 sebesar Rp9,20 juta, sementara pecahan Rp50 tidak mencatat *outflow* pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan uang logam di masyarakat masih terkonsentrasi pada pecahan terbesar (Grafik V.7).

Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)

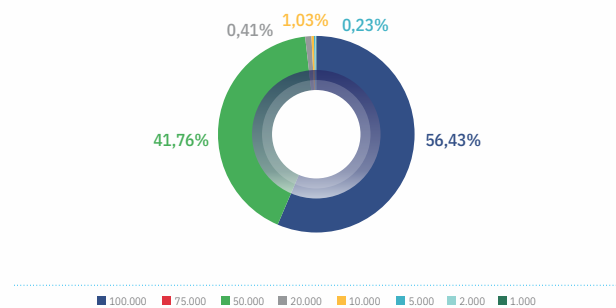
Dalam rangka mengendalikan peredaran uang kartal serta memastikan uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi baik dan cukup, KPwBI Provinsi Kaltara terus melakukan

Grafik V.6. Denominasi Outflow Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025



Sumber Bank Indonesia

Grafik V.8. Denominasi Inflow Uang Kartal Kaltara Triwulan IV 2025



Sumber Bank Indonesia

penyediaan Uang Layak Edar (ULE) melalui perbankan di seluruh Provinsi Kalimantan utara. Selain itu, KPwBI Kaltara juga melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat. Beberapa kegiatan pendukung Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar di antaranya melalui kegiatan Kas Keliling dan Kas Titipan yang tersebar hampir di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Kas Keliling

Salah satu layanan kas luar kantor yang dilakukan oleh KPwBI Kaltara adalah Kas Keliling yaitu kegiatan penukaran uang oleh unit kerja operasional kas kepada masyarakat, bank, atau pihak lain dengan menggunakan sarana angkutan. Kas keliling dibagi menjadi 2 (dua) layanan yaitu kas keliling dalam kota dan kas keliling luar kota. Kas keliling dalam kota merupakan kegiatan layanan kas luar kantor untuk melayani penukaran kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh bank umum.

Kas Keliling Dalam Kota (KKDK)

Kegiatan Kas Keliling Dalam Kota (KKDK) di Kota Tarakan sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, sesuai dengan sebaran titik lokasi di empat wilayah kecamatan utama. Wilayah kegiatan KKDK mencakup Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan

Layanan kas keliling turut juga dilakukan di luar kota dengan tujuan menjangkau masyarakat Provinsi Kaltara yang berada di luar wilayah Kota Tarakan seperti wilayah Kecamatan Sebatik dan Seimenggaris.

Kas Titipan

KPwBI Provinsi Kaltara memiliki 3 (tiga) Kas Titipan yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Pengelolaan kas titipan (Kastip) tersebut dilakukan oleh kantor cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kalimantan Utara (BPD Kaltimtura). Untuk Kastip di Tanjung Selor, BPD Kaltimtura cabang Tanjung Selor bekerjasama dengan 6 (enam) bank peserta lainnya (Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Danamon) mengedarkan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah terpencil. Sementara itu, untuk Kastip di Kab. Malinau, BPD Kaltimtura cabang Malinau mengelola kas titipan Bank Indonesia bersama dengan 3 (tiga) bank peserta yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Untuk Kastip di Kab. Nunukan, BPD Kaltimtura cabang Nunukan bekerjasama dengan 4 (empat) bank peserta mengelola kas titipan Bank Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.

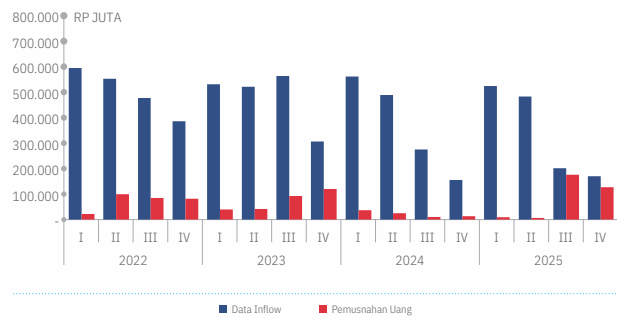
Selama triwulan IV 2025, KPwBI Provinsi Kaltara telah melakukan proses dropping ke Kas Titipan Bank Indonesia pada tiga wilayah, yaitu Tanjung Selor, Malinau, dan Nunukan, dengan total nominal sebesar Rp435,56 miliar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp223,19 miliar.

Penarikan Uang Tidak Layak Edar dan Pemusnahan Uang Rupiah

Selain memenuhi kebutuhan penukaran Uang Layak Edar (ULE), uang yang ditukarkan oleh masyarakat di KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mencakup Uang Tidak Layak Edar (UTLE), meliputi uang rusak, lusuh, cacat, serta uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Dalam rangka menjaga kualitas uang beredar (*clean money policy*), KPwBI Provinsi Kaltara secara rutin melakukan pemusnahan UTLE yang diterima dari perbankan maupun masyarakat umum melalui layanan penukaran dan kas keliling.

Pada triwulan IV 2025, nilai UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp127,01 miliar, menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp176,14 miliar (qtd). Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya volume UTLE yang masuk pada periode tersebut, di mana nilai inflow UTLE juga menurun dari Rp201,48 miliar pada triwulan III 2025 menjadi Rp169,74 miliar pada triwulan IV 2025.

Grafik V.9. Penyediaan Uang Rupiah Layak Edar (ULE)



Sumber Bank Indonesia

Rasio pemusnahan UTLE terhadap inflow pada triwulan IV 2025 tetap berada pada level tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar uang tidak layak edar yang diterima berhasil diproses dan dimusnahkan. Hal ini mencerminkan konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat. Melalui proses penarikan dan pemusnahan UTLE yang berkelanjutan, Bank Indonesia terus memastikan bahwa uang Rupiah yang beredar merupakan uang layak edar sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara nyaman dan aman menggunakan uang tunai.

Temuan Uang Palsu (UPAL)galian

Selama periode triwulan IV 2025, terdapat temuan Uang Palsu (UPAL) pada pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Upaya tersebut juga ditopang melalui peningkatan edukasi CBP Rupiah kepada masyarakat serta penguatan kerja sama dengan perbankan, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), perangkat masyarakat di daerah, dan *stakeholders* terkait lainnya.

Cinta, Bangga, Paham Rupiah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap rupiah, KPwBI Provinsi Kaltara senantiasa melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan aparaturnegara yang terdiri dari lembaga pendidikan, komunitas, perangkat kecamatan/kelurahan/desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan slogan Cinta, Bangga, Paham Rupiah. KPwBI Provinsi Kaltara telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan edukasi mengenai CBP Rupiah kepada berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari sektor pendidikan, sektor masyarakat, hingga sektor komunitas strategis. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan pengetahuan mengenai CBP Rupiah, mulai dari pengenalan ciri keaslian Rupiah hingga mekanisme penukaran uang rusak dapat semakin dipahami oleh masyarakat.

5.3 Perkembangan QRIS

Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai di wilayah Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan seiring dengan perluasan ekosistem dan edukasi transaksi digital. Hingga triwulan IV 2025, jumlah penduduk Kaltara yang telah menggunakan QRIS mencapai 131.252 pengguna, meningkat dari 127.361 pengguna pada triwulan III 2025 atau bertambah sebanyak 1.673 pengguna atau 3,06% (qtq). Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya ketertarikan masyarakat dalam memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk mendukung berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.

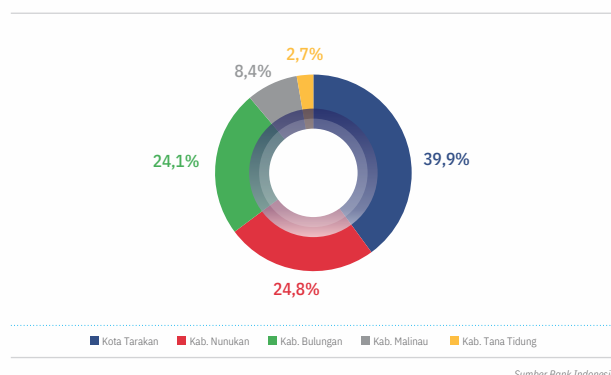
Dalam rangka memperluas penggunaan QRIS secara merata, KPwBI Kaltara melakukan upaya perluasan edukasi penggunaan QRIS ke berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program maupun kolaborasi kegiatan dengan *stakeholders* lainnya.

Peningkatan jumlah pengguna QRIS di wilayah Kaltara diikuti oleh meningkatnya jumlah merchant QRIS yang tercermin pada kenaikan *National Merchant Repository* (NMR) pada triwulan IV 2025. Hingga Desember 2025, jumlah *merchant* QRIS di Kaltara tercatat 112.826 merchant, dengan total penambahan 17.457 merchant sejak awal tahun, mengindikasikan terus meluasnya akseptasi QRIS di berbagai sektor usaha.

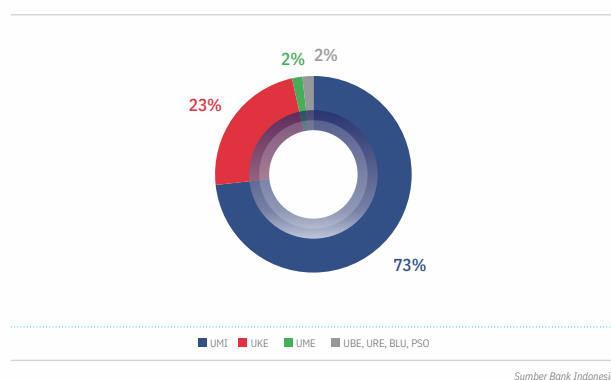
Distribusi *merchant* QRIS di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 terpusat di Kota Tarakan dengan jumlah merchant sebesar 45.070 atau 39,9% dari total merchant. Kabupaten Nunukan dan Bulungan menyusul dengan pangsa masing-masing 24,8% dan 24,1%, mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan perdagangan di kedua wilayah tersebut.

Sementara itu, Kabupaten Malinau dan Tana Tidung mencatat pangsa yang lebih kecil, masing-masing sebesar 8,4% dan 2,7%. Meskipun kontribusinya relatif lebih rendah, kedua kabupaten tersebut tetap menunjukkan pertumbuhan *merchant* sepanjang

Grafik V.10. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara



Grafik V.11. Kontribusi *Merchant* QRIS berdasarkan Kategori di Provinsi Kalimantan Utara



2025, sejalan dengan upaya KPwBI Kaltara memperluas akseptasi pembayaran digital ke wilayah perbatasan dan pedesaan.

Selain itu, *merchant* QRIS kategori Usaha Mikro (UMI) masih mendominasi dengan pangsa sebesar 73,27%. Adapun merchant kategori Usaha Kecil (UKE) berkontribusi sebesar 23,23%, diikuti kategori Usaha Menengah (UME) sebesar 1,71% serta kategori lainnya (UBE, URE, BLU, dan PSO) sebesar 1,79%. Komposisi ini menunjukkan bahwa QRIS berperan penting dalam mendukung digitalisasi transaksi pada segmen usaha mikro dan kecil di Kalimantan Utara.

Tabel V.1. Perkembangan NMR Provinsi Kaltara

Wilayah	NMR Selama 2022 (Jan - Des 2022)	NMR Selama 2023 (Jan-Des 2023)	NMR Selama 2024 (Jan-Des 2024)	NMR Kumulatif 2025 (Jan-Des 2025)	NMR Kumulatif 2019 - 2025*	Share Prov (Per 2025*)
Kota Tarakan	12.052	8.668	7.666	1.423	45.070	39,9%
Kab. Nunukan	6.443	6.289	3.634	5.614	28.017	24,8%
Kab. Bulungan	3.799	6.465	4.362	7.338	27.136	24,1%
Kab. Malinau	2.097	2.585	1.079	2.324	8.823	8,4%
Kab. Tana Tidung	712	500	512	758	3.071	2,7%
Total Prov. Kaltara	25.103	24.507	17.253	17.457	112.826	100,00%

Sumber : Bank Indonesia

5.4 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kalimantan Utara

Perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), Presiden mewajibkan Pemda untuk membentuk TP2DD. Tim ini merupakan forum koordinasi untuk mengakselerasi perluasan ETPD, baik di sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan data Indeks ETPD Semester II Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara kembali menunjukkan kinerja yang solid dalam percepatan transformasi digital (Tabel V.2). Seluruh pemerintah daerah mencatat skor pada rentang 93,3% hingga 97,8%, dan seluruhnya telah berada pada tahap Digital. Capaian ini mencerminkan komitmen konsisten dari Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara dalam memperluas dan meningkatkan implementasi ETPD di daerah, sekaligus kesinambungan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel V.2. Perkembangan Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Utara

Pemerintah Daerah	SM-I 2025		SM-II 2025	
	Skor	Tahap	Skor	Tahap
Provinsi Kalimantan Utara	97,80%	Digital	97,80%	Digital
Kota Tarakan	95,80%	Digital	95,50%	Digital
Kabupaten Bulungan	95,00%	Digital	93,50%	Digital
Kabupaten Malinau	93,30%	Digital	94,40%	Digital
Kabupaten Nunukan	83,60%	Digital	94,30%	Digital
Kabupaten Tana Tidung	94,80%	Digital	93,30%	Digital

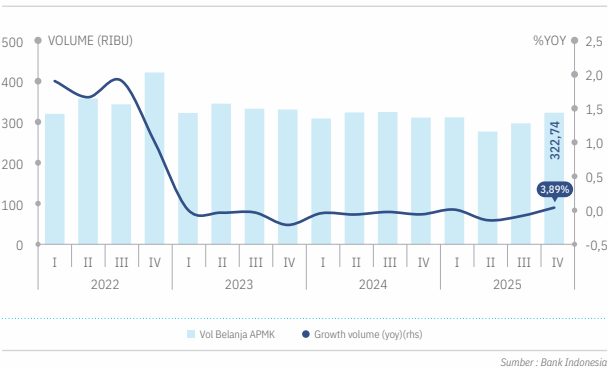
Sumber: Bank Indonesia

5.5 Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Volume transaksi APMK tercatat sebesar 322,74 ribu transaksi atau tumbuh 3,89% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2024 (Grafik V.13).

Peningkatan ini mencerminkan masih terjaganya penggunaan instrumen berbasis kartu di tengah semakin berkembangnya preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital nonkartu seperti mobile banking, dompet elektronik, dan QRIS yang semakin dominan dalam ekosistem pembayaran ritel.

Grafik V.12. Perkembangan APMK



Sumber : Bank Indonesia

BOKS 4

Kaltara Digital QRIS (KATALIS) Bendindang Tahun 2025

KPwBI Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pariwisata Kota Tarakan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan telah melaksanakan rangkaian kegiatan KATALIS Bedindang di Museum Sejarah Kota Tarakan sebagai bagian dari *pre-event* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Tahun 2025. KATALIS Bedindang Tahun 2025 bertujuan memperluas literasi digital masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui perlombaan kreatifitas yang dibungkus dengan kampanye Bank Indonesia untuk memperkuat literasi masyarakat terkait pembayaran menggunakan kanal QRIS, edukasi Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, serta pemahaman kampanye Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah.

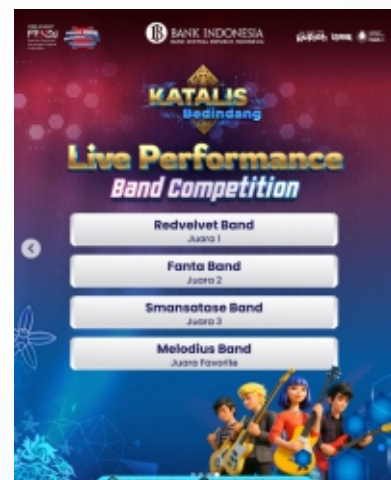
Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Wesky Putra Pratama, pada sambutannya menyampaikan bahwa, “KATALIS Bedindang Tahun 2025 lebih dari sekadar acara seni dan edukasi, acara ini diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi perekonomian Tarakan. Peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dapat memperkuat efisiensi perdagangan, mendorong pertumbuhan UMKM lokal, menarik kunjungan wisatawan, serta memacu daya saing daerah sebagai pusat ekonomi kreatif.”

KATALIS Bedindang Tahun 2025 menghadirkan beberapa kompetisi yang menjadi wadah seni kreatif anak muda Provinsi Kalimantan Utara, antara lain:



Gambar Boks V.1.1.1 Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Live Performance Band KATALIS Bedindang Tahun 2025

- 1) Lomba *Live Performance Band* untuk pelajar kelas 1-3 SMA/SMK/Sederajat se-Kalimantan Utara untuk menjangkit potensi band dari pelajar se-Kaltara yang disandingkan dengan edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, dan CBP Rupiah diantara penampilan peserta.
- 2) Lomba *Jingle* bertema QRIS, Pelindungan Konsumen, dan CBP Rupiah yang akan digunakan sebagai medium kampanye kreatif secara *online* maupun *offline* dari KPwBI Provinsi Kalimantan Utara.
- 3) Lomba *IG Reels* dengan tema Wisata Kota Tarakan yang sudah menerima QRIS untuk mendorong partisipasi digital masyarakat dalam berwisata lokal serta melakukan transaksi digital melalui QRIS.



Gambar Boks V.1.2 Daftar Pemenang KATALIS Bedindang Tahun 2025

BOKS 4

Selain kompetisi, KATALIS Bedindang tahun 2025 juga mengadirkan *coaching clinic* bersama musisi profesional, yakni Ray Prasetya, dengan pembayaran biaya pendaftaran melalui QRIS dan didonasikan untuk mendukung pengembangan museum sebagai sarana edukasi, rekreasi publik, serta peleksatarin sejarah kota Tarakan. Adapun jumlah pengunjung acara, tercatat sebanyak 590 orang dengan melakukan QRIS *Experience* (registrasi scan QRIS Rp80) sebelum memasuki area KATALIS Bedindang.

Melalui penyelenggaraan KATALIS Bedindang Tahun 2025, Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Utara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kreativitas generasi muda yang hadir dalam kegiatan ini bukan hanya mencerminkan potensi besar daerah, tetapi juga menjadi energi baru dalam mendorong adopsi pembayaran digital, literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.





Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan. *Gini Ratio* Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada triwulan IV 2025 tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan semakin membaik.

6.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, persepsi responden di Kalimantan Utara terhadap kondisi pasar kerja pada triwulan IV 2025 menunjukkan pelemahan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja enam bulan yang lalu tercatat sebesar 107,74, turun 3,77% (yoy) dibandingkan 111,96 pada triwulan IV 2024 (Grafik VI.1).

Sementara itu, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pasar kerja ke depan juga mengalami penurunan terbatas, meskipun tetap berada pada level optimis. Indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang tercatat sebesar 136,57, lebih rendah dibandingkan 138,62 pada periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 1,48% (yoy). Namun demikian, indeks yang masih berada di atas 100 mengindikasikan bahwa masyarakat secara umum tetap optimis terhadap prospek perbaikan kondisi pasar kerja dalam enam bulan ke depan (Grafik VI.1).

Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2.099 orang, dari 393.704 orang pada Agustus 2024 menjadi 395.803 orang pada Agustus 2025. Peningkatan tersebut diikuti oleh bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 2.211 orang, dari 378.361 menjadi 380.572 orang.

Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran menurun sebesar 112 orang, dari 15.343 orang pada Agustus 2024 menjadi 15.231 orang pada Agustus 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun 0,05% (yoy), dari 3,90% menjadi 3,85%, didorong oleh membaiknya serapan tenaga kerja di beberapa lapangan usaha utama.

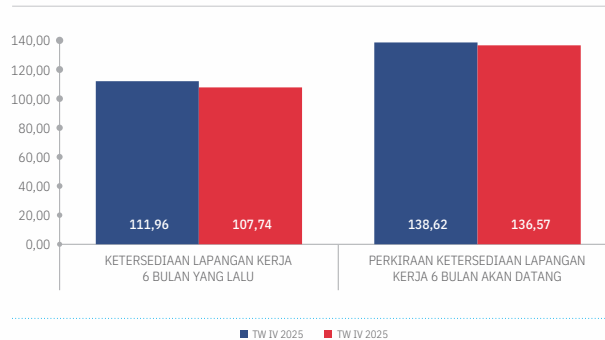
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sedikit melemah sebesar 0,80% (yoy), dari 70,35% menjadi 69,55%. Penurunan TPAK tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja yang bertambah 7.404 orang atau 4,46% (yoy) (Tabel VI.1).

Tabel VI.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi Kaltara

Kondisi Ketenagakerjaan	2024	2025	Pertumbuhan	
	AGS	AGS	Orang	%
Jumlah Penduduk 15+ (orang)	559.623	569.126	9.503	0,02
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	393.704	395.803	2.099	0,01
Jumlah Bekerja (orang)	378.361	380.572	2.211	0,01
Jumlah Penganggur (orang)	15.343	15.231	-112	-0,01
Bukan Angkatan Kerja (orang)	165.919	173.323	7.404	0,04
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, %)	70,35	69,55	-0,80	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90	3,85	-0,05	

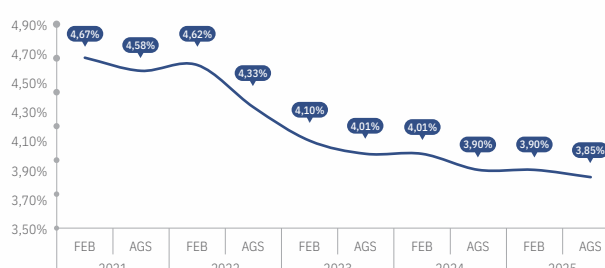
Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.1. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik VI.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kaltara



Sumber: BPS, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren perbaikan dalam lima tahun terakhir. Pada Agustus 2025, TPT tercatat sebesar 3,85%, lebih rendah dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan tersebut mencerminkan meningkatnya kapasitas penyerapan tenaga kerja dan menguatnya kondisi pasar tenaga kerja di daerah (Grafik VI.2).

Menurut lapangan usaha utama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Utara. Pada Agustus 2025, sektor ini menyerap 124.003 orang atau 32,58% dari total tenaga kerja, meningkat 2,75% (yoy) dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 120.683 orang (31,90%) (Tabel VI. 2). Peningkatan tersebut menunjukkan peran sektor primer yang tetap dominan dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

Tabel VI.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kaltara

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	120.683	31,90%	-2,0%	124.003	32,58%	2,75%
Pertambangan dan Penggalian	12.125	3,20%	15,6%	15.421	4,05%	27,18%
Industri Pengolahan	27.192	7,19%	10,9%	28.075	7,38%	3,25%
Pengadaan Air, Listrik dan Gas	3.909	1,03%	-2,3%	3.653	0,96%	-6,55%
Konstruksi	17.963	4,75%	-7,9%	19.586	5,15%	9,04%
Perdagangan Besar dan Eceran	64.547	17,06%	8,5%	58.988	15,50%	-8,61%
Transportasi dan Pergudangan	14.262	3,77%	-12,4%	13.804	3,63%	-3,21%
Akomodasi dan Makan Minum	25.959	6,86%	3,0%	24.864	6,53%	-4,22%
Informasi dan Komunikasi	1.123	0,30%	-29,7%	1.956	0,51%	74,18%
Jasa Keuangan, Real Estat, dan Asuransi	3.300	0,87%	-27,5%	3.395	0,89%	2,88%
Jasa Perusahaan	6.159	1,63%	-17,1%	5.769	1,52%	-6,33%
Administrasi Pemerintahan	33.406	8,83%	0,4%	37.612	9,88%	12,59%
Jasa Pendidikan	21.477	5,68%	-0,1%	23.350	6,14%	8,72%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.968	2,90%	7,7%	9.542	2,51%	-13,00%
Jasa Lainnya	15.288	4,04%	38,4%	10.554	2,77%	-30,97%
Total	378.361	100,0%	-0,97%	380.572	100,0%	4,51%

Sumber: BPS, diolah

Selain itu, pertumbuhan signifikan juga tercatat pada beberapa sektor lainnya. Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh kuat sebesar 27,18% (yoy), sejalan dengan peningkatan aktivitas hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat kenaikan tertinggi sebesar 74,18% (yoy). Sektor Administrasi Pemerintahan juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,59% (yoy), dengan serapan tenaga kerja mencapai 37.612 orang, didorong oleh peningkatan kebutuhan aparatur pada beberapa instansi daerah. Pertumbuhan positif turut terjadi pada sektor Konstruksi yang meningkat 9,04% (yoy), serta pada sektor Jasa Pendidikan yang naik 8,72% (yoy) (Tabel VI. 2).

Di sisi lain, beberapa sektor mengalami kontraksi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran turun 8,61% (yoy). Penurunan juga terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,21% (yoy), serta sektor Akomodasi dan Makan Minum yang menurun 4,22% (yoy). Kontraksi cukup dalam tercatat pada sektor Pengadaan Air, Listrik, dan Gas sebesar 6,55% (yoy) serta Jasa Perusahaan yang turun 6,33% (yoy). Adapun sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami penurunan terbesar sebesar 13,00% (yoy), sementara sektor Jasa Lainnya turun 30,97% (yoy), mencerminkan adanya penyesuaian tenaga kerja pada sektor-sektor jasa *non-esensial* (Tabel VI. 2).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2025 masih didominasi oleh kelompok Buruh/Karyawan/Pegawai, yang mencapai 180.949 orang atau 47,55% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut

meningkat sebesar 3,3% (yoy) dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat sebanyak 175.095 orang, mencerminkan stabilnya penyerapan tenaga kerja pada sektor formal (Tabel VI.3).

Peningkatan signifikan juga terjadi pada kelompok Pekerja Bebas di Pertanian, yang tumbuh sebesar 130,7% (yoy) menjadi 17.561 orang. Selain itu, kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tetap turut mencatat kenaikan sebesar 21,7% (yoy) menjadi 15.262 orang.

Kelompok Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap juga mengalami pertumbuhan moderat sebesar 0,6% (yoy) menjadi 48.462 orang, sementara sektor Pekerja Bebas di Nonpertanian tercatat menurun sebesar 14,5% (yoy) menjadi 6.958 orang. Penurunan cukup dalam terjadi pada kelompok Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar, yang turun 18,9% (yoy) menjadi 38.981 orang, serta pada kelompok Berusaha Sendiri, yang menurun 8,0% (yoy) menjadi 72.399 orang, mengindikasikan pergeseran sebagian pelaku usaha mandiri ke sektor dengan pendapatan lebih stabil atau ke pekerjaan tetap (Tabel VI.3).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara pada Agustus 2025 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, dengan jumlah 121.958 orang atau 32,05% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut tercatat menurun tipis sebesar 1,31% (yoy) dibandingkan Agustus 2024, namun pangsaanya tetap menjadi yang terbesar dalam struktur ketenagakerjaan daerah (Tabel VI.4).

Tabel VI.3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
Berusaha sendiri	78.697	20,80%	10,8%	72.399	19,02%	-8,0%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	48.181	12,73%	-6,6%	48.462	12,73%	0,6%
Berusaha dibantu buruh tetap	12.545	3,32%	-19,8%	15.262	4,01%	21,7%
Buruh/karyawan/pegawai	175.095	46,28%	4,1%	180.949	47,55%	3,3%
Pekerja bebas di pertanian	7.613	2,01%	-46,1%	17.561	4,61%	130,7%
Pekerja bebas di nonpertanian	8.138	2,15%	-23,2%	6.958	1,83%	-14,5%
Pekerja keluarga/tak dibayar	48.092	12,71%	2,1%	38.981	10,24%	-18,9%
Total	378.361	100%	-11,26%	380.572	100,00%	16,40%

Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan	Agustus 2024		Growth (yoy)	Agustus 2025		Growth (yoy)
	Jumlah	Pangsa		Jumlah	Pangsa	
SD ke Bawah	123.573	32,66%	0,49%	121.958	32,05%	-1,31%
Sekolah Menengah Pertama	55.642	14,71%	-1,55%	52.512	13,80%	-5,63%
Sekolah Menengah Atas	88.685	23,44%	-6,27%	92.801	24,38%	4,64%
Sekolah Menengah Kejuruan	43.151	11,40%	21,30%	42.595	11,19%	-1,29%
Perguruan Tinggi	67.310	17,79%	7,55%	70.706	18,58%	5,05%
Total	378.361	100,00%		380.572	100,00%	

Sumber: BPS, diolah

Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy) menjadi 92.801 orang. Selain itu, lulusan Perguruan Tinggi juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,05% (yoy), mencapai 70.706 orang atau 18,58% dari total tenaga kerja. Sementara itu, kelompok lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat menurun sebesar 5,63% (yoy) menjadi 52.512 orang, dengan pangsa sebesar 13,80%. Penurunan juga terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang turun 1,29% (yoy) menjadi 42.595 orang, dengan pangsa 11,19% (Tabel VI.4).

6.2. Kesejahteraan

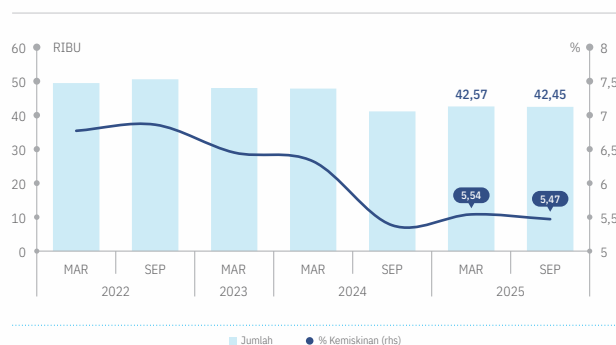
6.2.1. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS per September 2025, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 42,45 ribu jiwa atau 5,47% dari total penduduk. Angka ini menurun tipis dibandingkan kondisi Maret 2025 yang sebesar 42,57 ribu jiwa atau 5,54%, sehingga terjadi penurunan sebanyak 0,12 ribu jiwa secara absolut dan 0,07 persen poin secara persentase. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan setelah peningkatan kemiskinan yang terjadi pada periode September 2024 hingga Maret 2025.

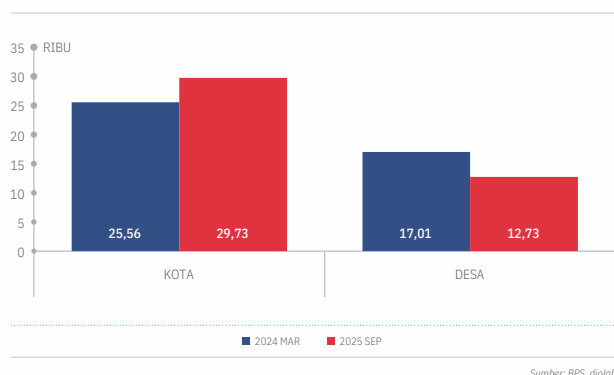
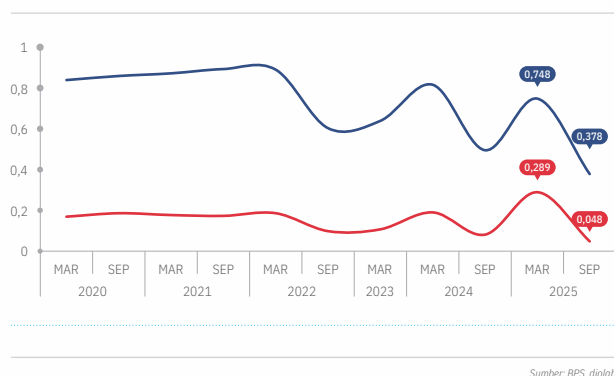
Secara spasial, perkembangan kemiskinan menunjukkan dinamika yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin

meningkat dari 25,56 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 29,73 ribu orang pada September 2025. Sebaliknya, di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin menurun dari 17,01 ribu orang menjadi 12,73 ribu orang. Dengan demikian, perbaikan tingkat kemiskinan secara agregat terutama ditopang oleh penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan, meskipun tekanan kemiskinan di wilayah perkotaan meningkat (Grafik VI.4).

Struktur garis kemiskinan di Kalimantan Utara masih didominasi oleh komponen konsumsi makanan, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap total pengeluaran minimum. Pada September 2025, pola komoditas penyumbang garis

Grafik VI.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kaltara periode 2022 – 2025

Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.4. Perkembangan Penduduk Miskin Kaltara di Perkotaan dan Desa periode 2024 dan 2025**Grafik VI.5. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Periode 2020-2025**

kemiskinan makanan menunjukkan perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, lima komoditas utama penyumbang garis kemiskinan makanan adalah beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bandeng. Di perdesaan, susunannya sedikit berbeda yaitu beras, rokok kretek/filter, telur ayam ras, daging ayam ras, dan gula pasir. Komoditas beras tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 24,26% di perkotaan dan 29,70% di perdesaan, menegaskan pentingnya stabilisasi harga pangan pokok, khususnya beras, sebagai bagian dari strategi pengendalian kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 tercatat sebesar 0,378, mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Maret 2025 yang sebesar 0,748. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan, dari 0,289 pada Maret 2025 menjadi 0,048 pada September 2025. Penurunan P2 ini mencerminkan bahwa ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin semakin membaik, di mana beban kemiskinan tidak hanya menurun secara umum, tetapi juga semakin merata antar individu dalam kelompok miskin tersebut.

6.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Utara pada Desember 2025 tercatat sebesar 117,08, meningkat 1,97% (yoy) dibandingkan dengan Desember 2024 sebesar 114,82. Peningkatan NTP ini didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 3,29% (yoy), dari 131,72 menjadi 136,05. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga meningkat sebesar 1,29% (yoy), dari 114,72 menjadi 116,20, yang mencerminkan adanya kenaikan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi. Secara lebih rinci, Indeks Konsumsi Rumah Tangga meningkat sebesar 1,68% (yoy), sedangkan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) tumbuh relatif terbatas sebesar 0,19% (yoy) (Tabel VI.5).

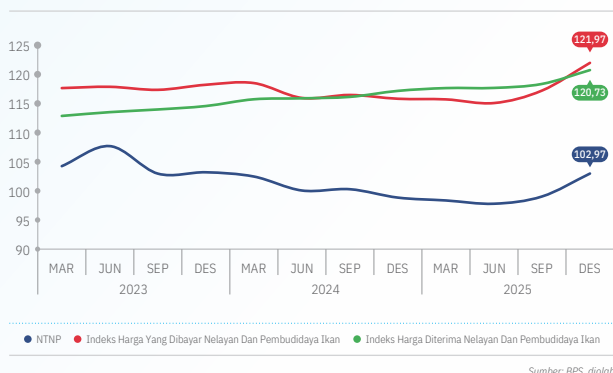
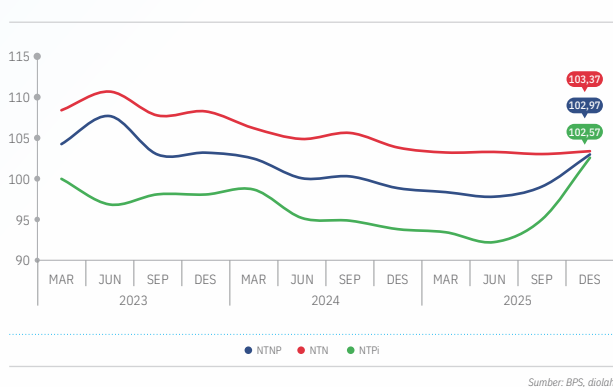
Secara sektoral, peningkatan NTP terutama didorong oleh kinerja subsektor perikanan dan tanaman perkebunan rakyat yang mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 4,18% (yoy) dan 3,13% (yoy). Selain itu, subsektor hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan juga menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 0,44%, 0,34%, dan 0,28% (yoy). Perkembangan ini mengindikasikan perbaikan harga komoditas pada sebagian besar subsektor pertanian di Kalimantan Utara (Tabel VI.5).

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) di Provinsi Kalimantan Utara pada Desember 2025 tercatat sebesar 102,97, atau meningkat sebesar 4,18% (yoy) dibandingkan dengan posisi Desember 2024 sebesar 98,84. Peningkatan NTNP ini mengindikasikan membaiknya daya beli nelayan dan pembudidaya ikan, seiring dengan kenaikan harga jual hasil tangkapan maupun komoditas budidaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan biaya konsumsi dan biaya produksi yang mereka tanggung.

Tabel VI.5. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kaltara

Indeks	2024	2025	YOY
	Des	Des	
Tanaman Pangan	102,74	103,03	0,28%
Hortikultura	101,84	102,29	0,44%
Tanaman Perkebunan Rakyat	195,03	201,14	3,13%
Peternakan	101,07	101,41	0,34%
Perikanan	98,84	102,97	4,18%
Gabungan			
NTP	114,82	117,08	1,97%
Indeks Harga yg Diterima Petani (%)	131,72	136,05	3,29%
Indeks Harga yg Dibayar Petani (%)	114,72	116,2	1,29%
a. Indeks Konsumsi RT	115,34	117,28	1,68%
b. Indeks BPPBM	111,08	111,29	0,19%

Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.6. NTNP, Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan**Grafik VI.7. NTNP, NTN, dan NTPi**

Secara rinci, Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) pada Desember 2025 tercatat sebesar 121,97, meningkat sebesar 5,32% (yoy) dibandingkan 115,81 pada Desember 2024. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar (Ib) juga meningkat, yaitu sebesar 3,05% (yoy), dari 117,16 menjadi 120,73. Dengan demikian, pertumbuhan It yang lebih tinggi dibandingkan Ib menjadi faktor utama peningkatan NTNP pada Desember 2025, menandakan bahwa perbaikan harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan mampu mengimbangi tekanan biaya produksi dan konsumsi.

Dari sisi nelayan tangkap, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Desember 2025 tercatat sebesar 103,37 atau relatif stabil dengan kontraksi tipis sebesar 0,43% (yoy) dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 103,82. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima nelayan tangkap relatif sejalan dengan peningkatan biaya yang mereka tanggung.

Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) berada pada level 102,57 atau meningkat sebesar 9,34% (yoy) dari 93,81 pada Desember 2024. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan membaiknya daya beli pembudidaya ikan, seiring dengan perbaikan harga komoditas budidaya yang mampu melampaui kenaikan biaya produksi (Grafik VI.7).

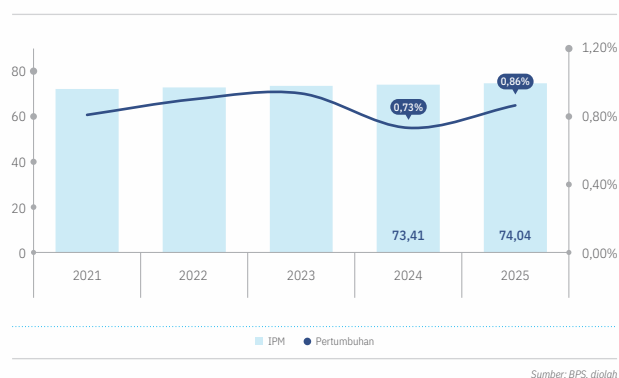
6.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. IPM tercatat sebesar 71,57 pada 2021, meningkat menjadi 72,21 pada 2022, dan 72,88 pada 2023. Tren positif tersebut berlanjut pada 2024 dengan capaian 73,41, serta kembali meningkat pada 2025 menjadi 74,04, atau tumbuh 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik VI.8). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara.

Peningkatan IPM pada tahun 2025 didukung oleh perbaikan pada seluruh dimensi penyusunnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) meningkat dari 73,57 tahun pada 2024 menjadi 73,68 tahun pada 2025. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,21 tahun menjadi 13,31 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,35 tahun menjadi 9,44 tahun.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan penguatan yang tercermin dari meningkatnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari Rp10.197 ribu pada 2024 menjadi Rp10.568 ribu pada 2025. Kenaikan pada seluruh dimensi tersebut mengindikasikan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kemampuan ekonomi.

Secara keseluruhan, capaian IPM Kalimantan Utara pada tahun 2025 menunjukkan keberlanjutan proses pembangunan manusia yang inklusif. Meskipun laju pertumbuhan relatif moderat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, peningkatan yang konsisten di seluruh indikator utama mencerminkan terjaganya momentum pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Grafik VI.8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara

Tabel VI.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara Menurut Dimensi Penyusunnya

Dimensi	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	72,65	73,51	73,54	73,57	73,68
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,94	13,06	13,20	13,21	13,31
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11	9,27	9,34	9,35	9,44
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rp)	9.075	9.350	9.734	10.197	10.568

Sumber : Bank Indonesia

Tabel VI.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan

Provinsi	2025			Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) 2025	IPM 2025		
	UHH	HLS	RLS		Nilai	Pertumbuhan	Nasional
Kalimantan Barat	74,28	12,69	8,07	10.689	72,09	0,9	32
Kalimantan Tengah	74,01	12,78	8,96	12.612	74,86	0,58	20
Kalimantan Selatan	74,49	13,12	8,81	13.757	76,1	0,91	13
Kalimantan Timur	75,28	14,04	10,1	14.254	79,39	0,6	4
Kalimantan Utara	73,68	13,31	9,44	10.568	74,04	0,63	26
Indonesia	74,47	13,3	9,07	12.341	75,9	0,88	-

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan perbandingan secara regional Kalimantan pada tahun 2025, IPM Kalimantan Utara menempati peringkat kelima di wilayah Kalimantan dengan nilai 74,04, berada di bawah Kalimantan Timur (79,39), Kalimantan Selatan (76,10), Kalimantan Tengah (74,86), dan Kalimantan Barat (72,09), serta berada pada peringkat ke-26 secara nasional.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara diharapkan mampu mendukung kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, seiring dengan pengembangan berbagai proyek strategis di wilayah tersebut, termasuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong transformasi ekonomi daerah.

6.2.4 GINI Ratio

Berdasarkan data BPS per September 2025, Gini Ratio Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,261. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Secara spasial, *Gini Ratio* di wilayah perkotaan turun dari 0,262 pada Maret 2025 menjadi 0,255 pada September 2025, sementara di wilayah perdesaan juga menurun dari 0,253 menjadi 0,242. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Tabel VI.8).

Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan yang umum digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah. Indikator ini mengukur distribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap total pengeluaran penduduk, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah. Menurut klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan dikategorikan rendah apabila angka pengeluaran 40% terbawah berada di atas 17 persen.

Pada September 2025, distribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah di Kalimantan Utara tercatat sebesar 24,89%, meningkat dibandingkan 24,64% pada Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperkuat indikasi menurunnya ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

Secara nasional, Kalimantan Utara tetap termasuk provinsi dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Capaian ini masih lebih baik dibandingkan sebagian provinsi lain di

Tabel VI.8. GINI Ratio Penduduk di Kaltara Menurut Daerah

Ukuran Ketimpangan	Mar 2024			Sep 2025		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
<i>Gini Ratio</i>	0,262	0,253	0,261	0,255	0,242	0,251
Bank Dunia 40% Terbawah	24,47	24,98	24,64	24,84	24,42	24,89

Sumber: BPS, diolah

Tabel VI.9. Perbandingan *GINI Ratio* Se-Kalimantan

Provinsi	2024		2025		Posisi Nasional (Gini Ratio terendah)	September Mar-Sep 2025 (yoy)
	MAR	SEP	MAR	SEP		
Kalimantan Barat	0,310	0,314	0,316	0,308	15	-2,53%
Kalimantan Tengah	0,301	0,304	0,292	0,284	10	-2,74%
Kalimantan Selatan	0,302	0,298	0,287	0,281	8	-2,09%
Kalimantan Timur	0,321	0,31	0,312	0,31	17	-0,64%
Kalimantan Utara	0,264	0,259	0,261	0,251	2	-3,83%

Sumber: BPS, diolah

Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, yang umumnya memiliki *Gini Ratio* lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa pemerataan pendapatan di Kalimantan Utara secara relatif masih lebih baik dibandingkan wilayah Kalimantan lainnya (Tabel VI.9).





Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIH dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

Inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG.

7.1 Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap tangguh pada 2026 di tengah perubahan kebijakan perdagangan global. IMF memperkirakan perekonomian global tumbuh 3,3% (yoy) pada 2026, relatif sama dengan estimasi realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,3% (yoy). Perkiraan tersebut disebabkan oleh lonjakan investasi pada sektor teknologi, termasuk *artificial intelligence* (AI), dukungan fiskal dan moneter, kondisi keuangan yang akomodatif, serta adaptasi sektor swasta yang dapat meredam tekanan perubahan kebijakan perdagangan. Ekonomi negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 1,8% (yoy) pada 2026, meningkat dari estimasi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 1,7% (yoy). Sementara itu, negara berkembang diperkirakan tumbuh 4,2% (yoy), menurun dari estimasi pertumbuhan 2025 sebesar 4,4% (yoy).

Perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh 2,4% (yoy) pada 2026, meningkat dari 2,1% (yoy) pada 2025. Peningkatan pertumbuhan ekonomi AS tersebut didukung oleh kebijakan fiskal dan suku bunga kebijakan yang lebih rendah di tengah dampak dari peningkatan hambatan perdagangan yang secara bertahap mereda. Ekonomi Euro Area diperkirakan tumbuh melambat yaitu sebesar 1,3% (yoy), dari estimasi pertumbuhan 2025 sebesar 1,4% (yoy) terdampak ketidakpastian yang tinggi akibat proses renegosiasi tarif dagang yang masih berlanjut. Lebih lanjut, ekonomi Tiongkok diperkirakan tumbuh 4,5% (yoy) pada 2026, melambat dari tahun 2025 sebesar 5,0% (yoy). Sejalan dengan perlambatan di negara maju, melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga disebabkan oleh tarif resiprokal AS (Tabel VII.1).

Disinflasi global diperkirakan terus berlanjut pada 2026.

Inflasi global diproyeksikan sebesar 3,8% (yoy) pada 2026, menurun dari inflasi 2024 sebesar 4,1% (yoy). Perkiraan tersebut sejalan dengan tren pelemahan permintaan dan penurunan harga energi secara global. Inflasi negara maju diperkirakan sebesar 2,2% (yoy) pada 2026, sedikit menurun dari inflasi 2025 sebesar 2,5% (yoy), dipengaruhi oleh dampak lanjutan dari kenaikan tarif yang terjadi secara bertahap. Inflasi negara berkembang diperkirakan sebesar 4,8% (yoy) pada 2026, menurun dari inflasi 2025 sebesar 5,2% (yoy).

Volume perdagangan global 2026 diperkirakan menurun sejalan dengan pemberlakuan tarif dagang AS dan ketegangan konflik Timur Tengah. IMF memproyeksikan bahwa volume perdagangan (barang dan jasa) global pada 2026 tumbuh sebesar 2,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan 2025 sebesar 4,1% (yoy). Prakiraan tersebut sejalan dengan penyesuaian arus perdagangan terhadap kebijakan dagang global terkini. Ke depan, eskalasi perang tarif dagang dan konflik geopolitik yang berkepanjangan diperkirakan akan memberikan

Tabel VII.1. Perbandingan Ekonomi Negara Lain

Indikator	%yoy			
	2024	2025	2026	2027
PDB Global	3,3	3,3	3,3	3,2
Negara Maju	1,8	1,7	1,8	1,7
AS	2,8	2,1	2,4	2,0
Euro Area	0,9	1,4	1,3	1,4
Jerman	-0,5	0,2	1,1	1,5
Prancis	1,1	0,8	1,0	1,2
Italia	0,7	0,5	0,7	0,7
Spanyol	3,5	2,9	2,3	1,9
Jepang	-0,2	1,1	0,7	0,6
Inggris	1,1	1,4	1,3	1,5
Negara Berkembang	4,3	4,4	4,2	4,1
Tiongkok	5,0	5,0	4,5	4,0
India	6,5	7,3	6,4	6,4
Rusia	4,3	0,6	0,8	1,0
Brazil	3,4	2,5	1,6	2,3
Afrika Selatan	0,5	1,3	1,4	1,5
Inflasi Global	5,8	4,1	3,8	3,4
Negara Maju	2,6	2,5	2,2	2,1
Negara Berkembang	7,9	5,2	4,8	4,3
Volume Perdagangan Global (Barang & Jasa)	3,6	4,1	2,6	3,1

Sumber: IMF-World Economic Outlook Update, January 2026, diolah

dampak lebih lanjut pada aktivitas perdagangan yang mempengaruhi jalur dan/atau rantai pasok, terutama pada negara yang berorientasi ekspor.

Pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan berlanjut di tengah peningkatan defisit fiskal 2026 beberapa negara maju.

Mayoritas bank sentral diperkirakan akan melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan sejalan dengan disinflasi yang terus berlanjut. Pada 2026, Federal Reserve dan Bank of England diperkirakan akan melanjutkan penurunan suku bunga kebijakan meski dengan laju penurunan yang berbeda, sementara European Central Bank diperkirakan akan menempuh suku bunga kebijakan yang tetap dan Bank of Japan akan meningkatkan suku bunga kebijakan. Di sisi lain, arah kebijakan fiskal tahun 2026 diperkirakan ekspansif terutama di AS, Jerman, dan Jepang dalam rangka memperkuat kinerja permintaan domestik.

7.2 Prospek Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh positif pada 2026 sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat

ditopang berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik serta peningkatan kegiatan ekonomi pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H. Investasi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2026 meningkat dalam kisaran 4,9–5,7% (yoy) sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2026 diperkirakan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran. Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2026 dan 2027 secara tahunan akan menurun sehingga tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Sementara itu, inflasi *volatile food* (VF) diperkirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga *BI-Rate* lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi (*pro-growth*) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

7.3 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Kaltara

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi *smelter* aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIH dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Sementara itu, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026 dibandingkan dengan realisasi 2025 sebesar 8,99% (yoy). Kondisi ini didorong oleh mulai beroperasinya *smelter* Aluminium dengan kapasitas produksi yang meningkat secara bertahap. Selain itu, industri pengolahan kelapa sawit juga diperkirakan meningkat sejalan dengan produksi CPO yang lebih tinggi di tengah harga yang semakin kompetitif. Aktivitas produksi olahan kayu seperti bubur kertas dan *plywood* juga diperkirakan meningkat pada 2026 seiring meningkatnya produksi kayu di tengah kondisi cuaca yang lebih baik.

LU Perdagangan diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi pada 2026 jika dibandingkan realisasi 2025 sebesar 9,84% (yoy). LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh positif didorong oleh peningkatan perdagangan barang domestik dan

impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh optimisme konsumen yang tercermin dari IKK yang berada di level yang tinggi dan kredit yang tetap tumbuh. Selain itu, komoditas baru Aluminium diperkirakan akan meningkatkan kinerja LU Perdagangan pada 2026. Aktivitas perdagangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, serta meningkatnya aktivitas LU Pertanian dan produksi LU Industri Pengolahan selama periode 2026.

LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2026, meski sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2025 yang tumbuh 11,17% (yoy). Kondisi ini didorong oleh pembangunan sejumlah proyek strategis seperti finalisasi konstruksi fasilitas *smelter* aluminium di KIH, pembangunan PLTA Sei Mentarang, dan pembangunan tahap kedua pabrik bubur kertas. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi yang lebih tinggi tertahan oleh penundaan proyek infrastruktur pemerintah akibat anggaran yang terbatas. Meski demikian, masih terdapat peluang proyek konstruksi pemerintah lainnya yang dapat direalisasikan pada periode mendatang. RPJMD Provinsi Kaltara mencatat bahwa pemerintah daerah mencanangkan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan konektivitas jalan Malinau - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada 2026 dibandingkan dengan realisasi 2025 yang tercatat tumbuh 2,60% (yoy). Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akan berlanjut meningkat pada 2026. Pertumbuhan sektor pertanian akan didukung oleh optimisme peningkatan produksi TBS di tengah berlanjutnya kenaikan harga TBS, serta peningkatan produksi padi sejalan dengan perluasan operasi lahan GERINA pada 2025. Sektor perikanan juga diperkirakan meningkat pada 2026, sejalan dengan optimisme kenaikan harga komoditas perikanan pada 2026 serta didorong oleh fokus pembudidaya perikanan untuk meningkatkan produksi di tengah potensi peningkatan permintaan pada sektor perikanan. Selain itu, produksi komoditas rumput laut diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan tren harga yang berlanjut meningkat sejak 2024.

Kinerja LU Pertambangan pada 2026 diperkirakan lebih rendah dari realisasi tahun 2025 yang tercatat berkontraksi sebesar -1,09% (yoy). LU Pertambangan diperkirakan tumbuh lebih rendah pada 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan tersebut disebabkan potensi penurunan target produksi batu bara pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk menjaga harga batu bara global, menjaga pasokan, dan cadangan nasional. Selain itu, kinerja LU Pertambangan yang terbatas tersebut juga terdampak penurunan permintaan batu bara global akibat

pelemahan permintaan terdampak perang tarif dagang dan fokus pengembangan sumber energi terbarukan di negara tujuan ekspor utama.

Dari sisi permintaan, perekonomian Prov. Kaltara 2026 diperkirakan tetap melanjutkan tren positif. Peningkatan pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh komponen sisi permintaan. Konsumsi RT Prov. Kaltara diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan kenaikan UMP dan UMK 2026, meningkatnya jumlah pekerja, dan ekspektasi masyarakat yang terjaga pada level optimis. Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tumbuh pada 2026, didorong adanya belanja anggaran pemerintah pusat di Kaltara seperti pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih, serta potensi pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2025. Investasi diperkirakan akan berlanjut tumbuh namun terbatas pada 2026 sejalan dengan masuknya aktivitas konstruksi pada tahap finalisasi di KIP dan penundaan proyek infrastruktur pemerintah. Kegiatan ekspor dan impor pada keseluruhan 2026 diperkirakan akan tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi.

Terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Prov. Kaltara ke depan. Perkembangan ekonomi Prov. Kaltara dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor eksternal adalah terkait dengan (i) perkembangan perekonomian negara tujuan ekspor utama, diantaranya perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada melambatnya permintaan ekspor sejumlah komoditas utama batu bara dan produk perikanan; (ii) kembali memanasnya konflik geopolitik seperti Tiongkok-Jepang, Rusia-Ukraina, dan konflik Timur Tengah yang dapat berdampak pada terganggunya rantai pasok global; (iii) ketidakpastian perang tarif dagang AS dengan negara lain; serta (iv) normalisasi permintaan batu bara global sejalan dengan maraknya penggunaan *renewable energy*. Sementara itu, dari sisi internal, beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan adalah (i) faktor cuaca buruk yang dapat berdampak pada produktivitas hasil panen pertanian, ikan tangkap, dan hasil tambang serta terganggunya distribusi pasokan; (ii) tidak kondusifnya situasi politik atau pemerintahan yang dapat berdampak pada penurunan investasi dan peningkatan *capital outflow*; dan (iii) tertundanya belanja dan/atau program strategis pemerintah yang berdampak pada rendahnya realisasi dan efek pengganda belanja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, perekonomian Prov. Kaltara pada 2026 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Prakiraan tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi baru di Kaltara pada 2026 yang diikuti dengan bertambahnya jumlah

tenaga kerja. Target operasionalisasi (KIHI) dan industri energi terbarukan seperti PLTA Sei Mentarang dan PLTA Sei Pancang yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur perekonomian Prov. Kaltara. Selain itu, permintaan produk dan peningkatan produksi hasil sektor perkebunan seperti TBS dan sektor industri pengolahan seperti CPO juga berpotensi meningkat pada 2026 didukung dengan perkembangan tren harga yang meningkat. Adapun optimisme pertumbuhan ekonomi Kaltara ke depan juga didukung oleh prakiraan PMI negara dagang utama India dan Tiongkok yang diperkirakan masih tetap dalam fase ekspansif (diatas 50) pada tahun 2026.

7.4 Prospek Inflasi Kalimantan Utara

Inflasi Prov. Kaltara 2026 diperkirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prov. Kaltara diperkirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Inflasi inti diperkirakan berada pada titik tengah sasaran target inflasi pada 2026, seiring kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan peningkatan permintaan masyarakat yang didorong oleh kenaikan UMP dan UMK. Inflasi *administered price* juga berpotensi lebih tinggi dari tahun sebelumnya didorong oleh tensi geopolitik dengan ketidakpastian yang tinggi dan berkurangnya subsidi pemerintah di tengah efisiensi anggaran. Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan relatif sama dengan tahun sebelumnya, didorong oleh fokus pemerintah untuk menciptakan kondisi pasokan yang terjaga. Meski demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga pangan utama seperti beras, aneka cabai, bawang merah, dan daging ayam yang secara historis terjadi di akhir tahun. Selain itu, pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat juga berpotensi meningkatkan permintaan komoditas makanan dari sektor hotel, restoran, dan catering (horeca).

Sejumlah potensi risiko inflasi yang lebih tinggi perlu diwaspadai dalam upaya menjaga inflasi Prov. Kaltara 2026 sesuai target. Risiko inflasi Prov. Kaltara pada 2026 terutama bersumber dari penyesuaian subsidi pemerintah yang berpotensi meningkatkan tekanan harga, seperti penyesuaian subsidi ongkos angkutan dapat berdampak pada kenaikan harga distribusi dan gangguan pasokan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga di tingkat produsen. Potensi kenaikan harga *administered price* bersumber dari penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan udara. Pada sisi eksternal, ketegangan geopolitik antara Russia-Ukraina dan konflik Timur Tengah serta perang tarif impor oleh Amerika Serikat berpotensi mengganggu produksi dan alur distribusi pangan, energi, serta pupuk sehingga memberikan tekanan terhadap harga komoditas bahan baku dan energi.

Berdasarkan sejumlah risiko inflasi tersebut, berbagai program dan langkah koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID semakin diperkuat. TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Prov. Kaltara telah menyusun sejumlah program kerja strategis dalam pengendalian inflasi berdasarkan kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah lain untuk mendukung terpenuhinya pasokan komoditas pangan strategis juga terus dilakukan terutama pada momen menjelang HBKN yang secara historis memiliki risiko inflasi lebih tinggi ataupun ketika terjadi tekanan harga pada komoditas tertentu. Berbagai program unggulan yang dilakukan, seperti (1) Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang diharapkan dapat tetap berlangsung sehingga mampu menekan inflasi khususnya dari sisi biaya distribusi; (2) Penerapan kebijakan *window scheduling* dan peningkatan kapasitas pelabuhan agar memprioritaskan bongkar muat komoditas bapokting di Pelabuhan Malundung, Tarakan; dan (3) Berbagai dukungan untuk penguatan produksi dari sisi hulu dan hilir juga turut diimplementasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Prov. Kaltara.

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Berth Occupancy Ratio (BOR)	Perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Alokasi Umum (DAU)	Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.
Dwelling Time	Total waktu yang dibutuhkan peti kemas selama di pelabuhan. Waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (container) dibongkar dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Ekspor-Import	Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)	Proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong ekonomi hijau dan transisi energi.
Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)	Laporan yang berisi informasi yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh otoritas.

<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun (giro, tabungan dan deposito).
<i>Month to month (mtm)</i>	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<i>Makanan Bergizi Gratis (MBG)</i>	Program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau non-lancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.
<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).
<i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<i>Purchasing Managers Index (PMI)</i>	Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.
<i>Quarter to quarter (qta)</i>	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<i>Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)</i>	Rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
<i>Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)</i>	Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya. TPID berfungsi untuk memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar, serta melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengendalikan inflasi
<i>Year on year (yoy)</i>	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Pengarah

Hasiando G. Manik

Penanggung Jawab

Reza Hidayat

Koordinator Penyusun & Editor

Gabriel Fedrichson

Tim Penulis

M. Rizki Prasetyo

Rizkyandra Rifandana Hendrawan

Aditya Dwi Rahmadi

Yahya Kurniawan

Fadhali Irfan

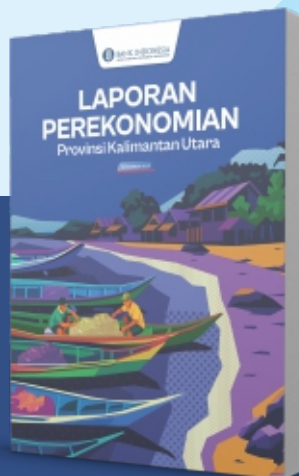
Haikal Muhammad

Arfian Saputra Siregar

Haikal Muhammad

Gabriel Fedrichson

Riza Abditya Wijaya



Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Kantor Perwakilan BankIndonesia Provinsi Kalimantan Utara

Jl. Mulawarman No. 123 Tarakan
KalimantanUtara77117
Telp : 0551 - 3807777, Fax : 0551 - 3803131
www.bi.go.id

